diskominfo
KABUPATEN MIMIKA

Buku 1

Analisis Strategis Smart City Daerah Kabupaten Mimika

Pemerintah
Kabupaten Mimika
2023

Buku 1

Analisis Strategis Smart City Daerah Kabupaten Mimika

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2023

Daftar Isi

Daftar Isi ..... **II**

Daftar Gambar ..... **IV**

Daftar Tabel ..... **VI**

BAB 1 ANALISIS MASA DEPAN **1-1**

1.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah **1-1**

1.1.1 Visi Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 1-1

1.1.2 Tujuan dan Sasaran 1-4

1.1.3 Pemetaan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi *Smart City* 1-6

1.1.4 Analisis Perilaku dan Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah 1-9

1.1.5 Analisis Daya Saing Daerah 1-11

1.1.6 Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang Relevan dengan Kebutuhan Stakeholder yang Ada 1-16

1.2 Analisis Kondisi Eksternal **1-18**

1.2.1 Analisis Tren dan Perkembangan Politik 1-18

1.2.2 Analisis Tren dan Perkembangan Ekonomi 1-20

1.2.3 Analisis Tren dan Perkembangan Sosial Budaya 1-22

1.2.4 Analisis Tren dan Perkembangan Teknologi 1-23

1.2.5 Analisis Tren dan Perkembangan Lingkungan 1-25

1.2.6 Analisis Tren dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan 1-27

BAB 2 ANALISIS KESIAPAN DAERAH **2-30**

2.1 Nature **2-31**

2.1.1 Kondisi Geografis 2-31

2.1.2 Topografi 2-33

2.1.3 Geologi 2-36

2.1.4 Hidrologi....2-39
2.1.5 Klimatologi....2-43
2.1.6 Penggunaan Lahan....2-45
2.1.7 Kawasan Rawan Bencana....2-47
2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah....2-50

2.2 Struktur....2-61
2.2.1 Analisis Kualitas SDM Kependudukan....2-61
2.2.2 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan....2-65
2.2.3 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah....2-69

2.3 Infrastruktur....2-70
2.3.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah....2-71
2.3.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah....2-75
2.3.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah....2-83

2.4 Suprastruktur....2-88
2.4.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah....2-88
2.4.2 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah....2-88
2.4.3 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah....2-89

2.5 Culture....2-89

BAB 3 ANALISIS GAP STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY....3-91

3.1 Analisis GAP....3-91

3.2 Analisis SWOT....112
3.2.1 Analisis SWOT *Smart Economy* Kabupaten Mimika....3-116
3.2.2 Analisis SWOT *Smart Governance* Kabupaten Mimika....3-119
3.2.3 Analisis SWOT *Smart Branding* Kabupaten Mimika....3-122
3.2.1 Analisis SWOT *Smart Living* Kabupaten Mimika....3-123
3.2.1 Analisis SWOT *Smart Society* Kabupaten Mimika....3-124
3.2.1 Analisis SWOT *Smart Environment* Kabupaten Mimika....3-126

BAB 4 ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY....4-127

4.1 Visi, Misi, Smart City....4-127

4.2 Sasaran Smart City Daerah....4-129

Daftar Pustaka....4-137

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Proses Pencapaian Visi Kabupaten Mimika 2020-2024 1-3
Gambar 1.2 Dimensi *Smart City* 1-7
Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Per Triwulan-II Tahun 2019, 2020, dan 2021 (%, yoy) 1-20
Gambar 1.4 Hubungan antara standar ISO 37120 dan 37122 1-29
Gambar 2.1 Pilar Smart City Daerah 2-31
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Mimika 2-32
Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Mimika 2-35
Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika 2-36
Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Mimika 2-38
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Mimika 2-39
Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Mimika 2-42
Gambar 2.8 Rata-Rata Suhu Udara Kabupaten Mimika Tahun 2020 2-43
Gambar 2.9 Rata-Rata Kelembaban Udara Kabupaten Mimika Tahun 2020 ... 2-44
Gambar 2.10 Jumlah Hari Hujan Kabupaten Mimika Tahun 2020 2-44
Gambar 2.11 Peta Curah Hujan Kabupaten Mimika 2-45
Gambar 2.12 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika 2-47
Gambar 2.13 Peta Rawan Tanah Longsor Kabupaten Mimika 2-48
Gambar 2.14 Peta Rawan Banjir Kabupaten Mimika 2-49
Gambar 2.15 Peta Rawan Gelombang Pasang Kabupaten Mimika 2-50
Gambar 2.16 Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Mimika 2-52
Gambar 2.17 Peta Rencana Kawasan Perkebunan Kabupaten Mimika 2-55
Gambar 2.18 Peta Rencana Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Mimika .. 2-56
Gambar 2.19 Peta Rencana Kawasan Pertambangan Kabupaten Mimika 2-59
Gambar 2.20 Peta Rencana Kawasan Pariwisata Kabupaten Mimika 2-60
Gambar 2.21 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika 2-63
Gambar 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mimika Tahun 2016-2020 2-63
Gambar 2.23 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mimika Tahun 2016-2020 2-65

Gambar 2.24 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Mimika (Km) Tahun 2014-2020 2-72
Gambar 2.25 Infrastrukur Digital Kabupaten Mimika Tahun 2023 2-76
Gambar 2.26 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Masing-Masing Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020 2-85
Gambar 2.27 Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Masing-Masing Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020 2-87

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mimika pada Dimensi Smart City 1-7
Tabel 1.2 Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika . 1-16
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distri Tahun 2022 2-32
Tabel 2.2 Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2022 2-34
Tabel 2.3 Kondisi Geologi Kabupaten Mimika 2-36
Tabel 2.4 Jenis Tanah Kabupaten Mimika 2-38
Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika 2-40
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika Tahun 2017 2-46
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2022 2-61
Tabel 2.8 Data Inventarisasi SDM di setiap OPD di Kabupaten Mimika 2-65
Tabel 2.9 Kinerja Layanan Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun 2019 2-73
Tabel 2.10 Jumlah Bandara, Pelabuhan, Terminal, dan Status Pengelola Kabupaten Mimika Tahun 2019 2-74
Tabel 2.11 Jaringan Komunikasi Kabupaten Mimika Tahun 2017-2019 2-76
Tabel 2.11 Aplikasi Kabupaten Mimika Tahun 2023 2-78
Tabel 2.12 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Masing-Masing Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020 2-83
Tabel 2.13 Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Masing-Masing Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020 2-86
Tabel 3.1 Alat Analisis Kesenjangan Smart City Kabupaten Mimika 3-92
Tabel 3.2 Matriks SWOT 113
Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Smart Economy Kabupaten Mimika 3-116
Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Smart Governance Kabupaten Mimika 3-119
Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Smart Branding Kabupaten Mimika 3-122
Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Smart Living Kabupaten Mimika 3-123
Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Smart Society Kabupaten Mimika 3-124
Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Smart Environment Kabupaten Mimika ... 3-126
Tabel 4.1 Sasaran Smart City Kabupaten Mimika 4-133

BAB 1
Analisis Masa Depan

1.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah

1.1.1 Visi Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Visi RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

Visi Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 yang telah dirumuskan adalah

"TERWUJUDNYA MIMIKA CERDAS, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA"

Visi pembangunan yang telah dirumuskan perlu diuraikan setiap pokok-pokok visi untuk memberikan arah pembangunan yang terukur. Berikut merupakan penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Mimika tersebut:

- **Cerdas**

  Hulu terbentuknya masyarakat yang sejahtera dimulai dari masing-masing sumberdaya manusia itu sendiri. Pembentukan sumberdaya manusia yang cerdas memberikan bekal perencanaan kedepanya dimana masyarakat merupakan aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Mimika memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi dalam lingkup regional Papua, namun bukan berarti sumberdaya manusia yang ada telah berada pada tahapan siap untuk melangkah lebih jauh. Oleh karenanya, visi Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 diawali dari unsur intrinsik nilai pembangunan itu sendiri, yakni sumberdaya manusia yang cerdas.

- **Aman**

  Memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang didukung oleh penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM)

- **Damai**

  Menciptakan hubungan antar suku yang harmonis dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong
- **Sejahtera**

  Kesejahteraan merupakan hilir dari setiap holistikisasi perencanaan pembangunan daerah. Cita-cita setiap penyelenggaraan pemerintahan bermuara untuk kesejahteraan rakyatnya. Visi Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 ingin membawa masyarakat Mimika menuju kesejahteraan yang lebih pada 5 tahun mendatang

Hal yang perlu ditekankan dalam pembangunan Kabupaten Mimika 5 tahun kedepan dari nilai filosofis visi yang dirumuskan adalah bagaimana proses pencapaian kesejahteraan masyarakat Mimika adalah dimulai dari kata cerdas dalam visi tersebut yang artinya kemampuan Sumberdaya Manusia yang ada. Selanjutnya kondisi sosial masyarakat meliputi aman-damai yang mengindikasikan kondusif nya lingkunan. Hal tersebut dijelaskan melalui gambar berikut.

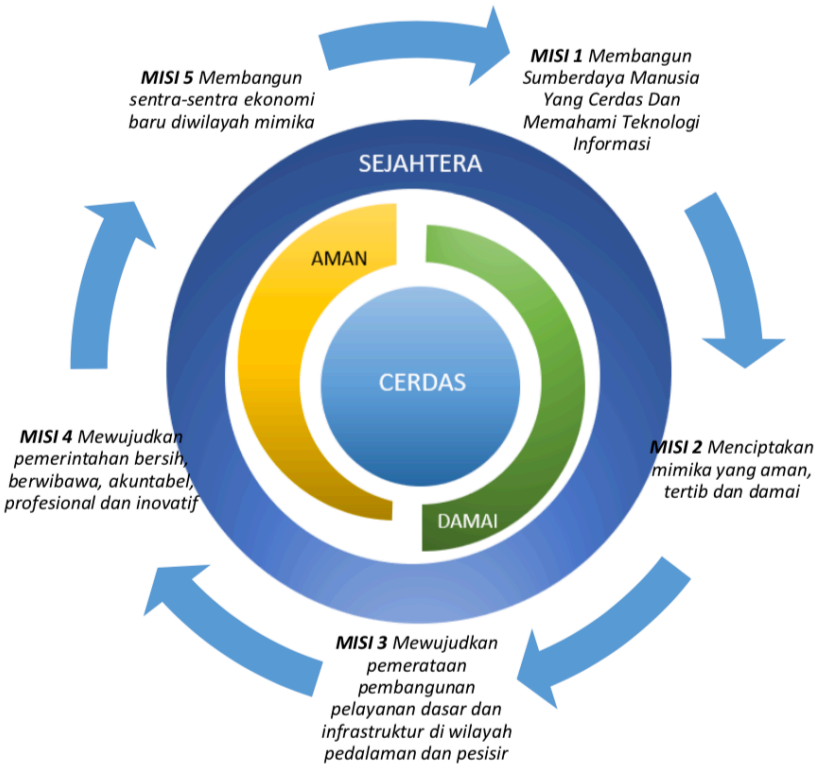

Gambar 1.1 Proses Pencapaian Visi Kabupaten Mimika 2020-2024

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

Misi RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

Untuk mencapai Visi Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, maka dirumuskan 5 (lima) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

MISI 1 Membangun Sumberdaya Manusia Yang Cerdas Dan Memahami Teknologi Informasi

Misi ini bertujuan untuk Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi ini nantinya meliputi aspek Pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, IPTEK, dan kemiskinan.

MISI 2 Menciptakan mimika yang aman, tertib dan damai

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib dan Mewujudkan masyarakat yang damai. Misi ini nantinya meliputi aspek

kriminalitas, toleransi masyarakat, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh maupun antar suku.

MISI 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Misi ini natninya meliputi pemerataan infrastruktur dan ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik bagi seluruh masyarakat Mimika hingga wilayah pedalaman dan pesisir. Selain itu juga pembangunan infrastruktur tidak lupa memperhatikan keseimbangan lingkungan.

MISI 4 Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif

Misi ini bertujuan untuk Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif. Misi ini meliputi akuntabilitas kinerja pemerintahan, reformasi birokrasi, Pelayanan pemerintahan yang bermuara pada kepuasan masyarakat serta profesionalitas aparatur.

MISI 5 Membangun sentra-sentra ekonomi baru diwilayah mimika

Misi ini bertujuan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Mimika. Misi ini nantinya meliputi pendapatan masyarakat, investasi yang masuk, pertumbuhan PDRB, peningkatan kesempatan kerja serta pertumbuhan sentra ekonomi itu sendiri.

1.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 ini sebagai berikut.

Misi 1

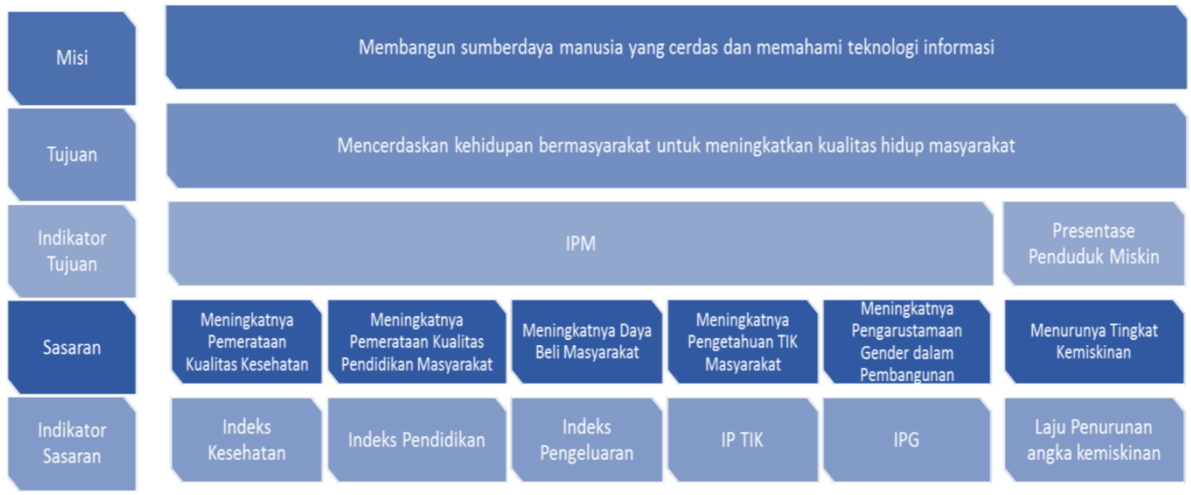

Misi 2

Misi 3

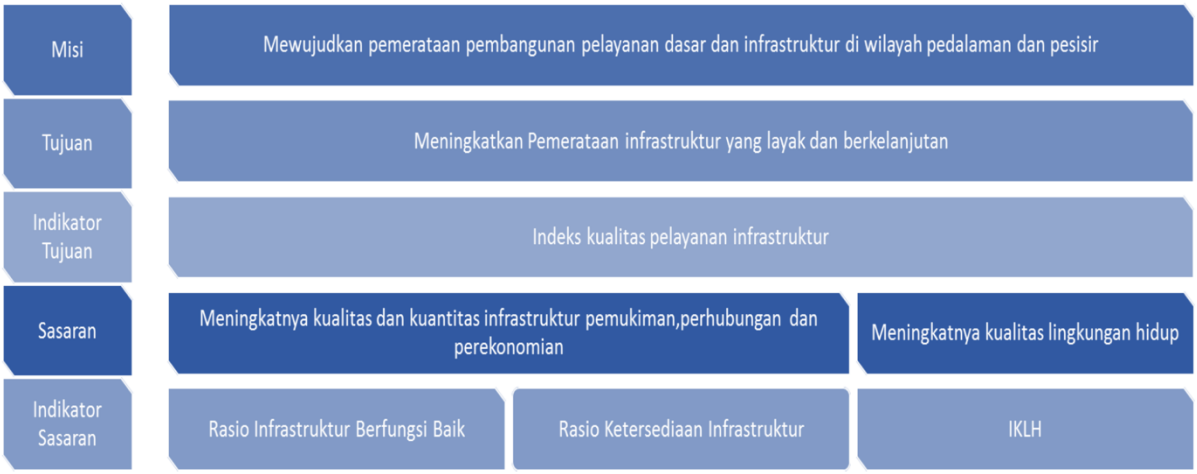

Misi 4

Misi 5

1.1.3 Pemetaan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi *Smart City*

Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dari Kabupaten Mimika sesuai tercantum pada RPJMD 2020-2024 dapat dipetakan terhadap dimensi dari *smart city*, seperti dijelaskan sebagai berikut:

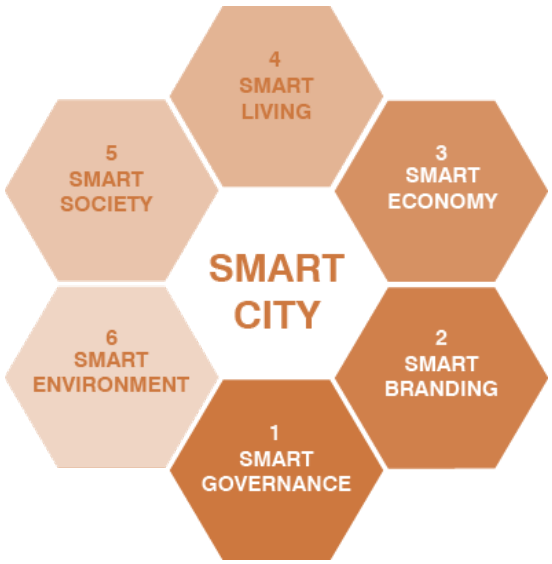

Gambar 1.2 Dimensi *Smart City*

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan Menuju Smart City, 2021

Tabel 1.1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mimika pada Dimensi Smart City

No	Misi, Tujuan & Sasaran Kabupaten Mimika	Dimensi *Smart City*
1	**Misi 1** Membangun Sumberdaya Manusia Yang Cerdas Dan Memahami Teknologi Informasi **Tujuan** Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat **Sasaran** • Meningkatnya pemerataan kualitas Kesehatan • Meningkatnya pemerataan kualitas Pendidikan masyarakat • Meningkatnya daya beli masyarakat • Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat • Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan • Menurunnya tingkat kemiskinan	***Smart Living, Smart Society***
2	**Misi 2** Menciptakan mimika yang aman, tertib dan damai **Tujuan** • Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	***Smart Society***

No	Misi, Tujuan & Sasaran Kabupaten Mimika	Dimensi *Smart City*
	• Mewujudkan masyarakat yang damai **Sasaran** • Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat • Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	
3	**Misi 3** Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir **Tujuan** Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan **Sasaran** • Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman, perhubungan, dan perekonomian • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	***Smart Living, Smart Environment***
4	**Misi 4** Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif **Tujuan** Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif **Sasaran** • Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi • Meningkatnya profesionalitas pegawai • Meningkatnya kepuasan masyarakat	***Smart Governance***
5	**Misi 5** Membangun sentra-sentra ekonomi baru diwilayah Mimika **Tujuan** Mendorong pertumbuhan ekonomi di Mimika **Sasaran** • Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat • Meningkatnya kesempatan kerja • Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN • Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan • Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir	***Smart Economy, Smart Living, Smart Branding***

Sumber: Hasil Analisa, 2023

1.1.4 Analisis Perilaku dan Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah

Smart city di Mimika selaras dengan visi dari Kabupaten Mimika yakni terwujudnya masyarakat Mimika yang cerdas, aman, damai, dan sejahtera, serta terintegrasinya sistem *e-Governance* menuju *Smart Regency* pada tahun 2021. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika pada langkah awal Mimika *Smart City* berfokus pada aspek *smart governance* dengan mengadakan website resmi Kabupaten Mimika yang berisikan informasi seputar Kabupaten Mimika, sehingga ditekankan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merencanakan dan mengimplementasikan inovasi digital terbaru sebagai bentuk pembaharuan menuju *e-governance*. Terdapat beberapa OPD di lingkungan Pemda Mimika yang telah melakukan terobosan baru sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dilansir dari antarpapuanews.com (2020) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memunculkan terobosan baru berupa aplikasi Operator Layanan Administrasi Online (Orlando), Layanan Lahir Langsung Punya Akta (Lala Pu Kaka), serta program lainnya.

Berbagai program yang telah dikembangkan dalam Mimika *Smart City* bertujuan memudahkan masyarakat untuk dilayani sekaligus membantu pemerintah dalam menjangkau serta memberikan pelayanan dengan mudah. Program dari Mimika *Smart City* khususnya terintegrasinya sistem *e-Governance* dapat mencapai keberhasilan bukan hanya dari upaya pemerintah saja namun juga partisipasi dari masyarakat, dikarenakan program ini diterapkan dan akhirnya akan digunakan oleh seluruh masyarakat Mimika sehingga Pemda membutuhkan cara yang tepat sehingga Mimika *Smart City* dengan program-program yang telah disusun dapat berhasil.

Smart city masih terdengar baru bagi masyarakat Mimika yang tersebar di 18 distrik baik dari pegunungan hingga pesisir, pandangan terhadap konsepnya yang masih luas dan tidak sama satu dengan yang lain menjadi bukti diperlukannya kesadaran bagi masyarakat untuk mengenal dan mendukung Mimika *Smart City* (Seputarpapua.com, 2017). Kesadaran masyarakat dapat meningkat dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, salah satunya

dengan mensosialisasikan Mimika *Smart City* sebagai informasi pembangunan dikarenakan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting (Radarbekasi.id, 2021).

Sosialisasi yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada OPD maupaun masyarakat Mimika telah berlangsung sejak tahun 2017. Di tahun 2018 Taman Baca Masyarakat (TBM) An Naafi Timika mengadakan seminar dan talkshow untuk mendeskripsikan lebih lanjut mengenai perkembangan *smart city* di Kabupaten Mimika yang diikuti oleh 300 peserta dari berbagai sekolah tingkat menengah atas yang berada di Mimika (Salma, 2018). Di tahun 2021 Pemda Mimika kembali melakukan sosialisasi melalui webinar yang digelar salah satu institut pendidikan di Mimika yaitu Politeknik Amamapare dengan tema "Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Mimika", dalam webinar ini Wabup Mimika memberikan materi terkait tema yang diangkat (Salampapua.com, 2021). Pada tahun yang sama, dilakukan pengesahan pada Generasi Digital Indonesia (Gradasi) yang bercabang di Mimika oleh Wabup 4 Mimika dengan harapan organisasi tersebut dapat membantu mensosialisasi masyarakat Mimika terkait digitalisasi sehingga program Mimika *Smart City* dapat berhasil dengan adanya partisipasi masyarakat (Yosef, 2021), serta masih terdapat sosialisasi lain yang dilakukan oleh Pemda Mimika mengenai Mimika *Smart City* kepada masyarakat Mimika.

Pemda Mimika telah melakukan sosialisasi untuk mengenalkan Mimika *Smart City* dari tahun ke tahun dengan target sasaran audiens yang beragam baik dari institut pendidikan hingga masyarakat luas terkait penggunaan teknologi digital, namun sosialisasi tersebut tidak tersampaikan secara merata kepada masyarakat sehingga terdapat beberapa masyarakat tidak mengetahui adanya program yang dikembangkan oleh Pemda Mimika sebagai bentuk perwujudan Mimika *Smart City*.

Mimika *Smart City* ini didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan sumberdaya manusia, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumberdaya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Adanya konsep *smart city* ini masyarkat Mimika mengharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini akan terpenuhi apabila kota tersebut sudah mampu untuk mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan menggunakan sistem terintegrasi serta memiliki infrastruktur dasar yang terpenuhi seperti air, listrik, sanitasi limbah, keamanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan, baik pemerintahan maupun masyarakat dan transportasi yang efisien sehingga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.

1.1.5 Analisis Daya Saing Daerah

1.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 PT. Freeport Indonesia mengalami masalah dalam produksi karena karyawan melakukan demo dan mogok kerja. Akibat demo ini Management PT. Freeport Indoensia melakukan PHK besar – besaran terhadap karawan berimbas pada konsumsi Rumah Tangga yang ada di kabupaten Mimika. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan utama masyarakat dikabupaten Mimika dari PT. Freeport Indonesia. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan pada tahun 2019 lebih tinggi dari 2019. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika meningkat.

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kabupaten Mimika maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

1.1.5.2 Fokus Infrastruktur dan Fasilitas Wilayah

A. Penataan Ruang

Pada tahun 2017, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kabupaten Mimika adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27%. Wilayah produktif di Kabupaten Mimika antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kabupaten Mimika adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Kabupaten Mimika adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kabupaten Mimika.

B. Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kabupaten Mimika selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah kendaraan pada tahun 2017 sebanyak 1.591 buah, bertambah sebanyak 3.043 buah pada tahun 2018. Hal ini sebanding dengan peningkatan panjang jalan Kabupaten Mimika dimana pada tahun 2017 panjang jalannya mencapai sejumlah 997.116 meter dan pada tahun 2018, panjang jalan meningkat hanya 1.142.595 meter pada tahun 2019. Peningkatan pelebaran dan panjang jalan ini, menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten Mimika agar tidak terjadinya kemacetan seperti di kota – kota besar yang ada di Indoensia.

Data jumlah kendaraan tahun 2019 segera didapatkan pada pertengahan tahun 2020 dikarenakan jumlah kendaraan (kepemilikan) dihitung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika (melalui perhitungan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Mimika)

C. Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Mimika sebesar 92,66 persen pada tahun 2017. Hingga pada tahun 2019 cakupan layanan air bersih di Kabupaten Mimika telah mencapai 96,51 persen. Selanjutnya akan terus dioptimalkan pelayanannya dalam mencapai target 100 persen sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional pada program 100-0-100.

D. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Kabupaten Mimika terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2019 sebanyak 5.380 titik dan dengan demikian sampai dengan tahun 2019 jumlah titik PJU sebanyak 90.077 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kabupaten Mimika secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Mimika semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kabupaten Mimika maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung

oleh Pemerintah Kota Kabupaten Mimika bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah PJU hemat energi sebanyak 9.993 titik dari 90.077 titik PJU yang terpasang. Pertumbuhan pemasangan PJU dari tahun 2015 sebesar 66,54%.

E. Fasilitas Listrik

Ketersediaan listrik bagi kehidupan warga masyarakat dan kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif bagi upaya pengembangan daya saing daerah. Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Mimika pada tahun 2015 mencapai 43.794 pelanggan tenaga listrik yang diproduksi PLN selama 2015 mencapai 135.979.627 KWh. Dari 14.461.058 Kw listrik yang diproduksi dan dialirkan oleh PLN di Tahun 2018, sebesar 13.601.751 Kw terjual pada pelanggan dengan penjualan terbesar pada kelompok pelanggan rumah tangga yakni sebesar 63,27 persen, sedangkan penjualan terkecil pada kelompok pelanggan kantor pemerintah yakni sebesar, 4,25 persen kondisi ini terjadi di Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana sedang Distrik Tembagapura Energi Listrik bersumber dari PLTU milik PT. FI yang berlokasi di pelabuhan Amamapare (Portsite). Untuk Distrik Jita, Jila, Agimuga, Mimika Timur Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh sama sekali belum terlayani PLN.

1.1.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor- faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pajak daerah di Kabupaten Mimika terdiri dari pajak daerah, retribusi, laba BUMD, Bagi Hasil Pajak/Bukan, DAU, DAK, Hibah, Dana Darurat, Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otsus. Selama tahun 2017, penerimaan pajak daerah sebesar Rp.

269,178,257,386. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup derastis yaitu sebesar Rp. 163,195,554,980.

Selain itu, masuknya investasi baik itu Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri. Stabilitas kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu daerah, adalah merupakan modal penting dalam menarik minat investasi.

Kabupaten Mimika memiliki tingkat keamanan yang kurang kondusif mulai tahun 2015-2018. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Mimika setiap tahunnya. Tercatat bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Mimika dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 telah terjadi sebanyak 1.084 kasus, kemudian menurun di tahun 2016 hingga 751 kasus, namun justru meningkat derastis pada tahun 2018 yang mencapai 1.133 kasus. Dari tahun ke tahun jumlah tindak pidana di Kabupaten Mimika didominasi oleh Distrik Mimika Baru yaitu hingga tahun 2018 tercatat telah terjadi sebanyak 791 kasus.

1.1.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana.

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban

yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2018 antara lain kelompok usia non produktif usia (15< th) sebesar 59.191 orang dan usia (>64 th) sebesar 1.966 orang sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64th) sebesar 149.381 orang. Sehingga rasio ketergantungan setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 39-40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

1.1.6 Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang Relevan dengan Kebutuhan Stakeholder yang Ada

Kelembagaan merupakan salah satu pilar penting dalam melakukan pembangunan *Smart City* khususnya di Kabupaten Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki 41 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Sekretariat Daerah, sejumlah badan dan dinas, serta 8 kecamatan.

Badan dan Dinas yang ada di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Badan Pendapatan Daerah
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan
8	Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia
9	Bagian Hukum
10	Bagian Humas dan Protokoler

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat
12	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
13	Bagian Organisasi
14	Bagian Tata Pemerintahan
15	Bagian Umum dan Perlengkapan
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Dinas Kesehatan
18	Dinas Ketahanan Pangan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Koperasi da Usaha Kecil Menengah
21	Dinas Lingkungan Hidup
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Dinas Pendidikan
28	Dinas Perhubungan
29	Dinas Perikanan
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
32	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
34	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
35	Dinas Sosial
36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
38	INSPEKTORAT
39	RSUD Kabupaten Mimika
40	Sekretariat Daerah
41	Sekretariat DPRD

Sumber: mimikakab.go.id

Struktur kelembagaan pada *smart city* Kabupaten Mimika dari selurub Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatas memiliki fungsi untuk melakukan *analisator, integrator, evaluator*, serta menyelaraskan IT *Governance* dengan bisnis proses. Kelembagaan *smart city* akan mengawal keberlanjutan program pembangunan yang telah diinisiasi pemerintah daerah.

Paradigma pemerintahan dapat menentukan arah pembangunan pilar *smart city* di Kabupaten Mimika. Paradigma pemerintahan yang berkembang saat ini menganut sistem terbuka seperti:

1. kelembagaan inklusif yaitu sikap terbuka dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang kuat,
2. *Collaborative Governance* yaitu adanya sebuah forum deliberatif, di mana para *stakeholder* yang terlibat dapat melakukan proses dialog hingga mencapai sebuah konsensus terkait permasalahan publik,
3. *Integrated governance* menggambarkan struktur hubungan formal dan informal, untuk mengelola urusan melalui pendekatan kolaboratif (join-up) antar instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,
4. *Open Governance* adalah inisiatif melaksanakan integrasi layanan, keterbukaan akses informasi ke publik, keterlibatan warga dalam kebijakan pemerintah.

1.2 Analisis Kondisi Eksternal

Berbagai tren atau perubahan seperti tren politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain dapat mempengaruhi kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau stakeholder lainnya.

1.2.1 Analisis Tren dan Perkembangan Politik

Dalam perjalanan Indonesia menuju era pasca-pandemi, gaung ekonomi digital Indonesia sangat keras terdengar. Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmen pemerintah RI terhadap industri digital. Presiden mendorong agar segala

hambatan yang muncul akibat pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan sebagai momentum dalam mempercepat transformasi digital, karena teknologi adalah kunci terpenting untuk Indonesia yang lebih efisien dan makin produktif.

Selama lebih dari satu dekade berinvestasi di Indonesia, kami telah menyaksikan ratusan entrepreneur bekerja keras untuk memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang mereka punya untuk mengubah gerak ekonomi Indonesia dengan teknologi. Setiap satu perusahaan rintisan baru yang mereka dirikan, setiap produk baru yang mereka perkenalkan, dan setiap talenta baru yang mereka rekrut adalah satu langkah lebih jauh menuju era keemasan ekonomi digital Indonesia.

Dampak positif dari perkembangan ekonomi digital terhadap perekonomian Indonesia tidak pernah terlihat sejelas satu tahun belakangan. Teknologi dan perubahan yang dibangun oleh para startup satu dekade terakhir telah membuat masyarakat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan keterbatasan yang muncul tiba- tiba akibat pandemi Covid-19.

Misalnya, penduduk Indonesia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari rumah mulai dari membeli bahan pokok, memesan makan dari restoran, hingga mengakses informasi. Ini bisa terjadi karena Indonesia telah punya infrastruktur *e-commerce* yang andal, mulai dari *platform e-commerce* yang mudah digunakan, sistem pembayaran online yang lengkap, akses internet cepat, hingga jangkauan layanan logistik yang luas. Semua itu, tentunya, adalah hasil kerja gotong royong dan jatuh bangun para startup, korporasi, dan pemerintah dalam mendorong perekonomian digital.

Hal ini menjadi dukungan terhadap pengembangan smart city di kota-kota di Indonesia, terutama di Kabupaten Mimika. Menurutnya Presiden Joko Widodo, desain *Smart City* ini membutuhkan perencanaan yang matang, bukan hanya sekedar digitalisasi fasilitas atau pelayanan publik. "Dasar dari *Smart City* adalah desain yang memberikan kenyamanan sempurna untuk warganya, kemudian dibantu oleh perangkat digital untuk meningkatkan kenyamanan warganya," tuturnya.

1.2.2 Analisis Tren dan Perkembangan Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami perbaikan di tahun 2021 yang ditunjukkan dengan perbaikan beberapa indikator ekonomi. Setelah mengalami kontraksi selama empat triwulan berturut-turut sejak triwulan-II tahun 2020, kini di periode yang sama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil meningkat di angka 7,7 persen. Dilihat dari sumber pengeluarannya, komponen terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ialah konsumsi rumah tangga, dimana pertumbuhannya kembali positif diangka 5,93 persen di triwulan-II tahun 2021 ini. Sementara itu, sektor industri manufaktur yang berkontribusi sebesar 19,3 persen terhadap PDB Indonesia, kini turut mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu 6,58 persen di triwulan-II tahun 2021 (Gambar 1). Kondisi ini sejalan dengan kinerja sektor industri pengolahan triwulan-II 2021 meningkat dan berada pada fase ekspansi.

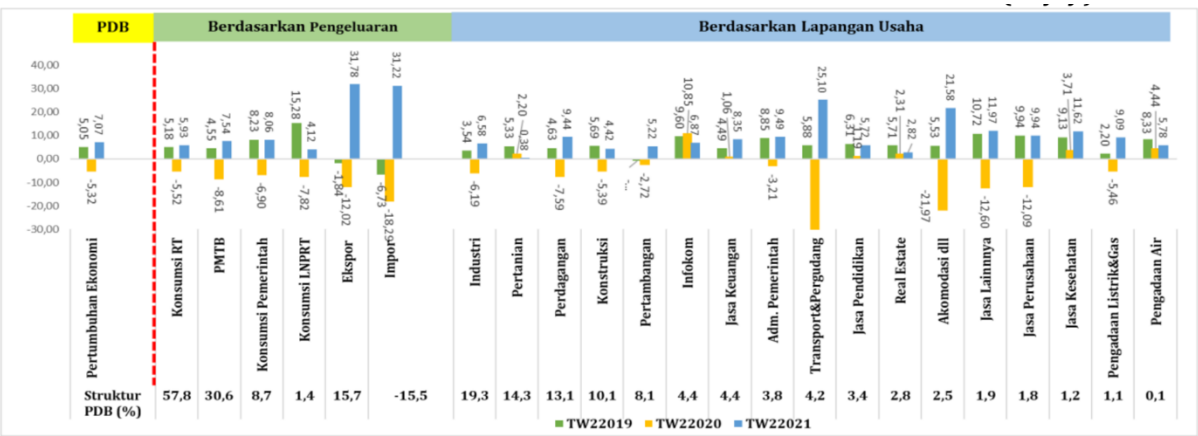

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Per Triwulan-II Tahun 2019, 2020, dan 2021 (%, yoy)

Sumber: BPS, 2021

Meskipun menunjukkan perbaikan di triwulan-II tahun 2021, namun dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 varian delta yang sangat signifikan, maka pemerintah kembali menerapkan pembatasan mobilitas yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sejak tanggal 3 Juli 2021. Penerapan pembatasan ini sejak memasuki triwulan-III/2021 akan menyebabkan penurunan pertumbuhan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga akibat terbatasnya mobilitas. Di sisi lain, permintaan dan daya beli yang masih lemah akibat masih

berlangsungnya pandemi dan pembatasan mobilitas dicerminkan dari perkembangan kinerja inflasi bulanan selama tahun 2021. Secara umum, meskipun terus berfluktuasi selama tahun 2021, akan tetapi tingkat inflasi bulanan masih berada di bawah 2 persen, dimana inflasi bulanan Indonesia prapandemi berada pada trajectory dan kisaran 2,5-3,5 persen (tahun 2019). Untuk bulan Juli 2021 sendiri, tingkat inflasi yoy adalah sebesar 1,52 persen (year on year/yoy) dan sebesar 0,08 persen (month to month/mtm).

PON XX Papua

Hasil menemukan masyarakat Papua mempersepsikan bahwa penyelenggaraan PON di Papua memberikan dampak secara ekonomi, salah satunya di Kabupaten Mimika. Dimana sebagian besar masyarakat memberi respon setuju dan sangat setuju bahwa PON memberi peluang pekerjaan baru, kemunculan industri baru dan pebisnis/pengusaha, serta kemudahan mendapat pekerjaan. Hasil ini sejalan dengan penelitianpenelitian sebelumnya yang menemukan bahwa PON atau mega event olahraga domestik dan internasional memberikan lebih banyak dampak bagi masyarakat. Mega event olahraga lebih banyak memberi dampak positif dari pada negatif terhadap ekonomi, selain berdampak positif juga terhadap sektor pariwisata, sosial, lingkungan dan infrastruktur (Thomson et al., 2013; Alalawneh et al., 2021). Dampak ekonomi yang dirasakan berasal dari peningkatan sektor pariwisata (Osada et al., 2016) dan investasi konstruksi fasilitas pendukung seperti venue, fasilitas penunjang bisnis (seperti perhotelan, kuliner, dan souvenir), dan jalan raya (Osada et al., 2016; Erman & Safitri, 2014). Secara khusus, penyelenggaraan PON XX Papua juga menjadi trigger bangkitnya industri kreatif khususnya Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dan sektor pariwisata Papua. Momentum ini dimanfaatkan UMKM sebagai pasar untuk menawarkan produk souvenir khas Papua sehingga memperoleh income pada masa pandemi COVID-19 (Eskak, 2021).

Meskipun demikian, terdapat responden yang memberi persepsi negatif dengan menjawab tidak tahu dan tidak setuju bahwa adanya kemudahan mendapatkan pekerjaan dan memperoleh pekerjaan baru. Salah satu alasan adalah perekrutan SDM yang tidak merata akibat keterbatas akses informasi, monopoli perekrutan

berdasarkan kenalan dan kualifikasi pendidikan atau keahlian bidang yang dibutuhkan. Di samping itu, sebagian kecil masyarakat juga menyatakan tidak setuju dan tidak tahu bahwa adanya pertambahan industri dan pebisnis/pengusaha oleh karena adanya PON. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan keterbatasan akses informasi berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan PON. Dengan demikian, tampak jelas bahwa dari sisi ekonomi sebagian besar masyarakat memiliki persepsi positif dibandingkan negatif mengenai dampak PON XX Papua.

1.2.3 Analisis Tren dan Perkembangan Sosial Budaya

Literasi digital merupakan kemampuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan dari seumber daya teknologi informasi. Konsep literasi digital lahir dari proses yang panjang. Pada masa awal, konsep ini dikenal dengan litersai media yang mengadvokasi pentingnya sikap kritis terhadap televisi. Lalu pada saat teknologi komunikasi dan internet mulai berkembang perlahan tapi pasti konsep ini bertransformasi menjadi literasi informasi atau digital.

Pada masa pandemi COVID-19 ini kompetensi literasi digital sangat dibutuhkan, karena semenjak pandemi seluruh kalangan masyarakat seperti dituntut untuk dapat menggunakan teknologi. Dengan adanya tuntutan tersebut dikhawatirkan nantinya timbul dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut, seperti pelanggaran hak cipta, penipuan digital, penyebaran informasi hoaks, dll. Selain itu, dampak negatif penggunaan teknologi informasi ini juga akan berdampak bagi para pelajar di seluruh Indonesia yang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh.

Berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Katadata Insight Center (KIC) pada 2021, indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,49.Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori sedang, dengan skor indeks 0 sampai 5. Mengacu laporan dari McKinsey pada 2019, diperkirakan pada 2030 akan ada sekitar 23 juta pekerjaan yang tergeser oleh otomatisasi.

Beberapa sarjana menegaskan bahwa literasi digital ini berkaitan dengan kemampuan kognitif. Selain untuk belajar, kemungkinan besar para pelajar akan lebih cenderung menggunakan teknologi untuk bermain media sosial, games, dan mendengarkan musik. Minimnya literasi digital ini dapat menyebabkan rendahnya pengendalian diri yang berujung penyimpangan di dunia maya. Hal ini nantinya dapat mengakibatkan terjadinya cyber bullying, yang menurut Suryanti, dkk. merupakan salah satu akibat dari penyalahgunaan teknologi.

Dengan demikian, alangkah baiknya bila literasi digital diimplementasikan dalam proses pendidikan. Sebuah penelitian menemukan bahwa literasi digital ini akan menumbuhkan sikap kritis dan kreatif dalam menghadapi wabah COVID-19. Dengan adanya literasi digital, maka masyarakat akan paham bagaimana cara memilah dan memperoleh informasi yang benar. Ada beberapa komponen penting dalam mengembangkan literasi digital, yakni:

1. Budaya, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna digital.
2. Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai sebuah konten.
3. Konstruktif.
4. Komunikasi, yaitu memahami cara komunikasi serta jejaring dunia digital.
5. Kepercayaan diri yang bertanggung jawab.
6. Kreatif, melakukan hal-hal baru dengan cara yang baru.
7. Kritis dalam menyikapi konten.
8. Bertanggung jawab secara sosial.

1.2.4 Analisis Tren dan Perkembangan Teknologi

Teknologi tercipta untuk semakin memudahkan hidup manusia. Oleh karenanya, teknologi akan terus berevolusi mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Kita saksikan bersama, tiap tahun kemunculan teknologi terbaru terus mewarnai kehidupan manusia. Banyak aspek yang tersentuh teknologi mulai dari medis, komunikasi, pendidikan hingga ekonomi. Meski tahun 2022 ruang gerak manusia

tetap akan terbatasi pandemi Covid-19, teknologi terbaru tetap hadir. Berikut beberapa teknologi yang hadir di tahun 2021:

Otomatisasi Proses Robotik (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) adalah teknologi terbaru berupa perangkat lunak yang bekerja secara otomatis yang digunakan untuk menafsirkan aplikasi, memproses transaksi, menangani data, dan bahkan membalas email. RPA mampu memudahkan beragam pekerjaan dan menganalisanya dengan cepat dan akurat.

Hybrid Cloud

Teknologi terbaru ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital. Teknologi ini merupakan kombinasi dari public dan private cloud. Umumnya, perusahaan menyimpan data yang sensitif menggunakan private cloud. Sementara, layanan lain disimpan di public cloud. Nah, hybrid cloud banyak digunakan oleh berbagai perusahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan pada bisnis mereka.

Edge Computing

Edge computing (EC) adalah teknologi terbaru berbentuk paradigma komputasi terdistribusi, yang mendekatkan komputasi dan penyimpanan data ke sumber data. Hal ini dapat meningkatkan waktu respon dan menghemat bandwidth. Perusahaan seperti AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform terkenal memiliki layanan EC yang baik.

Quantum Computing

Quantum computing merupakan bentuk komputasi yang memanfaatkan fenomena kuantum seperti superposisi dan keterikatan kuantum. Teknologi terbaru ini juga terlibat dalam mencegah penyebaran Covid-19, dan untuk mengembangkan vaksin potensial. Ini dapat tercapai berkat kemampuannya untuk menanyakan, memantau, menganalisis, dan menindaklanjuti data dengan mudah. Quantum computing juga banyak digunakan oleh perbankan dan industri keuangan non-bank untuk mengelola risiko kredit, perdagangan frekuensi tinggi dan untuk mendeteksi penipuan.

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT) merupakan konsep di mana objek yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, micro-electromechanical systems (MEMS) dan Internet. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi machine-to-machine (M2M) di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas.

1.2.5 Analisis Tren dan Perkembangan Lingkungan

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Hutan di Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, yakni berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif. Aktifitas industri ekstraktif yang mengeksploitasi alam ini bukan hanya berdampak pada menyusutnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon dioksida, namun sekaligus ikut memperparah laju pemanasan global dan mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat adat.

Dari riset yang telah dilakukan oleh WALHI didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam ijin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29.75%. Data IPBES 2021 juga menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan seluas 680 ribu hektar, yang mana merupakan terbesar di region asia tenggara. Sedangkan data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK tercatat bahwa, dari 105 sungai yang ada, 101 sungai diantaranya dalam kondisi tercemar sedang hingga berat.

Bukan hanya itu, penelusuran WALHI pada tahun 2013 hingga 2021 didapatkan data yang cukup mencengangkan, dimana penguasaan lahan sawit di Indonesia ternyata selama ini hanya dikendalikan oleh 25 orang taipan. Total luasan hutan yang dikuasai oleh konglomerat sawit ini sebesar 12.3 juta hektar. Dari total luas hutan yang sudah

mendapat lampu hijau dan mengantongi ijin tersebut, 5.8 juta hektar diantaranya sekarang ini sudah menjadi perkebunan sawit.

Padahal di Indonesia terdapat 50-70 juta masyarakat adat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Ketika hutan dirusak dan dikuasai oleh korporasi, selain akan memperparah laju pemanasan global, kasus konflik di daerah juga bakal semakin meningkat. Pemerintah seharusnya lebih menghargai hak-hak masyarakat adat, dan melindungi dari kriminalisasi korporasi, bukan malah memberikan karpet merah pada kapitalisme.

Laporan dari Auriga Nusantara juga tidak kalah mengkhawatirkan. Selama pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam 20 tahun terakhir ini terjadi deforestasi di Papua seluas 663.443 hektar. Dimana 71 persen diantaranya terjadi sepanjang tahun 2011 sampai 2021. Penyumbang deforestasi terbesar yakni ditujukan untuk pembukaan perkebunan sawit seluas 339.247 hektar. Namun dari hasil penelusuran ternyata hanya 194 ribu hektar saja yang sudah ditanami sawit, selebihnya dalam kondisi rusak.

Dampak pengalih fungsian hutan menjadi wilayah industri ekstraktif, baik itu perkebunan, properti, pertanian, kehutanan, tambang, infrastruktur dan kelautan, ternyata juga syarat akan beragam masalah. Dari laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2018 saja terjadi 410 konflik agraria dengan luas wilayah konflik 807.177 hektar, dengan melibatkan 87.568 KK.

Dengan kerusakan hutan yang seluas itu, tidak mengherankan jika kemudian sepanjang tahun 2020, BNPB mencatat terdapat 2.925 kejadian bencana alam di Indonesia, mulai dari banjir, putting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang panas.

Praktik ekosida penghancurann lingkungan yang mengabaikan tata ruang dan lingkungan hidup ini menjadi fakta bahwa praktik buruk segelintir korporasi yang menguasai jutaan hektar lahan terbukti memperparah intensitas bencana di

Indonesia. Jumlah korban jiwa pun juga naik hampir tiga kali lipat, yakni pada periode 2017 hingga 2018 terjadi peningkatan jumlah korban bencana, dari yang sebelumnya sebanyak 3.49 juta orang menjadi 9.88 juta orang.

1.2.6 Analisis Tren dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan

Berikut peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan mendukung pengembangan *Smart City* di Indonesia:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
- Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Presidon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Nota Kesepakatan Antara Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 48 Kepala Daerah Tahun 2021 Tentang Implementasi Program Kota Cerdas (*Smart City*) Kota/ Kabupaten Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu kota Negara Baru

Standar Nasional Indonesia

Di samping peraturan perundang-undangan, terdapat Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan *Smart City* yang merupakan adopsi dari standar International Standard Organization (ISO), yaitu:

- SNI ISO 37120:2018 tentang pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan – Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup
- SNI ISO 37122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas.

Hubungan antara berbagai standar ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.4 Hubungan antara standar ISO 37120 dan 37122

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan Menuju Smart City, 2021

BAB 2
Analisis Kesiapan Daerah

Aspek penting yang perlu dicapai untuk merealisasikan sebuah *smart city* adalah desain kota modern, efisien dan efektif yang tercipta karena sokongan teknologi. Dalam perencanaan sebuah *smart city* terdapat beberapa parameter seperti program kerja, indikator keberhasilan, aturan, dan anggaran yang perlu dipertimbangkan. Perencanaan sebuah kota disusun bersama oleh pemerintah kota baik eksekutif dan legislatif, yang disahkan secara bersama untuk setahun ke depan. Selain itu, juga terdapat Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang. Dilihat dari aspek-aspek tersebut, untuk pendanaan, pemerintah Kabupaten Mimika telah menyiapkan dana khusus untuk pengembangan *smart city*, sedangkan untuk indikator keberhasilannya ialah semua informasi yang ada dapat dikendalikan dan dimonitoring melalui suatu pusat kendali. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai kota cerdas, maka perlu dilakukan analisis mengenai sejauh mana kesiapan daerah yang dalam hal ini meliputi tiga parameter utama, yakni *mediator*, *driver*, dan *enabler*. Pada parameter mediator terdiri dari *culture*, parameter driver yang terdiri dari *structure*, *infrastructure*, dan *suprastcuture*, serta parameter enabler yang terdiri dari *nature*.

Parameter mediator mempunyai peran penting dalam mengarahkan pembangunan *smart city*. Selain itu, mediator mempunyai aspek *tradition*, *innovation*, dan *interaction*. Parameter driver, merujuk pada aspek *structure*, *infrastructure*, dan *superstructure* yang dapat menopang parameter *enabler*. Parameter *enabler* merujuk pada pondasi utama kesiapan daerah, yaitu pada potensi alamnya. Gambar dibawah mengilustrasikan tiga parameter kesiapan *smart city*.

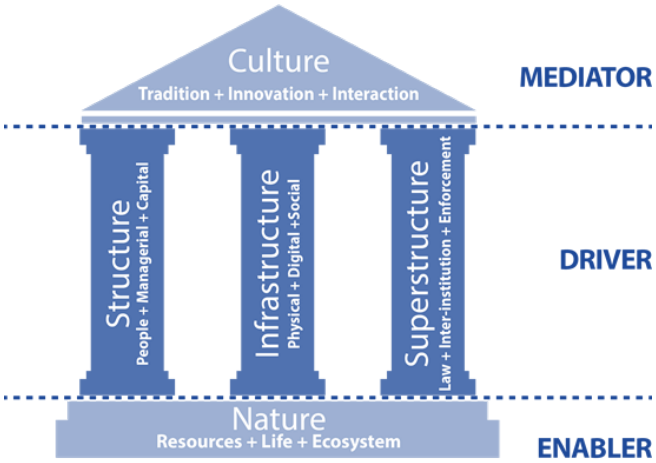

Gambar 2.1 Pilar Smart City Daerah

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan Menuju Smart City, 2021

2.1 Nature

Analisis *Nature* Daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan alam di wilayah dan di sekitar wilayah di mana *Smart City* akan dikembangkan. Secara umum, pengukuran pada komponen *nature* ini melihat potensi dan tantangan apa saja yang terdapat di wilayah tersebut bagi pengembangan *Smart City* dari aspek lingkungan hidup.

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi DOB (Daerah Otonom Baru) Papua Tengah. Secara geografis Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31’ - 138°31’ Bujur Timur dan 4°60’ - 5°18’ Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut :

- ➢ Sebelah utara : Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Puncak
- ➢ Sebelah selatan : Laut Araufa
- ➢ Sebelah timur : Kabupaten Nduga dan Asmat
- ➢ Sebelah barat : Provinsi Papua Barat

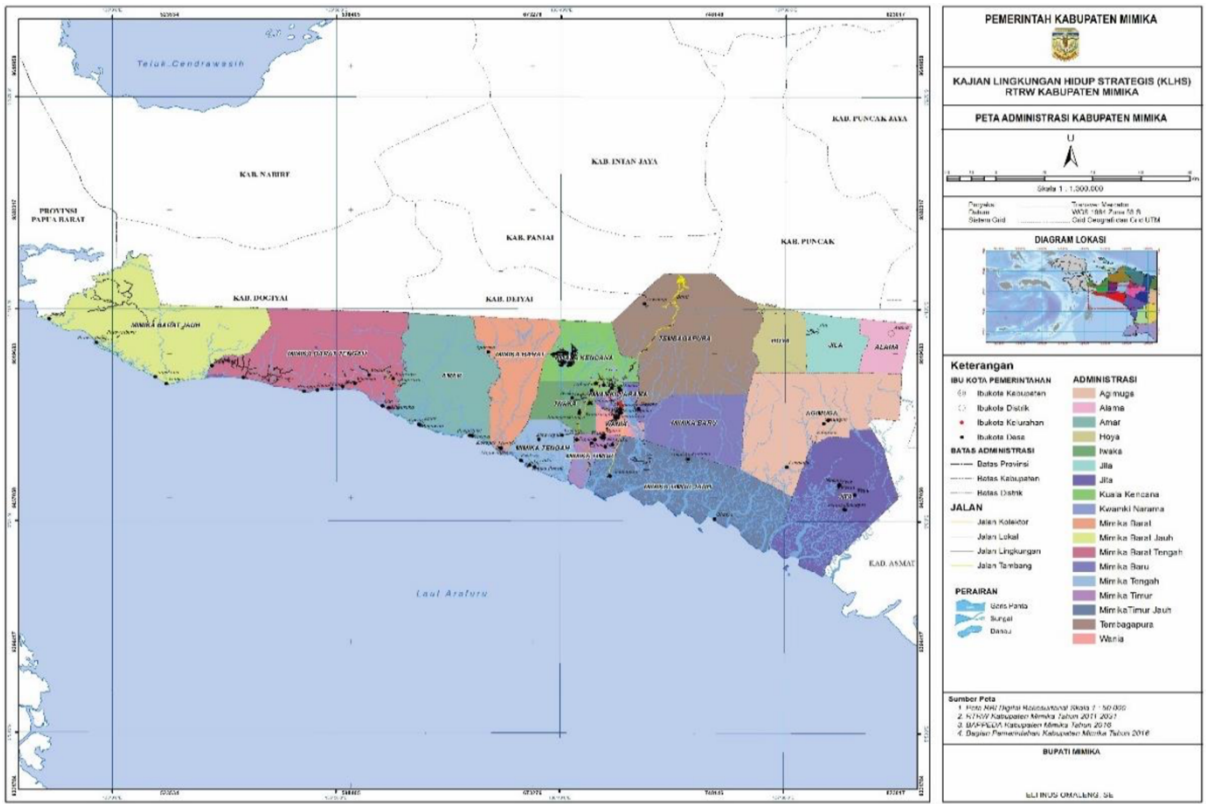

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31'138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km2 atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik. Distrik-distrik tersebut yaitu Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Hoya dan Tembagapura.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distri Tahun 2022

No	Distrik	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1	Agimuga	2.198,56	10,00
2	Amar	1.801,50	8,19
3	Ala ma	365,92	1,66
4	Hoya	563,78	2,56

No	Distrik	Luas (Km^2)	Persentase (%)
5	Iwaka	492,73	2,24
6	Jila	622,83	2,83
7	Jita	1.962,33	8,92
8	Kuala Kencana	860,74	3,91
9	Kwamki Narama	12,86	0,06
10	Mimika Barat	1.187,85	5,40
11	Mimika Barat Jauh	2.485,89	11,30
12	Mimika Barat Tengah	2.292,46	10,42
13	Mimika Baru	1.509,48	6,86
14	Mimika Tenqah	526,67	2,39
15	Mimika Timur	290,48	1,32
16	Mimika Timur Jauh	2.035,36	9,25
17	Tembagapura	2.586,86	11,76
18	Wania	197,32	0,90
Kabupaten Mimika		**21.693,51**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa Distrik Kwamki Narama merupakan Distrik dengan luas wilayah terkecil, yaitu 12,89 Km2 atau 0,06% dari total wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Tembagapura dengan luas wilayah 2.586,86 Km2 atau 11,76% dari total wilayah Kabupaten Mimika, jauh lebih luas dari Distrik Kwamki Narama.

2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga Distrik tersebut merupakan Distrik-distrik yg memiliki topografi dataran rendah yaitu: Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah,

Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, dan Jita merupakan sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

Tabel 2.2 Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2022

No	Distrik	Ibu Kota Distrik	Tinggi (mdpl)
1	Agimuga	Kiliarma	500
2	Amar	Amar	4
3	Ala ma	Alama	2800
4	Hoya	Hoya	2800
5	Iwaka	Iwaka	40
6	Jila	Jila	2800
7	Jita	Sempan Timur	400
8	Kuala Kencana	Kuala Kencana	13
9	Kwamki Narama	Kwamki Narama	40
10	Mimika Barat	Kokonao	4
11	Mimika Barat Jauh	Jauh Potowayburu	2
12	Mimika Barat Tengah	Tengah Kapiraya	2
13	Mimika Baru	Timika	40
14	Mimika Tenqah	Arua	5
15	Mimika Timur	Jauh Potowayburu	10
16	Mimika Timur Jauh	Jauh Ayuka	5
17	Tembagapura	Tembagapura	1900
18	Wania	Kamoro Jaya	30

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

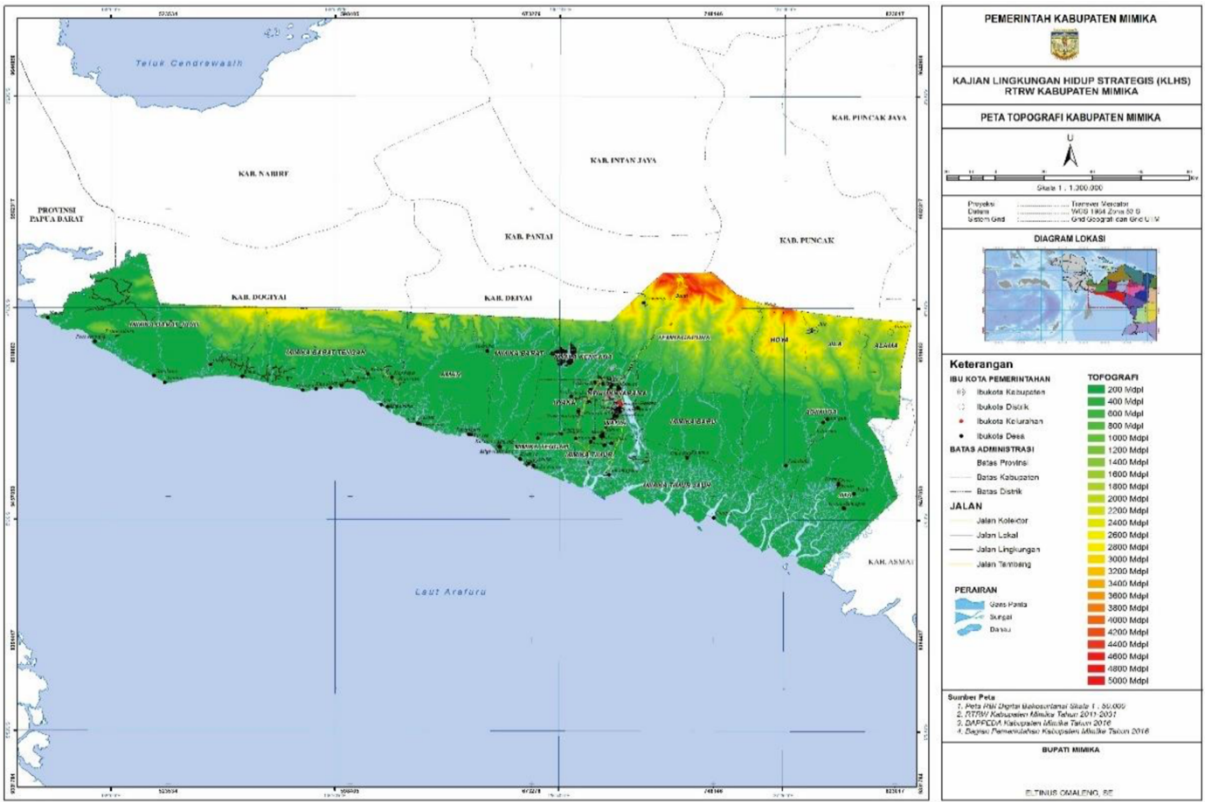

Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Secara topografis Kabupaten Mimika mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 5.000 m di atas permukaan laut (mdpl). Bahkan dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Mimika terdapat wilayah dengan kategori bukit terjal. Topografi dataran rendah dan pantai terdapat di beberapa distrik di Kabupaten Mimika dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Kemiringan lereng Kabupaten Mimika dominan adalah 0 - 2 % dengan luas 13.799,410 km2 atau 63,61 % dari luas wilayah dan selebihnya dengan kemiringan 2 % hingga diatas 40 % merupakan topografi bergunung.

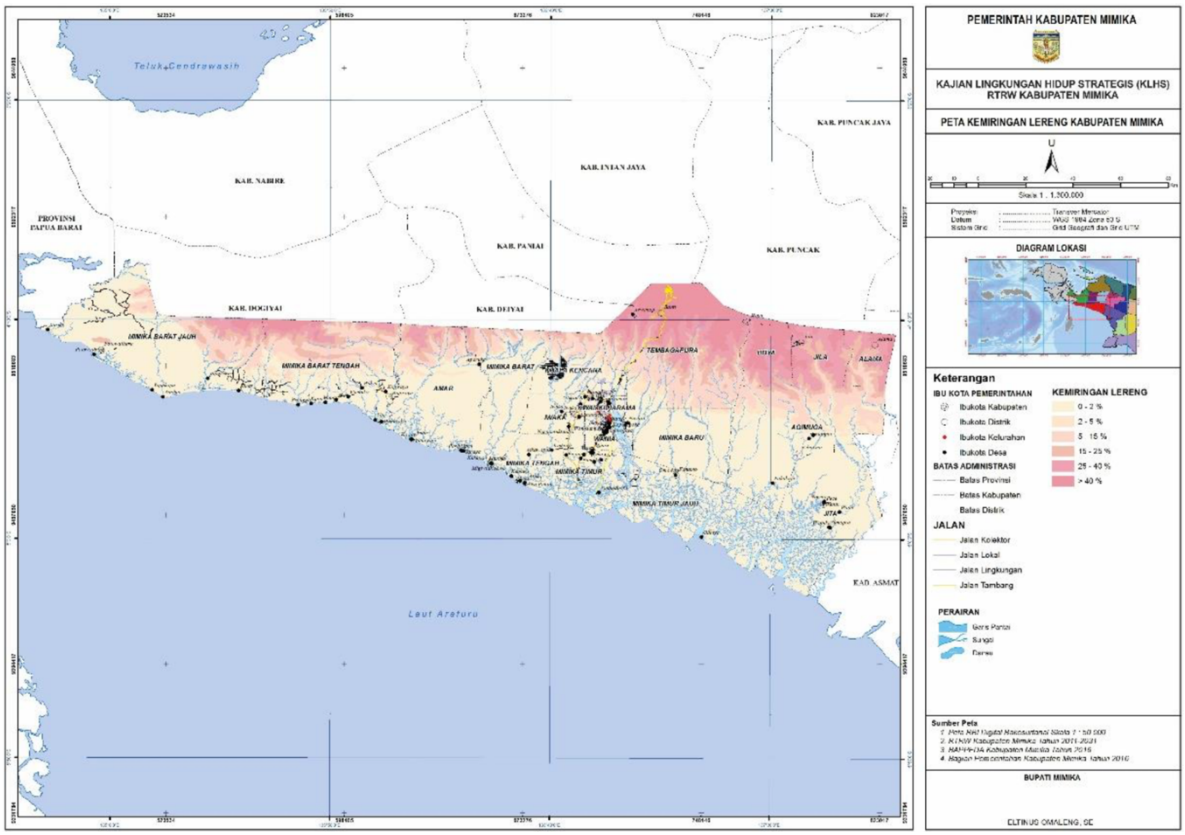

Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.3 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Mimika terdapat beberapa jenis batuan. Setidaknya ada 25 jenis batuan yang tersebar di Kabupaten Mimika, namun yang dominan adalah jenis batuan alluvium. Batuan ini tersebar banyak karena melihat keadaan geografis Kabupaten Mimika yang memiliki banyak aliran sungai. Batuan aluvium ini merupakan batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh sungai- sungai. Batuan ini dapat kita lihat di tepi-tepi sungai di muara sungai, misalnya pasir dan tanah di tepi sungai.

Tabel 2.3 Kondisi Geologi Kabupaten Mimika

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Alluvium Terbiku	10,680.75	0.49%
2	Alluvium Terbiku	969,920.85	44.71%

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
3	Batuan Malihan Derewo	57,475.11	2.65%
4	Batugamping Yawee	90,205.23	4.16%
5	Batulumpur Piniya	7,926.44	0.37%
6	Batupasir Emkai	23,398.27	1.08%
7	Batupasir Woniwogi	1,442.20	0.07%
8	Dolomit Modic	35,306.11	1.63%
9	Endapan Aliran Rombakan	2,912.05	0.13%
10	Endapan Aluvium Dan Literal	635.35.00	0.03%
11	Endapan Danau	268,358.19	12.37%
12	Endapan Glasial	2,390.05	0.11%
13	Fanglomerad	2,563.04	0.12%
14	Formasi Otomona	33,712.56	1.55%
15	Formasi Tuaba	62,450.02	2.88%
16	Formasi Aiduna	125,605.36	5.79%
17	Formasi Buru	211,499.75	9.75%
18	Formasi Kopai	4,929.48	0.23%
19	Formasi Tipuma	68,819.30	3.17%
20	Formasi Waripi	14,521.20	0.67%
21	Hancuran Tanah Longsor	5,714.64	0.26%
22	Intrusi Ilaga	2,341.86	0.11%
23	Kelompok Besar Batugamping New Guinea, Tidak Terpisahkan	12, 113.10	0.56%
24	Kelompok Kembelangan	19,739.28	0.91%
25	Kelompok Paniai	34, 140.58	1.57%
26	Kipas Aluvi um	99,391.14	4.58%
Kabupaten Mimika		**2.169.350,92**	**100%**

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

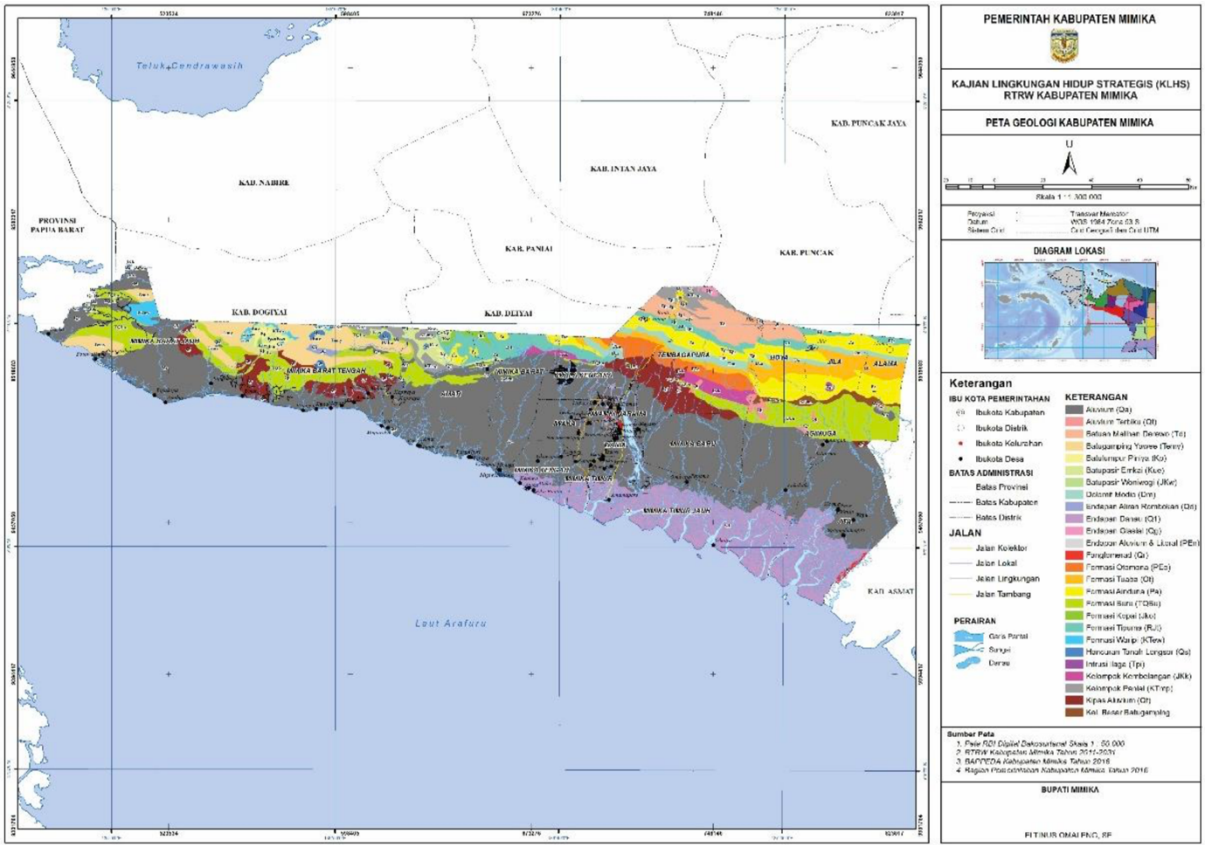

Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Jenis tanah di Kabupaten Mimika umumnya merupakan hasil lapukan batuan dasar sebagai residual soil dan transported soil. Tanah di wilayah ini juga dapat dikelompokkan menjadi tanah Alluvial, dengan tekstur halus hingga kasar dan tanah gambut. Jenis tanah Alluvial tersusun dari Podsolik merah kuning dengan sebaran yang hampir merata di seluruh wilayah kabupaten. Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Litosol dan Tanah Glei dengan luasan masing-masing sekitar 41,7% dan 43,2% dari luas total wilayah. Luasan masing-masing jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Mimika disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Jenis Tanah Kabupaten Mimika

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Litosol	904.731	41,7

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
2	Mediteran	77.059	3,6
3	Podolsik	55.081	2,5
4	Renzina	194.979	9,0
5	Tanah Glei	935.602	43,2
Kabupaten Mimika		**2.167.451**	**100,0**

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.4 Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Mimika terdapat ribuan sungai membentang dari potowaiburu - Jita. Terdapat sungai-sungai besar dan kecil, seperti: Sungai Omba, Sungai Aykwa, Sungai Minajerwi, Sungai Otakwa, Sungai Sipu-Sipu, Sungai Pika/Wania, Sungai Mioko, Sungai Iwaka, Sungai Kamora, Sungai Kapiraya, Sungai

Umar, Sungai Omba dan ribuan anak sungai yang tersebar yang bermuara ke laut Arafura. Lebar sungai di bagian hilir berkisar antara 100 - 150 m dengan kedalaman pada musim kemarau anatar 3 - 6 m atau 5 - 8 m pada musim hujan. Di wilayah Kabupaten Mimika terdapat 13 (tiga belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Omba, Aindua, Taparomae - Awaruka, Tuuga, Ukemupuke, Mimika, Kamoro, Wania, Ajkwa, Minajerwi, Mawati, Otakwa, Akimuga dan Cemara dengan total luas keseluruhan 2.167.563 Ha.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Mimika selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi air tanah dapat dimanfaatkan sebagai air baku untuk berbagai kepentingan kegiatan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk menunjang kegiatan ekonomi mayarakat. Potensi air tanah yang terdapat di Kabupaten Mimika ditunjang oleh keberadaan aliran sungai. Selain itu potensi air di Kabupaten Mimika juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan sumber air bersih.

Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)	Fungsi/Manfaat	Daerah yang Dilalui
1	Aikimiugah	193.604	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya,Jila,Jita dan Mimika Timur Jauh
2	Anindua	41.793	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
3	Bunga	69.057	Perikanan	Distrik Agimuga,Alama,Jila dan Jita
4	Cemara	257.432	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya,Jila dan Jita
5	lape	38.839	Perikanan	Distrik Mimika Barat Tengah
6	Jera	53.048	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)	Fungsi/Manfaat	Daerah yang Dilalui
7	Kamura	189.911	Perikanan	Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur,Wania dan Tembagapura
8	Maakwe	115.735	Perikanan	Distrik Amar dan Mimika Barat
9	Mimika	176.594	Perikanan	Distrik Amar, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Barat dan Mimika Tengah
10	Mukumuga	252.814	Perikanan	Distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Tembagapura dan Wania
11	Murpurka	119.769	Perikanan	Distrik Amar dan Mimika Barat Tengah
12	Omba	64.299	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
13	Otokwa	306.756	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, dan Tembagapura
14	Peter	3.504	Perikanan	Distrik Alama
15	Potewal	47.640	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
16	Umari	98.929	Perikanan	Distri Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
17	Umuk/Wamuka	43.316	Perikanan	Distrik Mimika Barat Tengah
18	Wamaro	90.244	Perikanan	Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh dan Tembagapura
19	Warenai	4.278	Perikanan	Distrik Tembagapura

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Interaksi antara air tawar dan air laut, sedimen dan nutrien yang terbawa oleh air ini adalah salah satu faktor yang menentukan distribusi dan komposisi hutan mangrove dan hutan rawa. Spesies hutan mangrove dan hutan rawa pada umumnya memiliki toleransi terhadap salinitas yang terbatas dan tidak tahan lama terhadap genangan air. Beberapa spesies mangrove dapat tahan pada salinitas yang tinggi dan tahan genangan air selama 40% dari waktunya.

Faktor yang paling penting dalam mengelola hutan mangrove dan hutan rawa Mimika adalah menjaga pola hidrologi yang sudah ada. Infrastruktur, pertanian yang intensif dan bentuk pembangunan lainnya seringkali mengubah hidrologi, baik dengan menghambat drainase seperti membangun jalan, tembok pantai dan infrastruktur lainnya yang mengurangi porositas maupun meningkatkan arus aliran air sehingga menyebabkan banjir dan terbawa sedimen endapan dan partikel kecil.

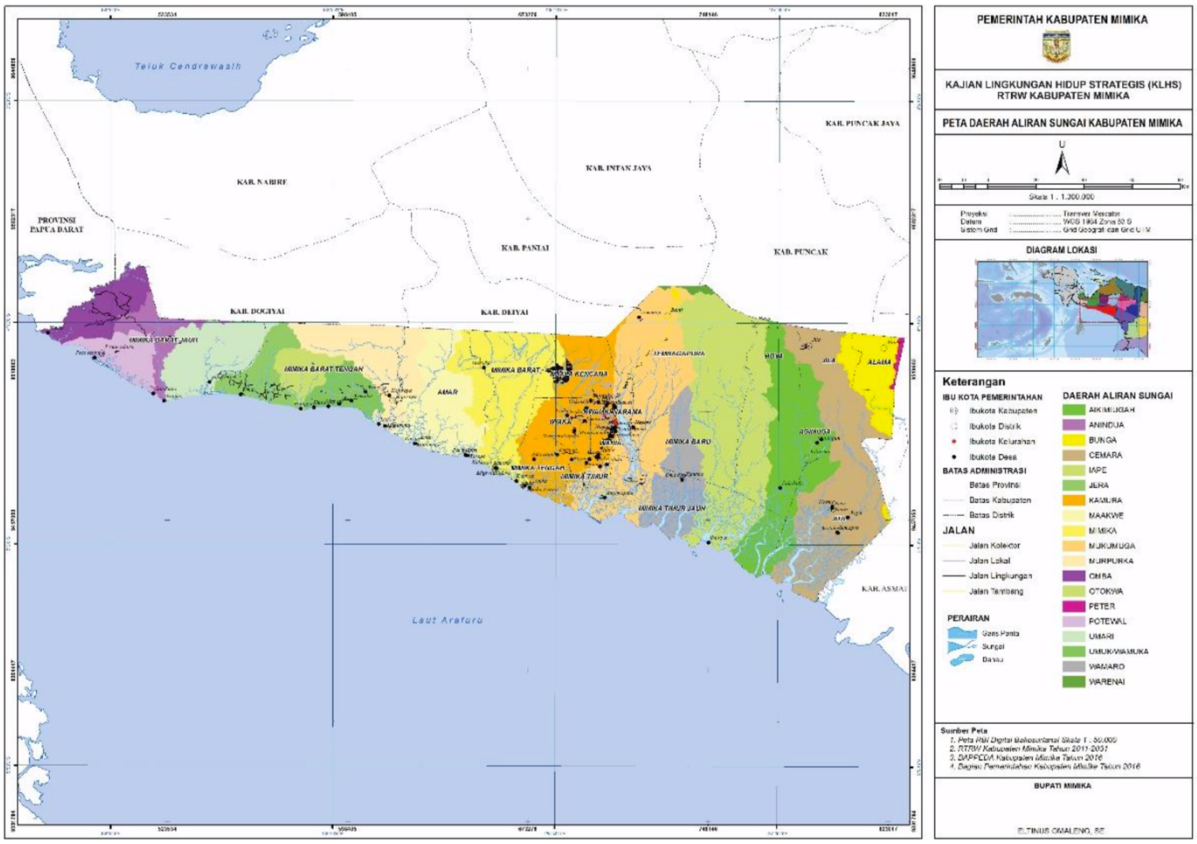

Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.5 Klimatologi

Rata-rata suhu udara minimum di wilayah Mimika selama tahun 2020 sebesar 25,59 °C dan maksimum 27,96 °C. Sedangkan rata-rata tekanan udara di wilayah Mimika selama tahun 2020 sebesar 1.005,99 Mbs.

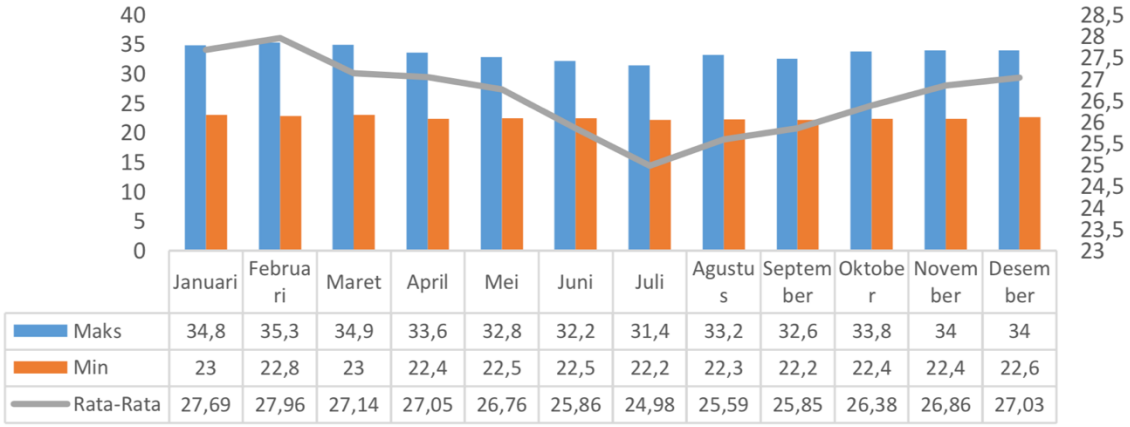

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Maks	34,8	35,3	34,9	33,6	32,8	32,2	31,4	33,2	32,6	33,8	34	34
Min	23	22,8	23	22,4	22,5	22,5	22,2	22,3	22,2	22,4	22,4	22,6
Rata-Rata	27,69	27,96	27,14	27,05	26,76	25,86	24,98	25,59	25,85	26,38	26,86	27,03

Gambar 2.8 Rata-Rata Suhu Udara Kabupaten Mimika Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2021

Kelembaban udara di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 86,90% dengan kelembaban udara tertinggi pada bulan Juli. Selanjutnya curah hujan tertinggi di Kabupaten Mimika tahun 2020 terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 1.119,80 mm dan terendah pada bulan Februari sebesar 271,80 mm.

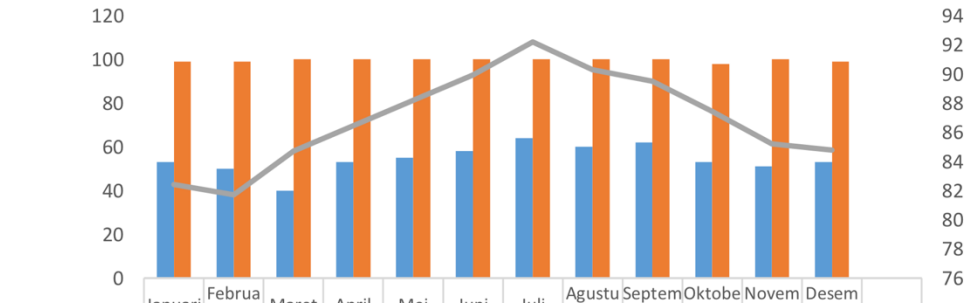

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Min	53	50	40	53	55	58	64	60	62	53	51	53
Maks	99	99	100	100	100	100	100	100	100	98	100	99
Rata-Rata	82,41	81,71	84,7	86,44	88,2	89,93	92,2	90,3	89,49	87,45	85,2	84,79

Gambar 2.9 Rata-Rata Kelembaban Udara Kabupaten Mimika Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2021

Jumlah hari hujan di Kabupaten Mimika menurut pantauan Stasiun BMG Timika mempunyai jarak (rentang) antara 20 – 31 hari pada 2020. Jumlah hari hujan sebesar 20 hari terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan jumlah hari hujan 31 hari terjadi pada bulan Juli 2020. Hampir setiap hari di Timika turun hujan, hal ini dapat terlihat dari rentang waktu hari hujan yang berada pada kisaran 20 – 31 hari hujan.

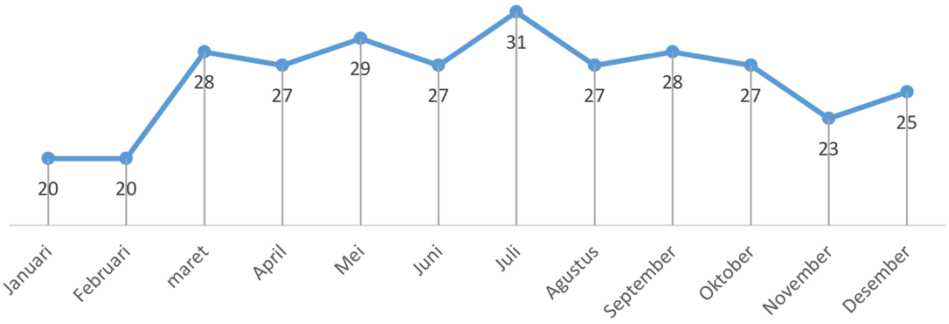

Gambar 2.10 Jumlah Hari Hujan Kabupaten Mimika Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2021

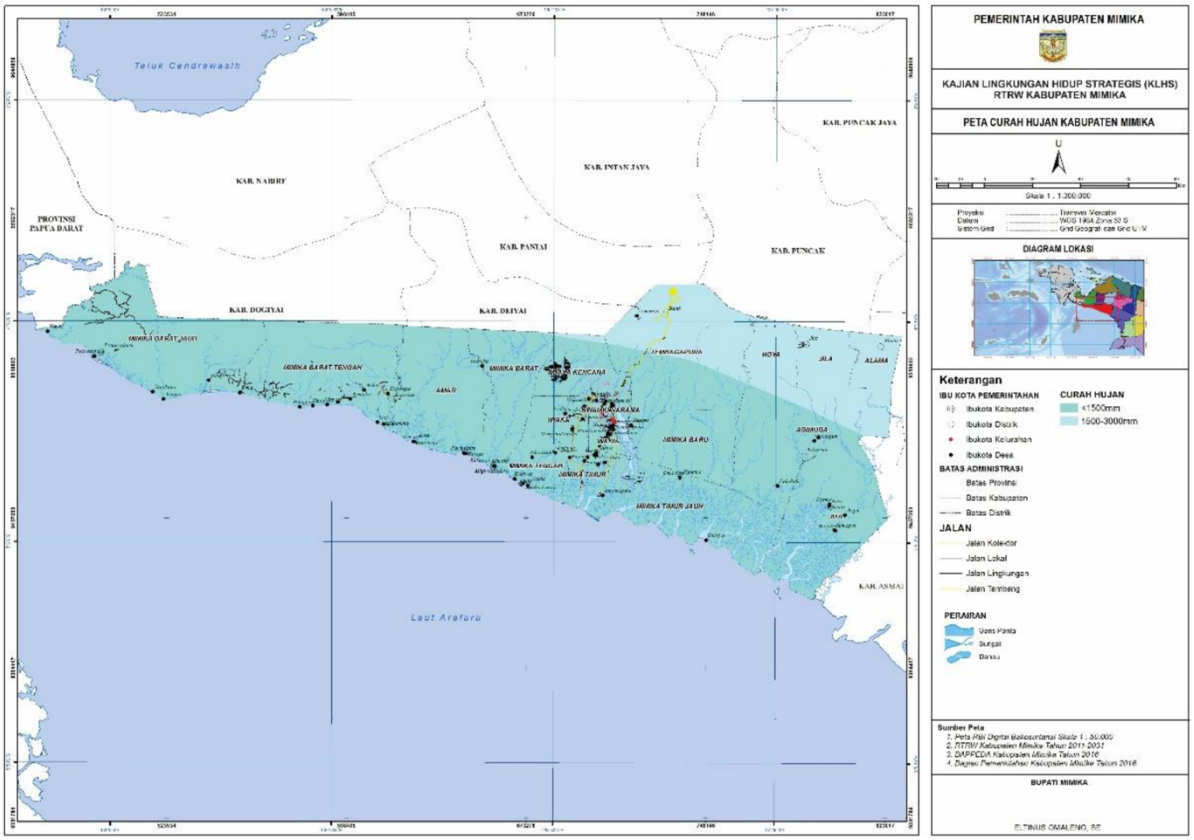

Gambar 2.11 Peta Curah Hujan Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (present or current land use). Tutupan lahan yang menggambarkan konstrukasi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan; struktur fisik yang dibangun oleh manusia, fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanah pertanian dan kehidupan binatang, dan tipe pembangunan. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Mimika didominasi oleh hutan primer dengan luas 12.076,76 Km2 dan hutan sekunder 1.114,47 Km2. Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Mimika dengan

adanya usulan reklamasi yang memanfaatkan lahan hutan mangrove dengan luas 8.377,64 Ha.

Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Mimika sesuai dengan peruntukannya yakni terdiri dari perumahan dan kawasan permukiman, bangunan umum, rawa, kebun, tambang, hutan, pertanian dan lain-lain. Adapun luas lahan masing–masing pemanfaatan lahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km2)
1	Bandara/Pelabuhan	5,05
2	Hutan Mangrove Primer	5, 12
3	Hutan Mangrove Sekunder	83,35
4	Hutan Primer	12.076,76
5	Hutan Rawa Primer	6.685,42
6	Hutan Rawa Sekunder	296,96
7	Hutan Sekunder	1.114,47
8	Permukiman	145,17
9	Pertanian Lahan Kering	130,57
10	Pertanian Lahan Kering + Semak	7,83
11	Rawa	97,39
12	Savana	0,19
13	Semak Belukar	0,52
14	Semak Belukar Rawa	45,54
15	Tambang	18,00
16	Tanah Terbuka	407,61
17	Transmigra si	2,41
18	Tubuh Air	561,40
Kabupaten Mimika		**21.639,50**

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

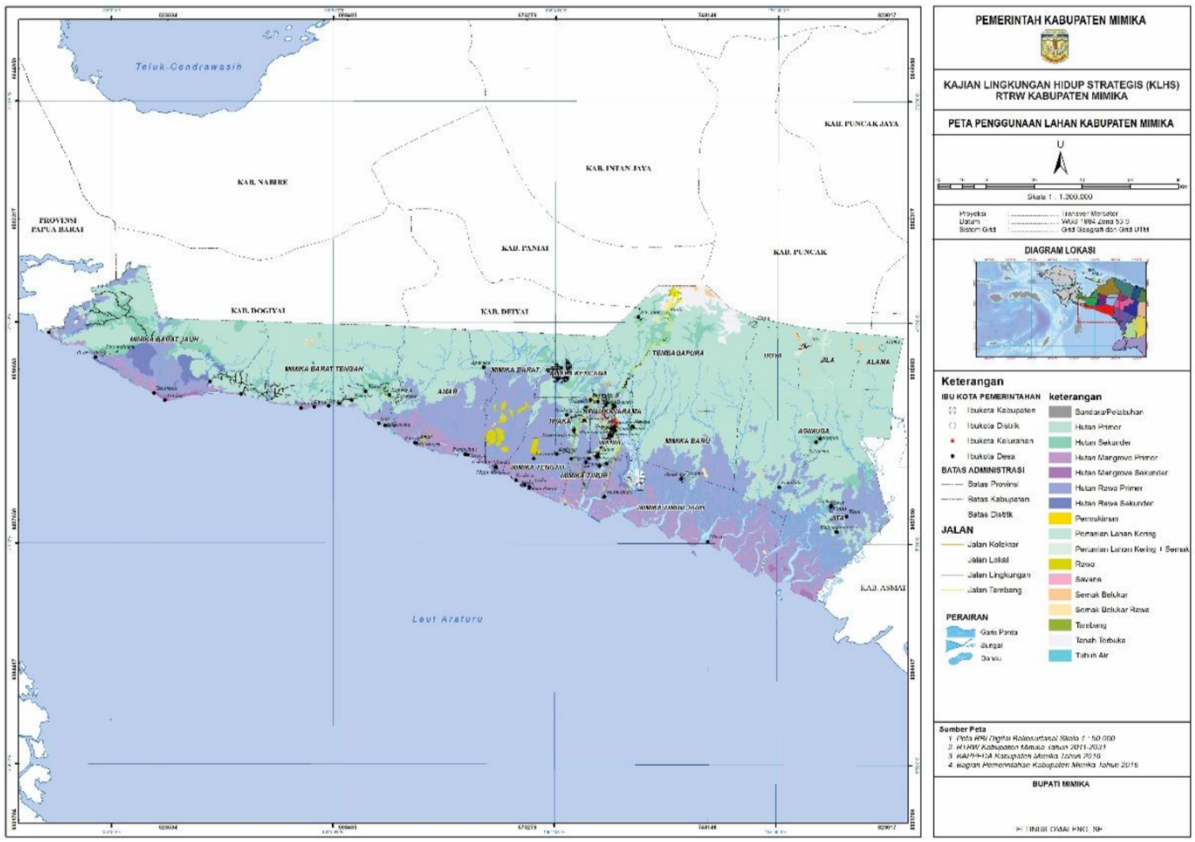

Gambar 2.12 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.7 Kawasan Rawan Bencana

A. Bencana Alam Tanah Longsor

Potensi bencana longsor di Kabupaten Mimika yang diakibatkan oleh kondisi alam yaitu intensitas curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah dengan klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kawasan dengan potensi tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terpadat konstruksi bangunan sangat penting, pada lokasi seperti ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi. Kawasan tingkat kerwanan sedang adalah kawasan yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman. Kawsan dengan tingkat kerawanan rendah adalah potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak ada resiko terjidanya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan.

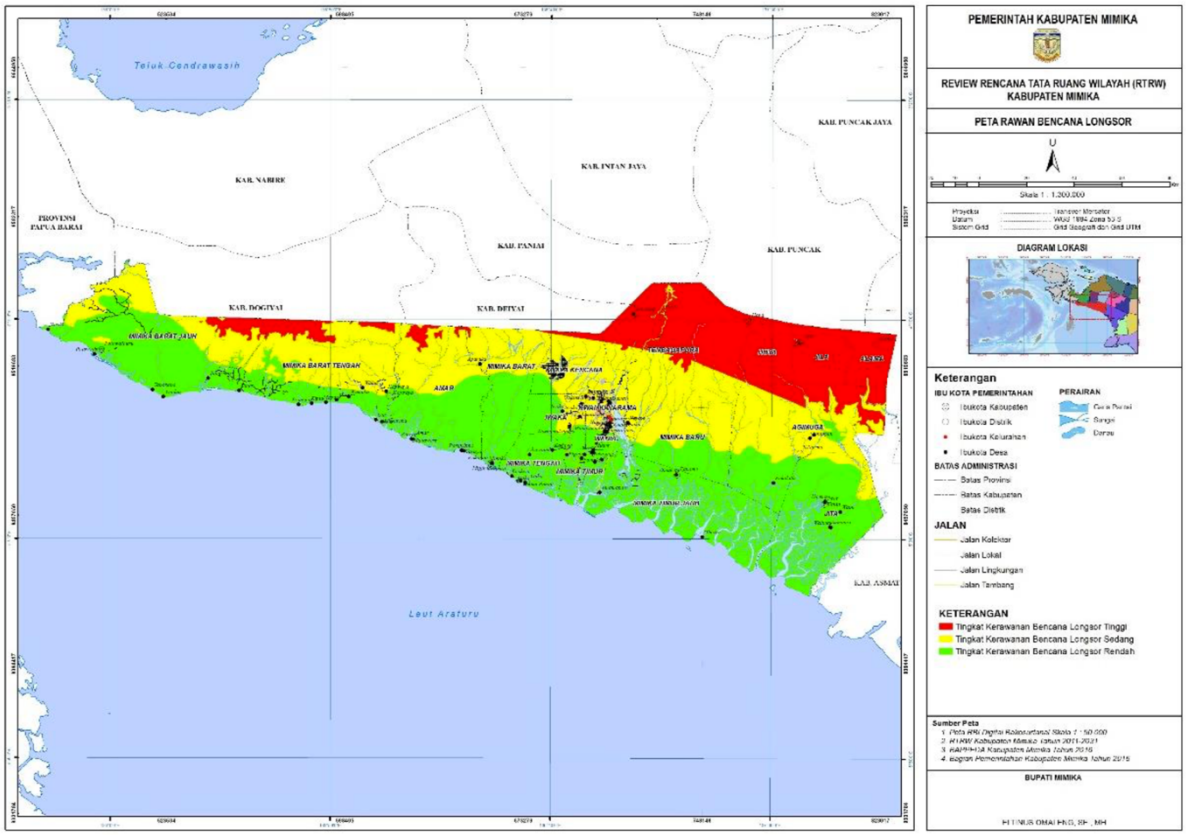

Gambar 2.13 Peta Rawan Tanah Longsor Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

B. Bencana Alam Banjir

Beberapa wilayah di Kabupaten Mimika merupakan daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa faktor yaitu : hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dem pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, banjir juga kerap terjadi karena sifat alami wilayahnya, seperti bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan curah hujan yang tinggi.

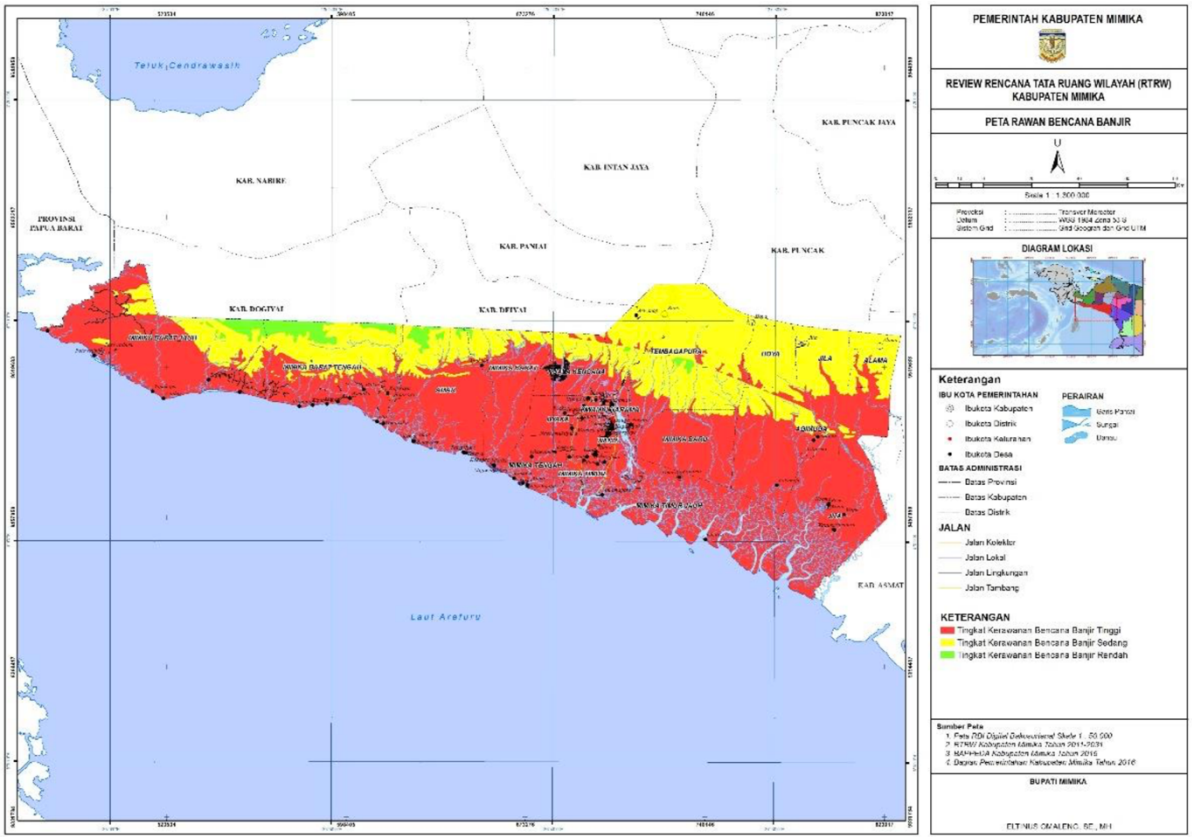

Gambar 2.14 Peta Rawan Banjir Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

C. Bencana Alam Rawan Gelombang Pasang

Berdasarkan hasil analisis gelombang pasang deliniasi daerah gelombang pasang menggunakan jarak terjauh yakni daerah terpengaruh gelombang, dengan jarak yang digunakan adalah 1 km dari garis pantai. Keberadaan mangrove mempengaruhi besarnya potensi resiko terhadap bahaya gelombang pasang. Dengan adanya keberadaan hutan mangrove primer maupun sekunder dapat meminimalisir gelombang pasang yang terjadi. Kabupaten Mimika mempunyai gelombang pasang tertinggi yaitu 3 – 4 meter dari garis pantai dan masuk dalam tingkat rawan bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir. Namun hutan mangrove primer dan sekunder menjadi salah satu bagian yang mampu mengurangi tinggi gelombang pasang, sehingga kawasan hutan mangrove memiliki potensi untuk dilindungi karena mampu mengurangi tingginya gelombang pasang.

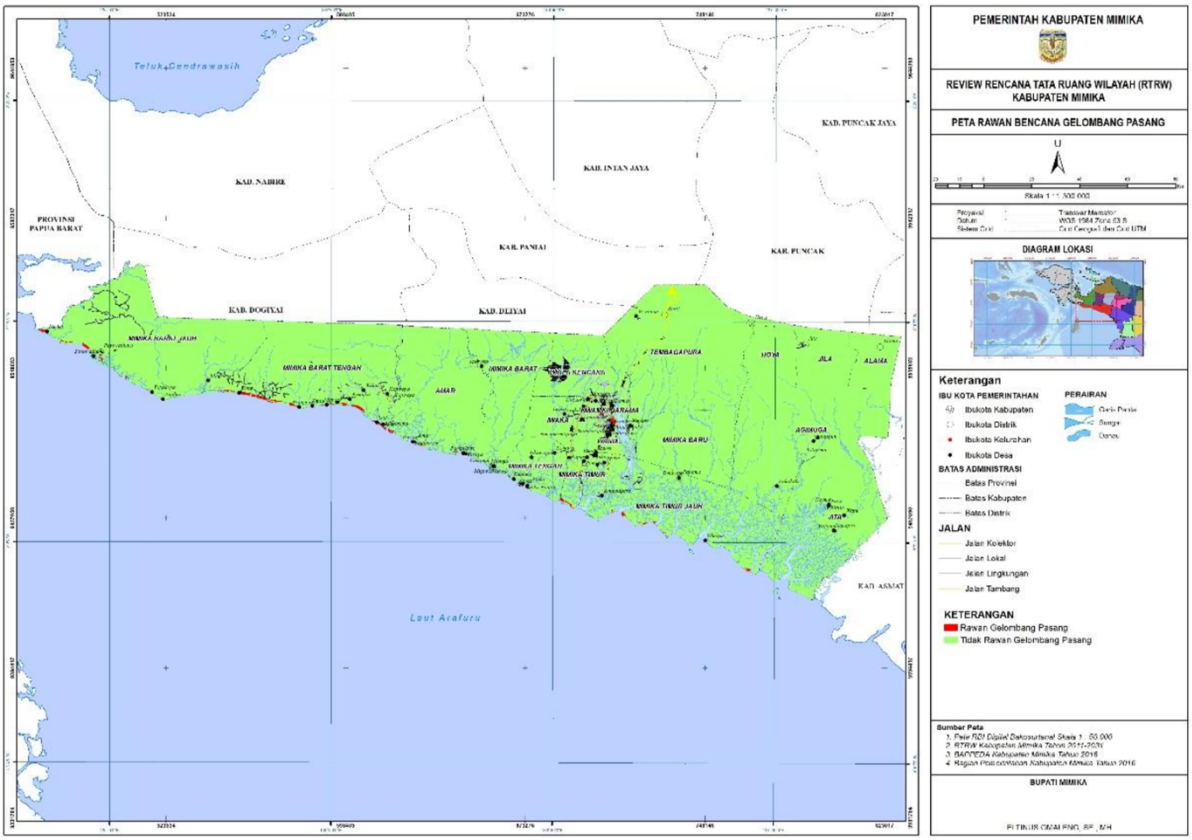

Gambar 2.15 Peta Rawan Gelombang Pasang Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Mimika memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Berdasarkan fungsinya, kawasan budidaya dikelompokkan ke dalam kawasan hutan produksi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan pertahanan dan keamanan.

2.1.8.1 Kawasan Pertanian

Metoda analisis kesesuaian lahan pertanian menggunakan kerangka sistim Food and Agriculture Organization (FAO, 1976) yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Tanah (LPT, 1982). Parameter yang dinilai meliputi kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kesuburan, reaksi tanah, kemiringan lahan (slope), relief mikro, drainase, ketersediaan air, erosi dan banjir. Pengumpulan data parameter tersebut diperoleh dari data sekunder yang sudah dikompilasi pada saat penyusunan Sistem

Informasi Tata Ruang. Dari data yang terhimpun dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi dalam Kriteria Kesesuaian Lahan Pertanian, kemudian ditumpangtindihkan (superimpose) antara klasifikasi parameter tersebut. Hasil akhir diperoleh Unit Kesesuaian Lahan dan dinilai secara kualitatif. Untuk memudahkan digunakan notasi huruf dan angka sebagai berikut:

- S1 (sangat sesuai) : lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti.
- S2 (cukup sesuai): lahan mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
- S3 (sesuai marginal): lahan mempunyai pembatas-pembatas serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.
- N1 (tidak sesuai pada saat ini) : lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk diatasi hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.
- N2 (tidak sesuai permanen) : lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelangsungan pada lahan tersebut.

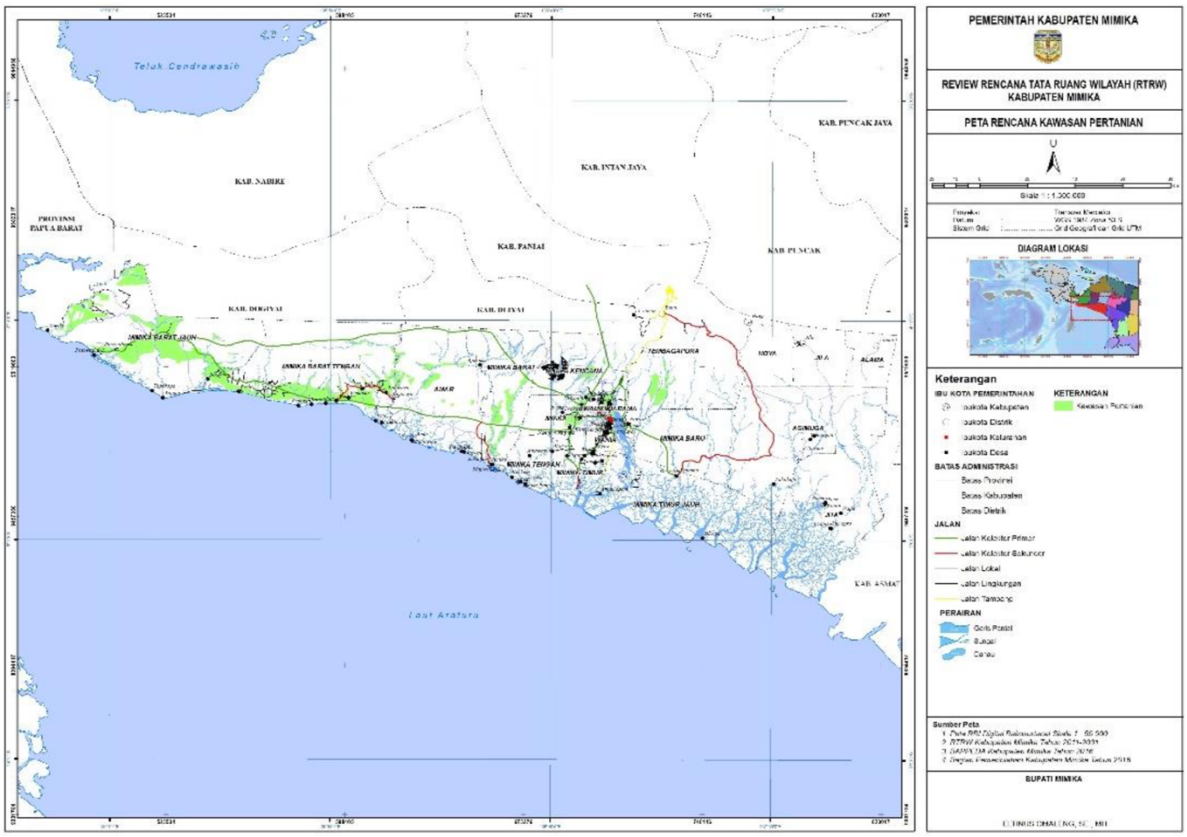

Gambar 2.16 Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.8.2 Kawasan Perkebunan

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 638/KPTS/Um/8/1981 kriteria fisik wilayah untuk penentuan lokasi tanaman tahunan adalah lokasi yang mempunyai skor/nilai untuk faktor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan adalah 125 sampai 175.

Kriteria kesesuaian lahan adalah, bahwa suatu wilayah pada kawasan penyangga dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai areal tanaman tahunan jika memenuhi syarat kesesuaian lahan untuk tanaman tahun yang bersangkutan. Syarat kesesuaian yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai kesesuaian lahan dari sangat sesuai sampai marginal untuk tanaman tahunan. Dalam penetapan pilihan komoditi tanaman tahunan selain pertimbangan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi.

Kriteria kesesuaian lahan bagi pengembangan tanaman keras/tahunan/perkebunan sangat beragam sesuai dengan jenis komoditinya. Pada dasarnya berbagai jenis tanaman keras dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 –2.500 m di atas permukaan laut.

Kriteria kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

- Kawasan perkebunan (skor <125) / yang berada di luar kawasan lindung
- Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan
- Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan mampu memberikan manfaat:
  - Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
  - Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - Meningkatkan fungsi lindung;
  - Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
  - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
  - Menciptakan kesempatan kerja;
  - Meningkatkan ekspor;
  - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan perkebunan ini dipergunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada:

- Area lahan tegalan, semak/belukar atau alang-alang dengan kemiringan lahan 15 - 40% sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga kawasan lindung;
- Meningkatkan perekonomian penduduk disekitar kawasan penyangga hutan lindung melalui pengembangan agroforestry yang sudah ada dengan jenis komoditas yang komersial dan memiliki keterkaitan dengan industri serta dapat memantapkan fungsi kawasan lindung;
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas perkebunan dalam mendukung pertumbuhan agroindustri.

- Pembukaan lahan baru untuk perkebunan pada kawasan yang mempunyai kelerengan lebih dari 25% perlu dilakukan dengan land covering untuk mencegah erosi. Sedangkan pembukaan lahan perkebunan pada daerah rawa perlu dibuat drainase untuk mengeringkannya dan tetap menyisakan sebagian wilayahnya tetap berupa rawa untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah;
- Pengawasan dan pengendalian pembukaan lahan perkebunan baru sehingga tidak terjadi overlap dengan kegiatan lainnya;
- Perbaikan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan.
- Pembinaan dan penyuluhan terpadu terutama untuk perkebunan rakyat dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan
- Pengelolaan dan penanganan pasca panen.

Arahan kawasan pengembangan perkebunan di Kabupaten Mimika terdiri atas :

a) KawasanperuntukanperkebunankelapasawitterdapatdiDistrikMimika Barat Jauh, Distrik Iwaka, Distrik Kuala Kencana dan Distrik Mimika Barat;
b) Kawasan peruntukan perkebunan kopi, terdapat di Distrik Kuala Kencana dan Distrik Iwaka;
c) Kawasan peruntukan perkebunan Kakao, terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Iwaka dan Distrik Kuala Kencana;
d) KawasanperuntukanperkebunankelapaterdapatdiDistrikMimikaBarat Jauh dan Distrik Mimika Barat; dan
e) Kawasan peruntukan perkebunan buah-buahan terdapat di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Iwaka, Distrik Mimika Barat jauh dan Distrik Mimika Barat.

Adapun luasan keseluruhan kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Mimika adalah 83.043,34 ha.

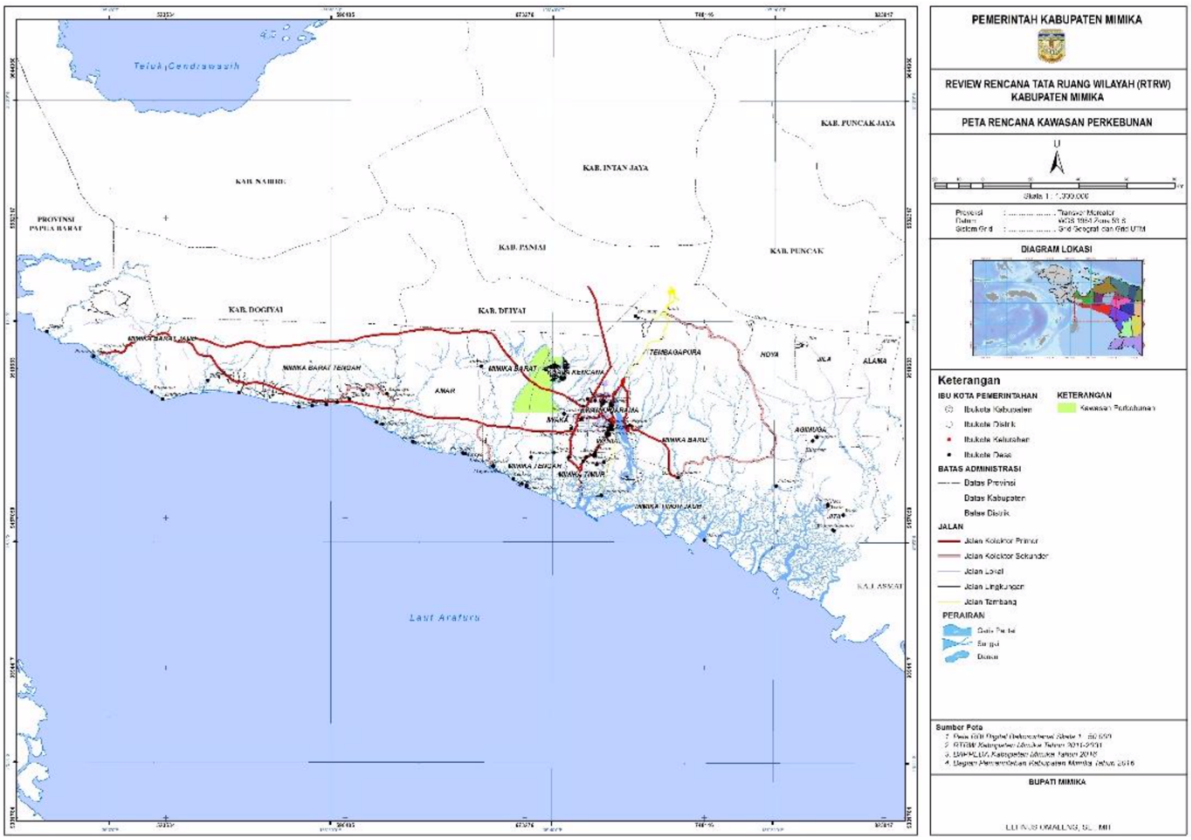

Gambar 2.17 Peta Rencana Kawasan Perkebunan Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.8.3 Kawasan Peternakan

Kabupaten Mimika memiliki potensi pengembangbiakan ternak besar, ternak kecil, dan juga ternak unggas. Ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar, yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan ternak kecil, yaitu babi, kambing, domba, dan kelinci. Ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung. Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas, yaitu ayam, itik (bebek), angsa, dan burung puyuh.

Kawasan peruntukan peternakan terdapat di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Agimuga, Distrik Jita, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Mimika

Timur, Distrik Mimika Baru, Distrik Kwamki Narama, Distrik Hoya, Distrik Alama, Distrik Jila Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat dan Distrik Amar.

2.1.8.4 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Mimika pada umumnya terpencar di beberapa wilayah distrik. Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Mimika, terdiri atas :

a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Barat Jauh;

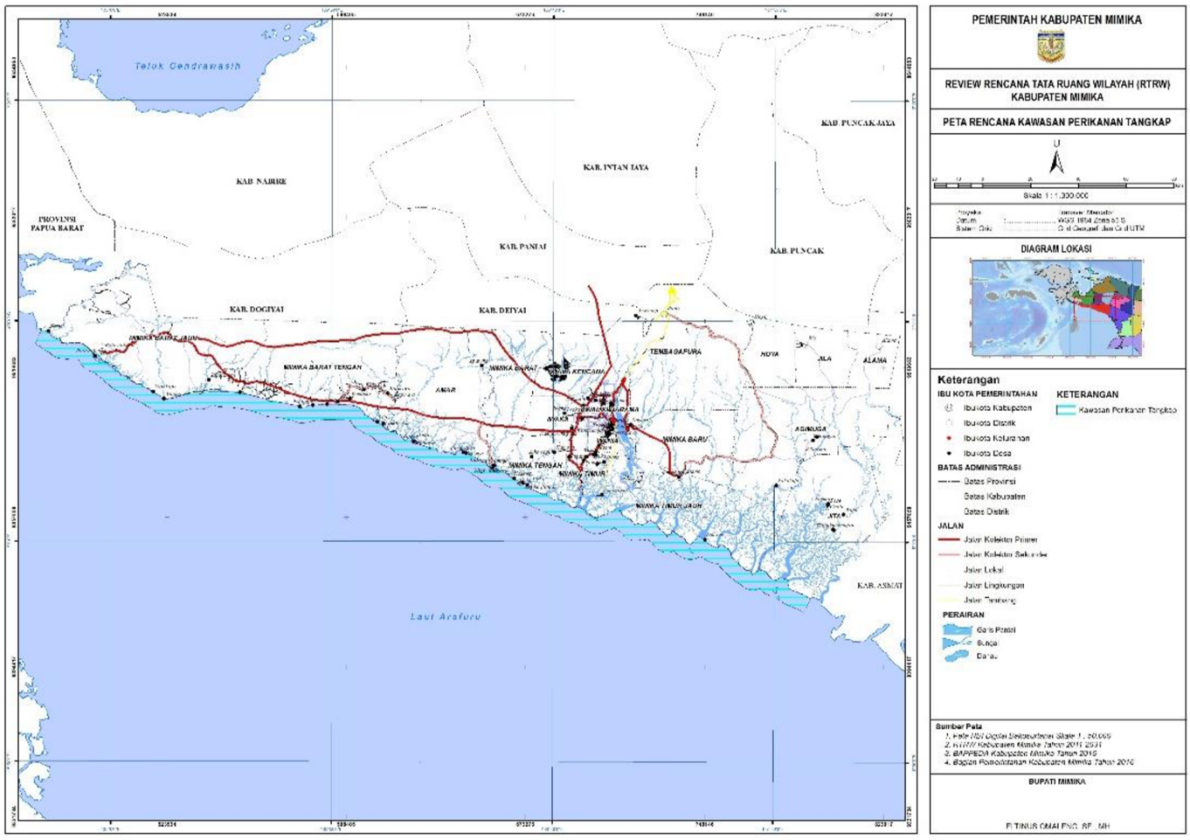

Gambar 2.18 Peta Rencana Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri atas:

- Budidaya perikanan air payau (bukan tambak) dikembangkan di Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Jita.
- Budidaya perikanan air tawar di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Iwaka, Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur; dan
- Budidaya perikanan air laut di Distrik Mimika Barat Jauh.

c) Kawasan pengolahan hasil perikanan, untuk pengolahan ikan terdapat di Potowaiburu di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika Timur Jauh.

2.1.8.5 Kawasan Pertambangan

Arahan lokasi pengembangan kawasan pertambangan/bahan galian pada lokasilokasi yang terdapat potensi bahan tambang/galian dan mempunyai potensi cadangan yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Pengembangan Kawasan pertambangan di Kabupaten Mimika, adalah sebagai berikut:

- Perlunya ada pendelinasian kawasan pertambangan dengan jelas;
- Kegiatan eksploitasi pertambangan harus dilakukan studi AMDAL;
- Kawasan pertambangan yang sudah ada tetap dipertahankan dan dioptimalkan produksinya serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
- Pengeluaran izin lokasi kegiatan pertambangan baru harus di lengkapi dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:

a) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara

Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Mimika, terdiri atas:

- Kawasan pertambangan emas, terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Hoya, Distrik Alama, Distrik Amar dan Distrik Tembagapura.
- Kawasan pertambangan tembaga terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Amar, dan Distrik Tembagapura.
- Kawasan pertambangan bebatuan (galian c) terdapat di Sungai Iwaka Distrik Kuala Kencana dan Distrik Iwaka serta kali merah di Distrik Iwaka;
- Kawasan pertambangan pemanfaatan pasir sisa tambang (Tailling) disalurkan melalui hulu sungai Aghawagon dan Otomona kemudian diendapkan di daerah ModADA yang melewati Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania dengan luas 23.607,82 Ha.
- Kawasan pertambangan batubara terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Amar, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Distrik Jila.

b) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kawasan pantai selatan Kabupaten Mimika.

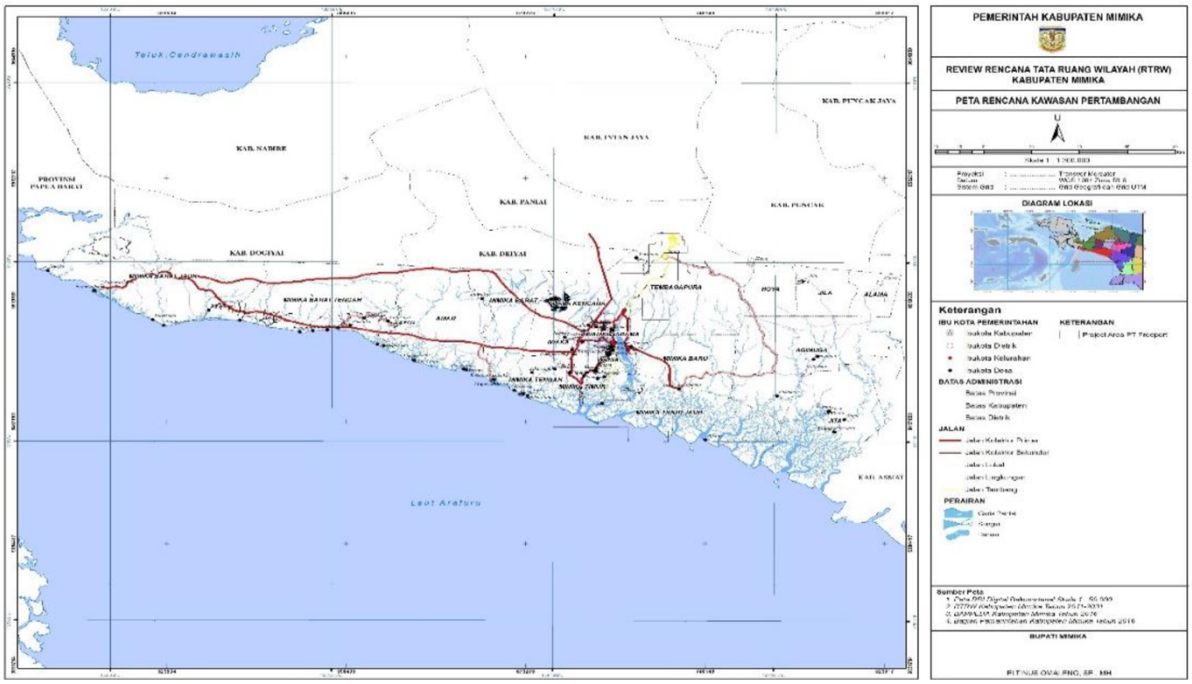

Gambar 2.19 Peta Rencana Kawasan Pertambangan Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.8.6 Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Objek wisata di Kabupaten Mimika meliputi objek wisata alam, wisata budaya, maupun objek wisata buatan. Untuk pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Mimika, maka beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

a. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

- Wisata alam pulau Bidadari dan pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh,
- Wisata alam pantai Keakwa dan pantai Kampus Biru di Distrik Mimika Tengah,
- Wisata Alam Pantai Kawar di Distrik Amar,
- Wisata Alam Pantai Mikapi di Distrik Mimika Barat Tengah,
- Wisata Alam Pantai Ipaya di Distrik Amar,
- Wisata alam kali Mayon di Distrik Kuala Kencana,
- Wisata Alam kali Iwaka di Distrik Iwaka,
- Wisata Alam kali Kiura di Distrik Mimika Barat,
- Wisata alam gunung Taman Nasional Lorentz di Distrik Jila, Distrik Agimuga dan Distrik Tembagapura,
- Wisata alam ekowisata hutan manggrove (bakau) Keakwa di Distrik Mimika Tengah,
- Wisata Alam Ekowisata Mangrove Perikanan di Distrik Mimika Timur,
- Wisata alam gunung puncak Cartentz di Distrik Tembagapura, dan
- Wisata alam berburu di kampung Pigapu Distrik Mimika Timur.

b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi :

- Wisata Budaya peninggalan perang dunia II di pantai Kekwa Distrik Mimika Tengah,
- Wisata Budaya Taman Mapurupuwau kampung Mware di Distrik Mimika Timur,

- Wisata Budaya Tugu Eme Neme di pusat Kota Timika Distrik Mimika Baru,
- Wisata Budaya Festival Kamoro Kakuru di Pusat Kota Timika Distrik Mimika Baru,dan
- Wisata Budaya Kota Tua Kokonao Distrik Mimika Barat.

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:

- Taman alun-alun dan Padang Golf Rimba Irian di Distrik Kuala Kencana;
- Kolam Renang Kuala Kencana di Distrik Kuala Kencana;
- Waterboom Karang Senang di Distrik Kuala Kencana;
- Wisata Air Pelangi di Distrik Wania;
- Taman Rekreasi kolam pemancingan di Distrik Mimika Baru; dan
- Taman Wisata Religi Kota Timika Distrik Mimika Baru.

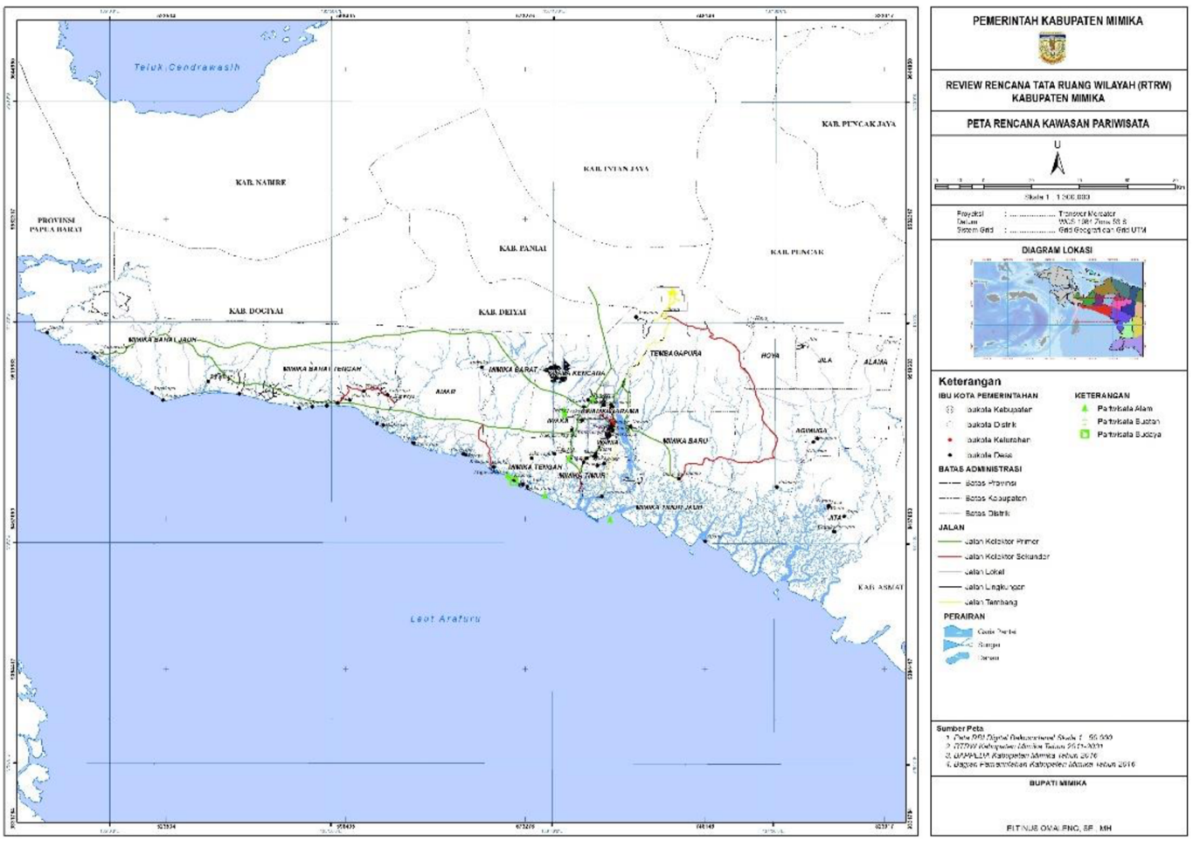

Gambar 2.20 Peta Rencana Kawasan Pariwisata Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.2 Struktur

2.2.1 Analisis Kualitas SDM Kependudukan

Analisis kualitas sumber daya manusia dari sisi kependudukan di Kabupaten Mimika dilakukan untuk melihat bagaimana kesiapan masyarakat di Kabupaten Mimika dalam menerima konsep *smart city*. Informasi yang perlu diketahui didalam analisis ini adalah kondisi demografi dan angka partisipasi baik kasar ataupun murni.

2.2.1.1 Demografi

Penduduk Kabupaten Mimika berdasarkan data BPS Kabupaten Mimika pada tahun 2022 yaitu sebanyak 316.295 ribu jiwa, dengan distrik yang memiliki penduduk tertinggi yaitu terdapat pada distrik Mimika Baru sebanyak 144.893 ribu jiwa, dan paling sedikit yaitu Distrik Agimuga sebanyak 888 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Mimika dari tahun 2020-2021 yaitu sebesar 0,37. Untuk lebih detail mengenai jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk, serta kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika pada masing-masing distrik pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2022

No	Distrik	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2021)	Persentase Penduduk (%)	Kepaatan Penduduk (Km^2)
1	Agimuga	888	1.37	0.28	0.40
2	Amar	2.073	1.37	0.66	1.15
3	Ala ma	2.083	1.36	0.66	5.69
4	Hoya	1.112	1.37	0.35	1.97
5	Iwaka	11.133	1.38	3.52	22.59
6	Jila	1.779	1.37	0.56	2.86
7	Jita	1.547	1.38	0.49	0.79
8	Kuala Kencana	28.159	1.39	8.90	32.71

No	Distrik	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2021)	Persentase Penduduk (%)	Kepaatan Penduduk (Km^2)
9	Kwamki Narama	13.941	1.39	4.41	1084.06
10	Mimika Barat	3.007	1.38	0.95	2.53
11	Mimika Barat Jauh	2.058	1.38	0.65	0.83
12	Mimika Barat Tengah	2.352	1.38	0.74	1.03
13	Mimika Baru	144.893	1.39	45.81	95.99
14	Mimika Tenqah	4.319	1.38	1.37	8.20
15	Mimika Timur	10.320	1.39	3.26	35.53
16	Mimika Timur Jauh	3.569	1.39	1.13	1.75
17	Tembagapura	23.341	1.39	7.38	9.02
18	Wania	59.721	1.3	18.88	302.66
Kabupaten Mimika		**316.295**	**0.37**	**100**	**14.58**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

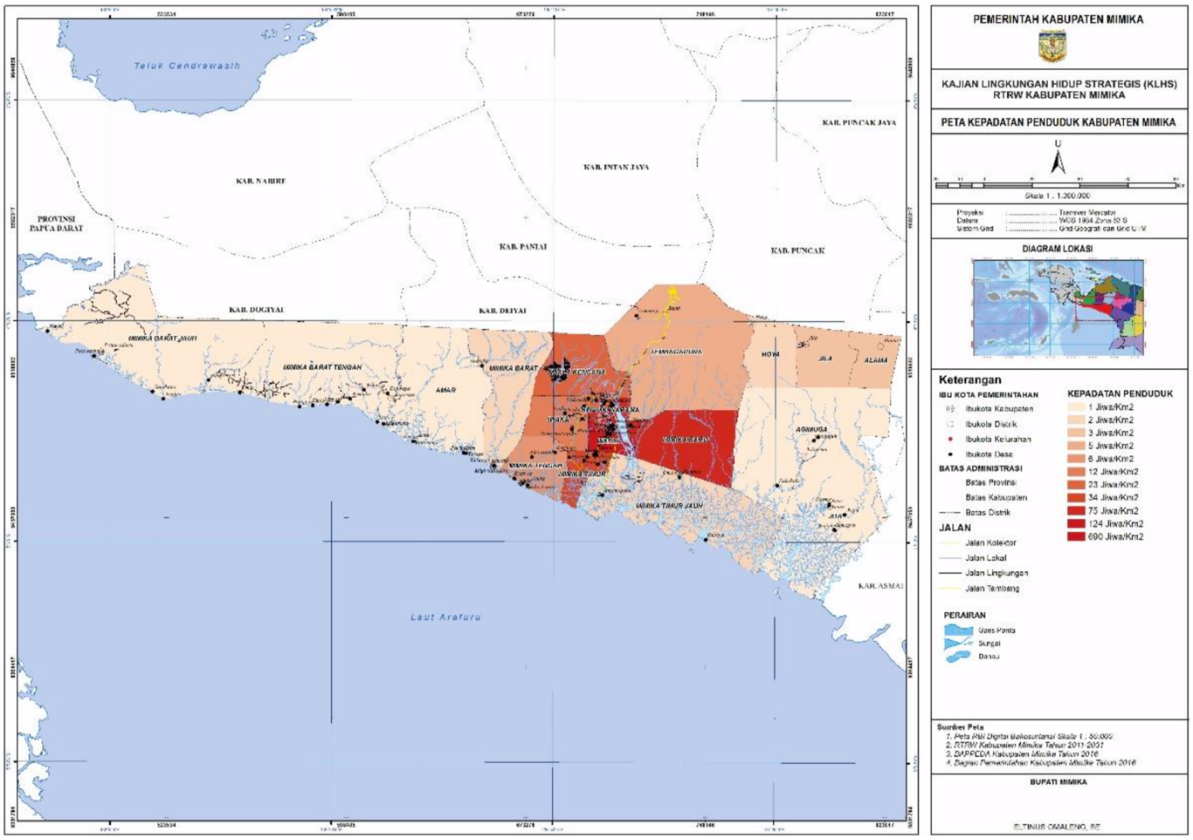

Gambar 2.21 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.2.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

APM Kabupaten Mimika untuk pad usia 7-12 tahun pada tahun 2016 sebesar 92,39, sementara pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan, yaitu tahun 2017 sebesar 91,87, tahun 2018 sebesar 91,59, tahun 2019 sebesar 91,41, dan 2020 sebesar 91,53. Selanjutnya, APM untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2016 sebesar 74,82, dan di tahun 2017 menurun kembali menjadi 73,15 namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 75,11, di tahun 2019 meningkat menjadi 77,11, dan 2020 menurun menjadi 77,01. Sedangkan APM untuk usia 16-18 tahun pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 70,92, namun pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan yaitu 2017 sebesar 68,98, 2018 sebesar 67,05, 2019 sebesar 66,97, dan 2020 sebesar 64,96. Perkembangan APM tahun 2016-2020 seperti yang ada pada gambar di bawah ini:

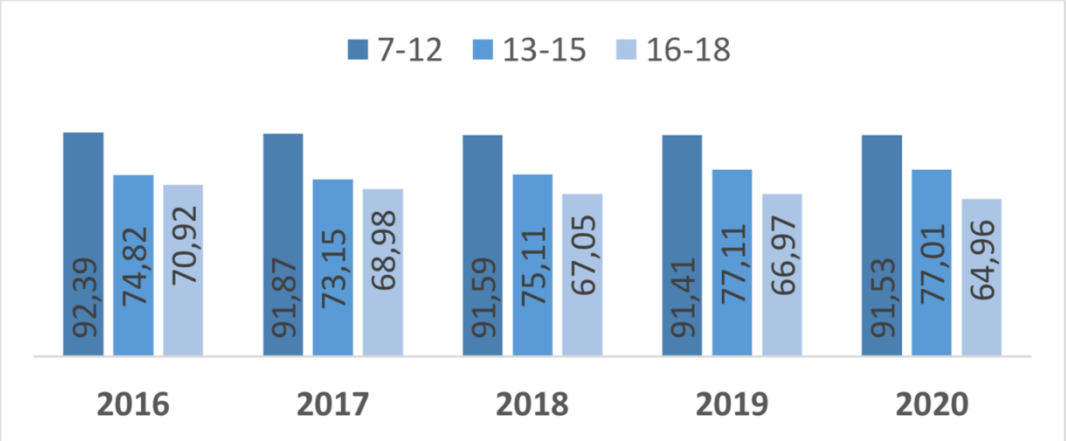

Gambar 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mimika Tahun 2016-2020

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

2.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat menundukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Mimika untuk pad usia 7-12 tahun pada tahun 2016 meningkat sangat kecil menjadi 109,57, namun terus menurun yaitu di tahun 2017 sebesar 104,14 dan tahun 2018 sebesar 101,35, di tahun 2019 sebesar 100,86, dan 2020 sebesar 102,91. Selanjutnya, APK untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2016 sebesar 98,64, namun di tahun 2017 meningkat menjadi 125,32 dan meningkat kembali pada 2018 sebesar 125,76, di tahun 2019 sebesar 92,18, dan 2020 sebesar 92,32. Sedangkan APK untuk usia 16-18 tahun pada tahun 2016 sebesar 154, sementara pada tahun 2017 menurun menjadi 119,56 dan kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar 129,86, di tahun 2019 sebesar 143,48, dan 2020 sebesar 122,82. Perkembangan APK tahun 2016-2020 seperti yang ada pada gambar di bawah ini:

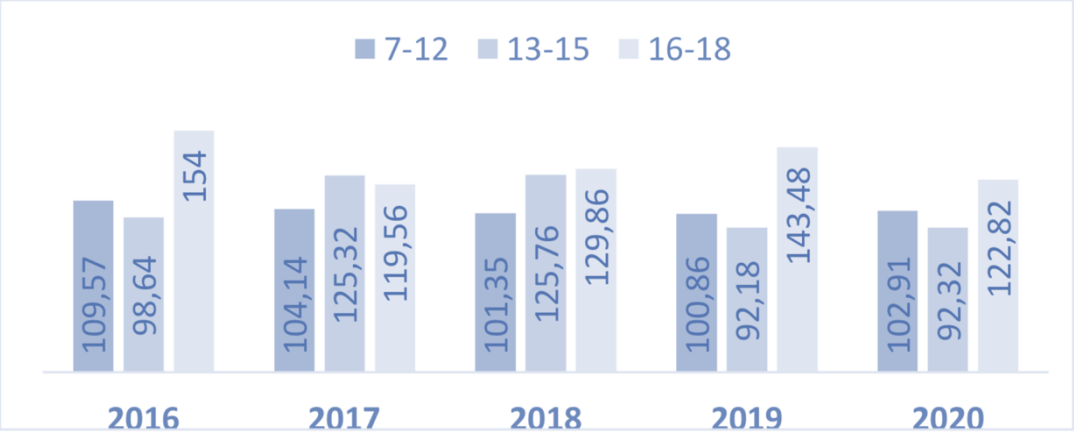

Gambar 2.23 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mimika Tahun 2016-2020

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

2.2.2 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program *smart city* dimana di dalamnya dituntut adanya integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Di samping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak dari *smart city*, kesiapan pemerintah daerah di dalam melaksanakan *smart city* merupakan faktor kunci keberhasilan *smart city*. Sehingga di dalam analisis terdapat lebih banyak butir-butir informasi yang perlu ditelaah lebih lanjut di dalam analisis kesiapan pemerintah daerah di Kabupaten Mimika.

Berikut adalah hasil inventarisasi SDM di setiap OPD di Kabupaten Mimika yang mempunyai latar belakang pendidikan/ketrampilan/skill TIK, dan informasi mengenai status kepegawaian dan jenis ketrampilannya.

Tabel 2.8 Data Inventarisasi SDM di setiap OPD di Kabupaten Mimika

No	Nama	SKPD dan Bagian	Pendidikan	Keterampilan	Status kepegawaian
1	Fauziah Assegaff, SE	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	S1	TIK	PNS
2.	Blasius Rahangian, SE		S1	TIK	PNS
3.	Jiman Akbar, SE		S1	TIK	PNS
4.	Muh. Ardhan Fandun		D3	TIK	PNS
5.	Azis Sinen, SE		S1	TIK	PNS

No	Nama	SKPD dan Bagian	Pendidikan	Keterampilan	Status kepegawaian
6.	Maria Deasy Sumarandina, SE		S1	TIK	PNS
7.	Yanuarius Nawipa, S.IPi		S1	TIK	PNS
8.	Johana Maria Joweni		SMA	TIK	PNS
9.	Ronald Raturoma, SE		S1	TIK	HONORER
10.	Irawati, SE		S1	TIK	HONORER
11.	Safri Deeno, ST		S1	TIK	HONORER
12.	Damira Jamaladdin, S.Kom		S1	TIK	HONORER
13.	Wilfred Palea Koban, SE		S1	TIK	HONORER
14.	Erenus H.Natkime, S.I.Kom		S1	TIK	HONORER
15.	Wenas Uamang, S.S		S1	TIK	HONORER
16.	Doris Orsen Karay		SMA	TIK	HONORER
17.	Anton Bugalen, S.Sos	Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	S1	TIK	PNS
18.	Efraim Saria, SE, M.Pd		S2	TIK	PNS
19.	Drs. Manto Ginting		S1	TIK	PNS
20.	Stanislaus Laiyan, S.Pd, M.Pd		S2	TIK	PNS
21.	Bunyamin, S.Pd, M.Pd		S2	TIK	PNS
22.	Andri Patiung, ST		S1	TIK	PNS
23.	Marthen Kanna, S.Kom		S1	TIK	PNS
24.	Robert Wattimena, S.Sos		S1	TIK	PNS
25.	Salmon Sambo, S.Kom		S1	TIK	PNS
26.	Djajusman Letsoin, SE		S1	TIK	PNS
27.	Zeth Sonny Awom, SE		S1	TIK	PNS
28.	Herlina Sombo, ST		S1	TIK	HONORER
29.	Ayulita Limbong, S.Kom		S1	TIK	HONORER
30.	Drs. Bartolomus Kunong, M.Si	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	S2	TIK	PNS
31.	Muh. Asram, S.STP		S1	TIK	PNS
32.	Aprida, S.Sos		S1	TIK	PNS
33.	Ernes Sanda S. Lobo, SE		S1	TIK	PNS
34.	Marianty Langi Pasangka, SE		S1	TIK	PNS
35.	Amirullah, S.Sos		S1	TIK	PNS
36.	Damaris Tappi, S.sos		S1	TIK	PNS
37.	Mulyati		S1	TIK	PNS
38.	Ritha Rosmawati Tampubolon		SMA	TIK	PNS
39.	Yusuf Howay, S.IP		S1	TIK	PNS
40.	Nelly Juiana Bane, SE		S1	TIK	PNS
41.	Melius Murib, S.Sos		S1	TIK	PNS
42.	Mateus Pihiwi, S.IP		S1	TIK	PNS
43.	Elwin, A.Md		D3	TIK	PNS
44.	Sintia Selvi Nanuru		SMA	TIK	PNS
45.	Pepina Tahitu, SH		S1	TIK	PNS
46.	Margaretha J. Rompis		SMA	TIK	HONORER
47.	Suci Ramadhani		SMA	TIK	HONORER
48.	Muhammad Iqbal		SMA	TIK	HONORER
49.	Aprilia		SMA	TIK	HONORER
50.	Ardi Wiranata		SMA	TIK	HONORER
51.	Algertho R. Asmuruf, ST	Badan Lingkungan Hidup	S1	TIK	PNS
52.	Genessa Irianti, ST		S1	TIK	PNS
53.	Leonard Warintit, ST		S1	TIK	HONORER
54.	Demianus Paunno	BAPPEDA	S1	TIK	PNS
55.	Romanus Mote		S1	TIK	PNS
56.	Surya Wahyudi		S1	TIK	PNS
57.	Noprian Thamrin		S1	TIK	PNS
58.	Galli Halley		S1	TIK	HONORER

No	Nama	SKPD dan Bagian	Pendidikan	Keterampilan	Status kepegawaian
59.	Alprida Yanti		S1	TIK	HONORER
60.	Jason Pangaribuan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat	S1	TIK	PNS
61.	Agus Sugianto, ST		S1	TIK	PNS
62.	Syarifuddin, ST		S1	TIK	PNS
63.	Siti Hudaya	Dinas Kesehatan	D3	TIK	PNS
64.	Usman La Alimuda		SMA	TIK	PNS
65.	Jenni. P		SMA	TIK	PNS
66.	Farida		SMA	TIK	PNS
67.	Maria		SMA	TIK	PNS
68.	Charles Regirit, SE		S1	TIK	HONORER
69.	Samsul		SMA	TIK	HONORER
70.	Misran		SMA	TIK	HONORER
71.	Ully		SMA	TIK	HONORER
72.	Meggi		SMA	TIK	HONORER
73.	Aditia		SMA	TIK	HONORER
74.	Cherly Lumenta, SE, M.Si	Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif	S2	TIK	PNS
75.	Muh. A.E Rumbou, S.Sos, M,Si		S2	TIK	PNS
76.	A. Ellen Tuwaidan, SE		S1	TIK	PNS
77.	Andi Sitti Rahma Nasir, SE		S1	TIK	PNS
78.	Brian Rizki M. Muntu, SE		S1	TIK	HONORER
79.	Dexy Geraldo Laluyan		SMA	TIK	HONORER
80.	Alberth B. E. Fonataba, SE		S1	TIK	HONORER
81.	Hari Agung Subagyo, A.Md		D3	TIK	HONORER
82.	Marco Felix Sanda Kila, ST		S1	TIK	HONORER
83.	Irsansari, S.Kom, M.Amd SDA	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	S2	TIK	PNS
84.	Adolce F. Ariem, S.Sos, MM		S2	TIK	PNS
85.	Henny Kartika Jati, SE, M.Ec		S2	TIK	PNS
86.	Natalya Walalayo, S. Sos		S1	TIK	PNS
87.	Eka Andriyani Nur, ST		S1	TIK	PNS
88.	Sarah Maria Rahayaan, A.Md		D3	TIK	PNS
89.	Syawai Yoseph Wersay, S.A.P		S1	TIK	PNS
90.	Eliaser Noro, ST		S1	TIK	PNS
91.	Nurhansia, S.Kom		S1	TIK	PNS
92.	Fatma Rumra, S.A.P		S1	TIK	PNS
93.	Nataniel Rahanjaan		SMA	TIK	PNS
94.	Sarah Novalita Patty		SMA	TIK	PNS
95.	Agus Setiawan		SMA	TIK	PNS
96.	Efendi Palulun, S.Kom		S1	TIK	PNS
97.	Bernadus Songbes, SH	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	S1	TIK	PNS
98.	Leentje A.A Siwabessy, Se		S1	TIK	PNS
99.	Laitam Gredenggo, S.Ip		S1	TIK	PNS
100.	Welhemina J.A Marjen		S1	TIK	PNS
101.	Luna Gideon Momot, Se		S1	TIK	PNS
102.	Asra Rafra, Se		S1	TIK	PNS
103.	Novi Senoaji, S.Sos, MM		S2	TIK	PNS
104.	Juliani, ST		S1	TIK	PNS

No	Nama	SKPD dan Bagian	Pendidikan	Keterampilan	Status kepegawaian
105.	Matius Liling Manakka, S.Sos		S1	TIK	PNS
106.	Libert Yan Manggara, SE, M.Si		S2	TIK	PNS
107.	Micheal R. Gomal, S.STP, M.Si	Badan Pemberdyaan Masyarakat	S2	TIK	PNS
108.	Antonius Welerubun, S.IP		S1	TIK	PNS
109.	Sanandor Kandipi, S.Sos		S1	TIK	PNS
110.	C. Abner Frits Werimon, SE		S1	TIK	PNS
111.	Eklefina M Karma, S.Pd		S1	TIK	PNS
112.	Joni Patiung, SE		S1	TIK	PNS
113.	Obeth O. Murmana, S.Sos		S1	TIK	PNS
114.	Aswin Talahatu		S1	TIK	PNS
115.	Ir. Yani F. Effendi, MM		S2	TIK	PNS
116.	Khairullah, SE, M.Si		S2	TIK	PNS
117.	Sukirman		S1	TIK	PNS
118.	Eli Marsixteen, SE		S1	TIK	PNS
119.	Delsi Taruklabi, SE		S1	TIK	PNS
120.	Germania Jeujanan S.Sos,M.Si		S2	TIK	PNS
121.	I Nyoman Dwitana,S.Sos, M.Si	Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	S2	TIK	PNS
122.	Matrhen L. Token, Stp		S1	TIK	PNS
123.	Velia Mokodompit, Se, Mm		S2	TIK	PNS
124.	Husnia, Sp		S1	TIK	PNS
125.	Aleida Ohee, Se		S1	TIK	PNS
126.	Pieter Orgenes Ayomi		S1	TIK	PNS
127.	Hilarius Faut Sarkol		SMA	TIK	PNS
128.	Marcelindo F.G Muray, S,St		S1	TIK	PNS
129.	Benyamin Tebai, S.St		S1	TIK	PNS
130.	Ferdi F. Wattimena, S,St		S1	TIK	PNS
131.	Samijan, S.St		S1	TIK	PNS
132.	Fredy Herhy, ST	Dinas Pendidikan Menengah	S1	TIK	PNS
133.	Indria M. Aprilia, S.Kom		S1	TIK	PNS
134.	Justine, A.Md. T		S1	TIK	HONORER
135.	Petrolena Uamang, S.Ip	Bagian Umum dan Perlengkapan	S1	TIK	PNS
136.	Hery Onawame, S.Ip		S1	TIK	PNS
137.	Yulius Kadang, Se		S1	TIK	PNS
138.	Marsabel Irianto Labok, A.Md		D3	TIK	PNS
139.	Jantje Duwiry, A.Md. Ak		D3	TIK	PNS
140.	Yenni, S.IP		S1	TIK	PNS
141.	Natha Bala, ST		S1	TIK	PNS
142.	Rauda Buamona, SE	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	S1	TIK	PNS
143.	Mur Tanan, A.Md		D3	TIK	PNS
144.	Marion Sumbuk, A.Md		D3	TIK	PNS
145.	Syahril		S1	TIK	PNS
146.	Rosina Faustina Maramku		S1	TIK	PNS
147.	Katerina Ditubun		S1	TIK	PNS
148.	Chatrina Goreti Zoma		S1	TIK	PNS
149.	Eddy M. Napatipulu, ST		S1	TIK	HONORER
150.	Rizky Lumenta		SMA	TIK	HONORER
151.	Ani Lestari		SMA	TIK	HONORER
152.	Mariska Virgia Tahalele		SMA	TIK	HONORER
153.	Ana Yulia Nasir		SMA	TIK	HONORER

2.2.3 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis terhadap kapasitas keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan *smart city*. Melalui analisis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkirakan alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan dan keuangan yang dapat dialokasikan untuk program *smart city*. Selain itu, melalui analisis ini, Pemerintah Daerah juga didorong untuk dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program *smart city*.

2.2.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang implikasi dari pandemi COVID-19 membuat kondisi perekonomian global memburuk dimana selain menelan banyaknya korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar akibat masifnya penularan COVID-19, dampak yang paling dirasakan adalah menurunya perkenomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data buku Mimika Dalam Angka 2021 pada tahun 2020 IPM Kabupaten Mimika menduduki peringkat kedua se-Provinsi Papua sebesar 74,19%. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan adalah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 mengakibatkan menurunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga secara umum dikarenakan menurunnya sebagian besar pendapatan penduduk Kabupaten Mimika dimana PDRB menurut pengeluaran dengan harga konstan tahun dasar 2010 Kabupaten Mimika pada tahun 2020 sebesar RP. 7.712.850,84 juta, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp.8.180.376,34 juta, pengeluaran konsumsi rumah Tangga mengalami penurunan sebesar Rp.467.525,5 ribu. Melalui berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu segera memulihkan kondisi perekonomian masyarakat.

2.2.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel

dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mimika disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, dimana dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2022 kerangka pendanaan yang digunakan menggunakan proyeksi dalam RPJMD di tahun 2022. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2022 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

2.2.3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah Kabupaten Mimika kurun waktu 2014 – 2018 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu tersebut Pendapatan Transfer yang terbesar memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar 85,27 persen diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar rata-rata 13,56 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata sebesar 1,17 persen.

2.3 Infrastruktur

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur daerah dilakukan untuk mengukur kesiapan kondisi infrastruktur daerah yang dikategorikan ke dalam tiga dimensi, yaitu:

- Infrastruktur Fisik;
- Infrastruktur Digital; dan
- Infrastruktur Sosial.

2.3.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dilakukan untuk mengukur kondisi sarana dan prasarana fisik daerah yang menjadi titik tolak dalam pembangunan *smart city* daerah. Dengan mengetahui posisi saat ini dalam hal infrastruktur fisik, maka pemerintah daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi *smart city* daerah. Pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Mimika mutlak perlu dilakukan dengan perencanaan dan desain pendanaan dengan tahapan yang harus disusun matang.

2.3.1.1 Kondisi Jalan

Era Otonomi Daerah membuat Pemerintah Kabupaten Mimika semakin meningkat kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan konsekuensinya makin tinggi beban kerja yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten Mimika serta makin kompleknya permasalahan yang dihadapi, dengan demikian dibutuhkan adanya peningkatan kinerja untuk mengantisipasi bertambahnya urusan yang akan dikelola, termasuk diantaranya adalah pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sementara itu pembangunan sarana prasarana ke-PU-an di Kabupaten Mimika mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, bending dan jaringan irigasi), gedung-gedung pemerintah, penyediaan dan pengelolaan air bersih, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana dan prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati /difungsikan oleh masyarakat sesuai dengan target yang diharapkan secara optimal.

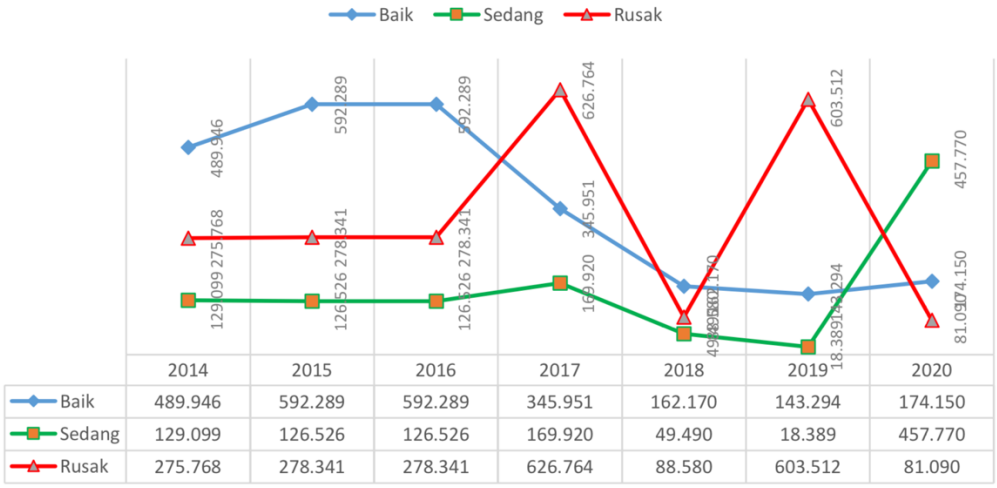

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	489.946	592.289	592.289	345.951	162.170	143.294	174.150
Sedang	129.099	126.526	126.526	169.920	49.490	18.389	457.770
Rusak	275.768	278.341	278.341	626.764	88.580	603.512	81.090

Gambar 2.24 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Mimika (Km) Tahun 2014-2020

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Mimika mengalami flutuasi. Jalan dengan kondisi baik pada tahun 2014 sepanjang 489.946 Km, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 592.289 Km. pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan sebesar 592.289 Km, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 345.951 Km, dan di tahun 2019 menjadi 143,294 km. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang panjangnya masih sangat sedikit. Pada tahun 2014 panjang jalan dengan kondisi baik sepanjang 199.099 Km, kemudian ditahun 2015 sepanjang 126.526 Km, selanjutnya pada tahun 2016 sepanjang 126.526 Km, dan pada tahun 2017 panjang jalan dengan kondisi sedang sepanjang 169.290 Km dan di tahun 2019 menjadi 18,389 Km. sedangkan Panjang jalan dengan kondisi rusak di Kabupaten Mimika pada tahun 2014 sepanjang 275.768 Km, pada tahun 2015 naik meskipun jumlahnya sedikit menjadi 278.341 km, pada tahun 2016 panjang jalannya masih tetap yaitu 278.341 Km. pada tahun 2017 panjang jalan rusak mengalami peningkatan yang sangat menjadi 626.764 Km dan di tahun 2019 menjadi 603,512.

2.3.1.2 Kondisi Transportasi

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi di Kabupaten Mimika dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya. Meningkatnya kebutuhan transportasi sebagai akibat meningkatnya intensitas pergerakan manusia memerlukan kelancaran mobilitas. Kinerja pelaksanaan urusan perhubungan tingkat capaiannya dapat digambarkan melalui sebagai berikut.

Tabel 2.9 Kinerja Layanan Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun 2019

No	Indikator Perhubungan	Satuan	Tahun 2019
1	Jumlah angkutan penumpang umum	Unit	350
2	Persentase penumpang angkutan yang dapat dilayani	%	91,97
3	Rasio trayek	%	24
4	Jumlah uji kir angkutan umum	Orang	3.940
5	Kepemilikan Uji Kir angkutan umum	Orang	5.244
6	Ketersediaan halte pada jalur trayek angkutan umum	Buah	16
7	Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan		
	Rambu Jalan	Buah	150
	Marka Jalan	Meter	500
	Guard Rail	Meter	200

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, 2019

Berdasarkan data diatas dapat disimpulka bahwa kinerja layanan perhubungan Kabupaten Mimika pada tahun 2019 data tentang jumlah angkutan penumpang umum yang berjumlah 350 unit dan memiliki rasio trayek 24% serta terdapat 16 halte pada jalur trayek angkutan umum. Kabupaten Mimika memiliki fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu jalan, marka jalan, dan guard rail. Rambu jalan berjumlah 150,

sedangkan marka jalan 500 meter, dan guard rail 200 meter. Persentase penumpang angkutan yang dilayani memiliki persentase yang cukup tinggi mencapai 91,97%.

Kabupaten Mimika memiliki bebapa sarana penghubung seperti bandara, pelabuhan dan terminal untuk menunjang keterjangkauan antar wilayah. Berikut ni merupakan tabel bandara, pelauhan, dan terminal di Kabupaten Mimika:

Tabel 2.10 Jumlah Bandara, Pelabuhan, Terminal, dan Status Pengelola Kabupaten Mimika Tahun 2019

No	Rincian	Nama Pelabuhan/Bandara/Terminal		Status Pengelola
1	**Jumlah Bandar Udara**			
		1	Mozes Kilangin	UPBU
		2	Kokonao	UPT Dirjen HUBUD
		3	Agimura	UPT Dirjen HUBUD
		4	Potowaiburu	PEMDA
		5	Tainga/Mufu	PEMDA
		6	Alama	PEMDA
		7	Jila	PEMDA
		8	Jita	PEMDA
		9	Kapiraya	PEMDA
		10	Arwanop	PT. FI
2	**Jumlah Pelabuhan**			
		1	Pelabuhan Rakyat Paumako	PEMDA
		2	PT. Indra Lintas Wisata	SWASTA
		3	Pelabuhan Perikanan	PEMDA
		4	Pelabuhan Jita	PEMDA
		5	Pelabuhan Kapiraya	PEMDA
		6	Pelabuhan Kokonao	PEMDA
		7	Pelabuhan Agimura	PEMDA
		8	Pelabuhan Potowaiburu	PEMDA
3	**Jumlah Terminal**			
		1	Terminal Tipe C	PEMDA

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, 2019

Berdasarkan tabel diatas untuk meningkatkan integrasi antar wilayah Kabupaten Mimika Memiliki 10 bandar udar yang masing masing dimiliki oleh beberapa pengelola. UPBU memiliki 1 (satu) bandar udara yaitu Bandar udara Mozes Kilangin. Selanjutnya UPT Dirjen HUBUD memiliki 2 (dua) bandar udara yaitu Bandar Udara Kokonao dan Bandar Udara Agimura. Sedangkan Pemerintah daerah memiliki 6 (enam) bandar udara yaitu Bandara Potowaiburu, Tainga/Mufu, Alama, Jila, Jita, dan Kapiraya. Sedngakan Bandara Arwanop dimiliki oleh PT. FI. Pelabuhan di Kabupaten Mimika hamper semua dikelola oleh Pemerintah daerah. Hanya satu pelabuhan yang dikelola oleh swasta yaitu Pelabuhan PT. Indra Lintas Wisata Karena Pelabuhan ini adalah pelabuhan Khusus Untuk BBM. Kabupaten Mimika hanya memiliki 1 (satu) terminal yang berstatus Tipe C dan terminal ini dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

2.3.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program *smart city*, mengingat di dalam konsep *smart city*, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari *smart city*.

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Sampai dengan akhir tahun 2017, tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebanyak 1unit. Sedangkan tahun 2018 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebanyak 1 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kabupaten Mimika adalah 3 unit. Selain menggunakan menara dan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel 2.11 Jaringan Komunikasi Kabupaten Mimika Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Menara Tower (unit)	-	1	-
2	Alat Komunikasi (HT)	-	-	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, 2019

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat ***http://www.mimikakab.go.id.*** Selain halaman utama, juga terdapat 59 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kabupaten Mimika juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Berikutnya, menurut data yang didapat berdasarkan Bimbingan Teknis pertama pada bulan Mei 2023, didapat informasi mengenai jenis infrastruktur digital dan jumlah yang terdapat di Kabupaten Mimika, seperti berikut.

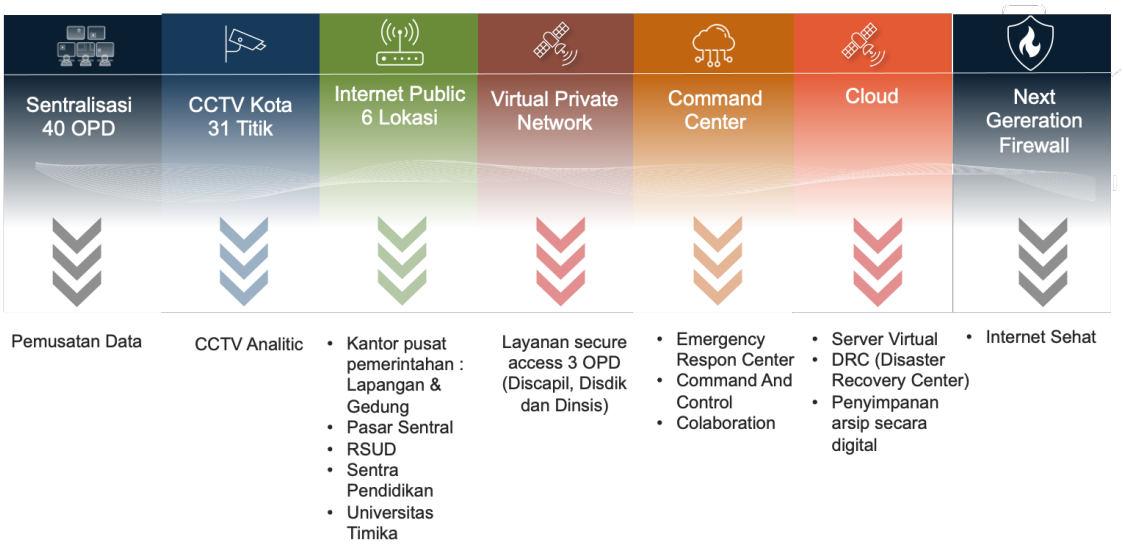

Gambar 2.25 Infrastrukur Digital Kabupaten Mimika Tahun 2023

Sumber: Diskominfo Kabupatem Mimika, 2023

Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun infrastruktur-infrastruktur digital untuk menunjang keberlangsungan Mimika Smart City, diantaranya yaitu adanya sentralisasi pada 40 OPD berupa perumusan data, sebaran kamera pengawaas *(CCTV)* di 31 titik, Internet public di 6 lokasi, virtual private network yang berada di 3 OPD (Discapil, Disdik, dan Dinsos), Command Center, Cloud, serta Next Generation Firewall.

Kemudia infrastruktur digital juga dilihat dari kondisi keberadaan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui OPD terkait, sebagai berikut.

Tabel 2.12 Aplikasi Kabupaten Mimika Tahun 2023

NO	OPD	APLIKASI	LINK APLIKASI	DEVELOPER	KET
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	OSS	http://www.OSS.go.id/	Kementrian BKPM	Sistem perizinan online yang berbasis resiko
2	DP3PKB	SIMFONI	http://www.kekerasan.kemenpppa.go.id/	BKKBN	Sistem informasi perlindungan perempuan dan anak
		SIGA BKKBN	http://www.newsiga.bkkbn.go.id/		Informasi data KB
		ELSIMIL BKKBN	http://www.elsimil.bkkbn.go.id/		Laporan data PLKB
		SIRIKA BKKBN	http://www.sirika.bkkbn.go.id/		Laporan obat dan alat kontrasepsi
3	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	LPSE	http://www.LPSE.mimikakab.go.id/	LKPP	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik
		KRISNA	http://krisna.systems/	Kemendagri	Pengajuan Dana DAK
		OMSPAN	http://www.spanint.kemenkeu.go.id/	Kemenkeu	Progress Dana DAK
		SIPDJD	http://www.sipdjd.binamarga.pu.go.id/	Kemenkeu PUPR	Sistem pengolahan Database Jalan Daerah
		EMONDAK ONLINE	http://www.emondak.pu.go.id/		Monitoring dana alokasi khusus kementrian PUPR
		E-MONITORING PU	http://www.emonitoring.pu.go.id/		Integrasi monitoring elektronik kementrian PUPR

NO	OPD	APLIKASI	LINK APLIKASI	DEVELOPER	KET
		SIMANTU	http://www.simantu.pu.go.id/		Sistem Manajemen Pengetahuan terkait bidang PUPR
		SIMBG	http://www.simbg.pu.go.id/		Sistem informasi bangunan gedung
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	LAPOR AKAIMENO	http://www.lapor.go.id/	Kemendagri	Layanan aspirasi dan pengaduan online
5	BKSDM	SAPK	http://www.sapk.bkn.go.id/	Kementrian	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
		SIASN	http://www.siasn.bkn.go.id/		Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
6	DISDUKCAPIL	SIAK		Direktur Jendral (DIRJEN)	Sistem Digitalisai Pelayanan DUKCAPIL
7	DINAS SOSIAL	CEKBANSOS	http://www.cekbansos.kemensos.go.id/	Kementrian	Pengecekan Bantuan Sosial
8	BAGIAN HUKUM	JDIH	http://www.jdih.mimikakab.go.id/	HUKUM	Informasi Produk hukum
9	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	SILPPD	http://www.elppd.kemendagri.go.id/	Kemendagri	Sistem Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah
		SPM	http://www.spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda	Kemendagri Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri	Standar Pelayanan Minimal
10	DISPERINDAG	SIGM	http://www.geraimaritim.kemendag.go.id	Kementrian	Tol Laut Kementrian Perdagangan

NO	OPD	APLIKASI	LINK APLIKASI	DEVELOPER	KET
		SP2KP	http://www.ews.kemendag.go.id		Sistem Pemantauan harga bahan pokok
		E-SKA	http://www.e-ska.kemendag.go.id/		Terkait Ekspor
		E-PAYMENT	http://www.e-from.kemendag.go.id/		Formulir Ekspor
		INSW	http://insw.go.id/		Verifikasi Ekspor
11	DINAS KOPERASI	ODS	http://www.cag/penkop.go.id/	Kementrian	Online Data Sistem
12	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	LPSE	http://lpse.mimikakab.go.id/	LKPP	
		SIRUP	http://sirup.lkpp.go.id/		
		SIRAP	http://sirap.lkpp.go.id/		
13	DINAS PERIKANAN	KUSUKA	http://www.kkp.go.id/	Dirjen Tangkap	Kartu Nelayan
14	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SIBARU PUPR	http://www.sibaru.perumahan.pu.go.id/	Kementrian PUPR	Permohonan Perumahan

NO	OPD	APLIKASI	LINK APLIKASI	DEVELOPER	KET
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SIMDA KEUANGAN	-	BPKP	
		SIMDA BMD	-		
		SIMGAJI TASPEN	-	TASPEN	
16	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SIPD	-		
		SIMDA BMD	-		
		E-PLANNING	-		
		BUJETING	-		
17	INSPEKTORAT	SIPD	-		
		SIMDA	-		
		SI BIJAK	-		
		JAGA.ID	-	KPK	
		LHKPN	-		
		EDUPAK	-		

NO	OPD	APLIKASI	LINK APLIKASI	DEVELOPER	KET
		OMSPAN	-		
		ELPPD	-	Kemendagri	
		SIRUP	-		
		E-MONEV	-		
18	BAGIAN ORGANISASI	SIOLA	http://www.ula.kemendagri.go.id/	Kemendagri	Sistem Pelayanan Online Pelayanan Publik
		e-SAKIP REVIU	http://www.esr.menpan.go.id/	KemenpanRB	Peningkatan Kualitas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		SP4N LAPOR!	http://www.lapor.go.id/	KemenpanRB	Layanan Pengaduan Publik
		LHKPN	http://www.lhkpn.kpk.go.id/	KPK	Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara
		MCP KORSUPGAH	http://www.mcp.korsupgah.kpk.go.id/		Monitoring Capaian Kerja Program Pencegahan Korupsi

Sumber: Diskominfo Kabupaten Mimika, 2023

2.3.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial di daerah dilakukan untuk mengukur kondisi kesiapan infrastruktur di daerah yang terkait dengan Pendidikan, Kesehatan, dll.

2.3.3.1 Fasilitas Pendidikan

Pada umumnya sarana pendidikan kurang tersebar merata ke semua Distrik. Kebanyakan sarana pendidikan terbanyak di pusat Kota Timika (Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana). Kedua distrik tersebut merupakan pusat perekonomian, pemerintahan, dan pusat jasa, kedepan perlu dilakukan peningkatan penyebaran sarana pendidikan yang merata sesuai pertumbuhan penduduk. Untuk diketahui bahwa dalam APBD tahunan, pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk operasional dan pengembangan gedung sentra pendidikan, penambahan ruang kelas TK, SD, SMP, SMA/SMK. Pembangunan gedung kantor dan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah, penambahan ruang guru, pengadaan meubelair sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, rehabilitasi lapangan upacara SD, SMP, SMA/SMK. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah dan ruang kelas TK, SD, SMP, SMA/SMK.

Fasilitas pendidikan Kabupaten Mimika belum tersebar merata ke semua distrik. Fasilitas pendidikan masih terpusat di Distrik Mimika Baru. Pada tahun 2020, jumlah sekolah terbanyak berada di Distrik Mimika Baru baik dari tingkat Pendidikan TK yaitu sebanyak 47 unit, SD 41 Unit, SMP 24 Unit, SMA 12 Unit, dan SMK 18 Unit. Dibawah ini merupakan Gambar terkait jumlah sekolah TK,SD,SMP,SMA, dan SMK di masing masing distrik.

Tabel 2.13 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Masing-Masing Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020

No	Distrik	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Agimuga	1	4	1	0	0
2	Amar	2	2	1	0	0
3	Alama	0	1	0	0	0

No	Distrik	TK	SD	SMP	SMA	SMK
4	Hoya	0	1	3	0	0
5	Iwaka	4	5	2	1	0
6	Jila	0	2	1	0	0
7	Jita	1	3	1	0	0
8	Kuala Kencana	17	12	6	0	2
9	Kwamki Narama	2	3	1	0	0
10	Mimika Barat	1	3	1	1	0
11	Mimika Barat Jauh	0	6	2	0	0
12	Mimika Barat Tengah	0	8	2	0	0
13	Mimika Baru	47	41	24	12	18
14	Mimika Tenqah	1	6	1	0	0
15	Mimika Timur	10	9	9	2	4
16	Mimika Timur Jauh	1	5	2	0	0
17	Tembagapura	2	7	4	0	0
18	Wania	15	16	8	0	0
Kabupaten Mimika		**104**	**134**	**69**	**16**	**24**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

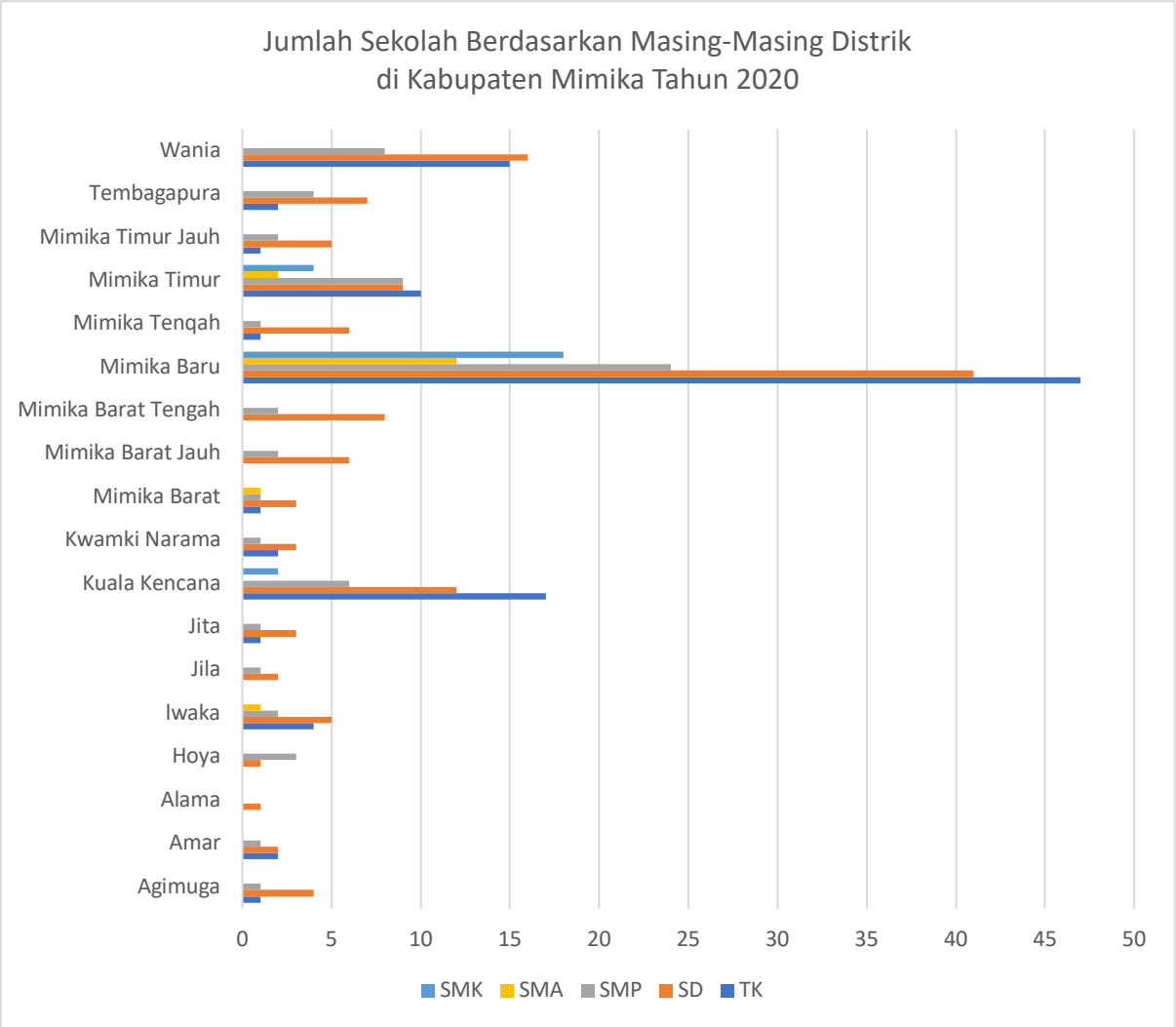

Gambar 2.26 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Masing-Masing Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

Selain pembangunan fisik juga ada kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik berupa pelatihan standar kompetensi, pembinaan kelompok kerja guru dan pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik. Untuk meningkatkan kualitas anak didik kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak usia sekolah, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, pengadaan buku–buku kurikulum dan pengadaan pakaian seragam sekolah. Sedangkan untuk mengatasi anak–anak yang putus sekolah dilaksanakan penyelenggaraan Paket A setara SD, Penyelenggaraan paket B setara SMP, dan penyelenggaraan paket C setara SMA.

2.3.3.2 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas-fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berikut merupakan fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Mimika di masing-masing distrik pada tahun 2020:

Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Masing-Masing Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020

No	Distrik	Rumah Sakit Umum	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
1	Agimuga	0	1	3	1	0
2	Amar	0	1	1	0	0
3	Alama	0	1	2	0	0
4	Hoya	0	1	1	0	0
5	Iwaka	0	1	5	1	0
6	Jila	0	1	0	0	0
7	Jita	0	1	3	0	0
8	Kuala Kencana	0	2	3	3	0
9	Kwamki Narama	0	1	1	0	0
10	Mimika Barat	0	1	1	0	0
11	Mimika Barat Jauh	0	2	6	0	0
12	Mimika Barat Tengah	0	1	6	0	0
13	Mimika Baru	3	3	2	13	0
14	Mimika Tenqah	0	1	4	0	0
15	Mimika Timur	0	1	1	0	0
16	Mimika Timur Jauh	0	1	2	0	0
17	Tembagapura	1	2	4	1	0
18	Wania	1	1	2	3	0
Kabupaten Mimika		**5**	**23**	**47**	**22**	**0**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

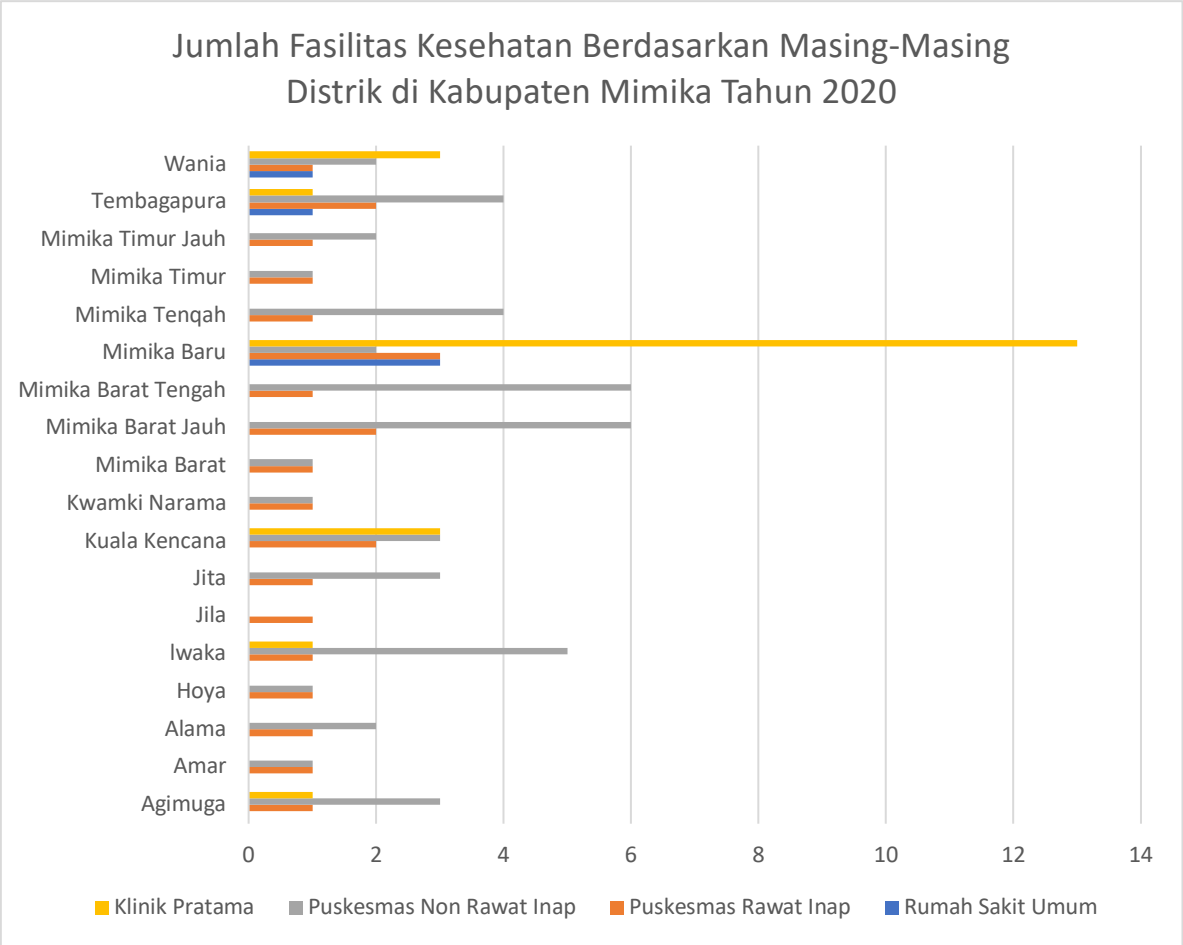

Gambar 2.27 Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Masing-Masing Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2023

Pada tahun 2020, terdapat fasilitas kesehatan Kabupaten Mimika meliputi Rumah Sakit Umum, Puskesemas Rawat Inap dan Non Rawat Inap, dan Klinik Pratama. Total jumlah fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mimika terbanyak yaitu Puskesmas Non Rawat Inap sebanyak 47 unit. Kemudian Fasilitas Rumah Sakit Umum total di Kabupaten Mimika sebanyak 5 unit, terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 3 rumah sakit umum.

2.4 Suprastruktur

Suprastruktur atau aspek kelembagaan dan kebijakan di daerah merupakan suatu perangkat yang akan menjamin lancar tidak pelaksanaan *smart city*, khususnya *smart city-smart city* yang dimulai dan didorong dari inisiatif pemerintah daerah seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi suprastruktur atau kebijakan dan kelembagaan dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu:

- Kesiapan Kebijakan Daerah
- Kesiapan Kelembagaan Daerah
- Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

2.4.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisitatif *smart city* yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, analisis terhadap aspek kebijakan di daerah perlu dilakukan.

Namun kondisi saat ini di Kabupaten Mimika belum adanya kebijakan yang dapat mendukung dilaksanakannya *Smart City,* baik itu berupa peraturan daerah, peraturan bupati, surat edaran, dll.

2.4.2 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan smart city di daerah dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah daerah. Di dalam aspek kelembagaan ini, nantinya akan diatur pembagian peran dalam pelaksanaan smart city. Oleh karena itu, aspek kelembagaan menjadi salah satu bagian dari analisis kesiapan smart city di daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 555/409 tentang Dewan Smart City Kabupaten Mimika, pada tanggal 13 Juli 2017 telah dibentuk Dewan Smart City Kabupaten Mimika dengan tugas sebagai berikut.

a. Merumuskan kebijakan umum, rencana kerja dan rencana strategis dalam penyusunan draf awal Rencana Pengembangan *Smart City* (RPKC) dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal
b. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi/vertikal dan dunia usaha terkait dengan pengembangan Mimika *Smart City*
c. Memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah kebijakan pengembangan Mimika *Smart City*
d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan Mimika *Smart City*

2.4.3 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Di samping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan *smart city* di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *smart city* karena di dalam sebuah *smart city*, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *smart city.*

Di Kabupaten Mimika hingga saat ini sebanyak 51 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mimika. Sebagian besar Ormas yang terdaftar berbentuk paguyuban atau organisasi berdasarkan asal daerah.

2.5 Culture

Kabupaten Mimika asalnya dari suatu kecamatan atau distrik Timika. Saat ini secara sosial dan ekonomi berkembang dengan pesat berkat adanya sebuah perusahaan

pertambangan internasional. Keberadaan perusahaan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, terutama penduduk asli dan penduduk pendatang. Kedua kelompok masyarakat tersebut masing-masing memiliki ketahanan sosial dalam hidup berdampingan. Kajian bertujuan untuk memahami tentang ketahanan sosial masyarakatnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat dan pengamatan lapangan dalam kehidupan sehari-hari di kota Timiki. Hasil kajian menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari masingmasing mempertahankan ketahanan sosial sosialnya. Namun, dalam keadaan tertentu ketahanan sosial masyarakat terasa renggang dan berakibat munculnya perselisihan atau konflik sosial yang bersifat laten. Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam masyarakat yang ingin hidup berdampingan dengan cara saling menyesuaikan diri.

Fakta menunjukkan penduduk terdiri dari penduduk asli atau penduduk setempat dan penduduk pendatang. Penduduk asli terdiri dari dua kelompok besar. Pertama, kelompok masyarakat dari daerah pegunungan yaitu suku bangsa Amungme dan lima suku bangsa terdekatnya seperti Mee atau Ekari, Dani, Damal, Duga dan Moni. Tingkah laku dan watak suku bangsa Amungme identik dengan alam pegunungan (amung), sebagai penakluk dan pewaris alam. Kerasnya pegunungan menjadikan mereka keras, tidak mengenal kompromi, fair dan gentlemen dengan selalu melakukan tindakan preventif dalam semua kegiatannya (Anonim, 2006: 6 - 8).

Kedua, suku bangsa Kamoro sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di pantai selatan Papua. Merekalah yang mempunyai hak ulayat atas tanah rawa dan pantai serta aliran sungai di sekitarnya. Mata pencaharian pokoknya berburu dan meramu. Permukiman tidak menetap, sehingga kehidupannya tergantung alam seperti ketersediaan sagu, babi, ikan, udang, kepiting dan lain-lain. Suku bangsa Kamoro merasa berkecil hati ketika mulai mengikuti keberadaan hidup yang semi nomanden, menempatkan populasi agar dapat dihitung, disekolahkan, dikenakan pajak dan dikontrol. Suku bangsa ini selama tiga dekade telah memiliki hubungan dagang terbatas dengan suku bangsa lain yang berasal dari wilayah Indonesia bagian barat seiring dengan keberadaan pemerintah Belanda dan penyebaran agama Nasrani.

BAB 3
Analisis Gap Strategi Pembangunan *Smart City*

3.1 Analisis GAP

Analisis Gap atau kesenjangan secara umum dapat diartikan sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengindentifikasi kesenjangan antara keadaan saat ini ("As Is") dan keadaan pada masa akan datang ("To Be" atau "Future State"). Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai atau ingin terjadi yang dapat dilihat sebagai hasil dari analisis masa depan, dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan daerah.

Berikut adalah hasil survei analisis kesenjangan yang dilakukan di Bimtek Smart City Kabupaten Mimika.

Tabel 3.1 Alat Analisis Kesenjangan Smart City Kabupaten Mimika

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
1	Smart Governance	Bag. Umum dan Perlengkapan	Pengarsipan	Sudah berjalan dengan baik		
2	Smart Governance	Bag. Umum dan Perlengkapan	Penomoran Surat	Sudah berjalan dengan baik		
3	Smart Governance	Bag. Umum dan Perlengkapan	Surat Keluar	Sudah berjalan dengan baik		
4	Smart Governance	Bag. Umum dan Perlengkapan	Surat Masuk	Sudah berjalan dengan baik		
5	Smart Governance	Bagian Humas & Protokoler		Semua berjalan baik		Publikasikan secara lebih terbuka lagi untuk menciptakan image tentang Timika yang lebih baik lagi
6	Smart Governance	Bagian Kesra Setda	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Berjalan dengan baik		
7	Smart Governance	Bagian Kesra Setda	Pembangunan Desa Ke Kampung	Berjalan dengan baik		

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
8	Smart Governance	Bagian Kesra Setda	Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Dan Rumah Ibadah : A. Gereja B. Masjid	Berjalan dengan baik		
9	Smart Governance	Bagian Ortal	IKU		Belum berjalan	Perlu sosialisasi serta disusun oleh masing-masing SKPD , agar dapat menetapkan indikator kerja dari SKPD tersebut.
10	Smart Governance	Bagian Ortal	Lakip	Sudah berjalan	Belum berjalan baik	Perlu sosialisasi tentang tata cara penyusunan Lakip, sehingga hasil kinerja dan sistem akuntabilitas kabupaten dapat terukur dengan baik.
11	Smart Governance	Bagian Ortal	Perjanjian Kinerja		Belum berjalan baik	Perlu disosialisasikan dan diberlakukan pada setiap SKPD, sehingga apa yang menjadi target program SKPD dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
12	Smart Governance	Bagian Ortal	Tata Naskah	Sudah berjalan		Masih perlu disosialisasikan kembali, karena masih banyak terjadi kekeliruan dalam menyusun naskah.

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
13	Smart Governance	Bagian Ortal	Tupoksi, Anjab	Sudah berjalan		Perlu diinformasikan kembali ke SKPD dan publik tentang tupoksi SKPD, begitu pula anjab perlu disosialisasikan dan dievaluasi apakah setiap jabatan sudah sesuai dengan profil pegawai.
14	Smart Governance	Bagian Pemerintahan Kampung	Penyediaan Sarana Prasarana Kebutuhan Jasa untuk Masyarakat Pedalaman	Transportasi laut, misal Jonson sudah ada, walaupun belum memadai (kurang)	Pemancar untuk jaringan komunikasi	Kalau bisa diadakan juga untuk masyarakat pedalaman.
15	Smart Governance	Bagian Pemerintahan Kampung	Tata Kelola Birokrasi / Kepeminpinan	Pemilihan /penetapan kepala RT	Warga belum dapat memahami/mendengar aspirasi dari pimpinan, contoh: mengganti ketua RT sesuka hatinya.	* sering diberikan pelatihan tentang cara berorganisasi * masyarakat sering ketinggalan informasi.
16	Smart Governance	Bappeda	e-Controlling Governance	Belum berjalan	Belum berjalan	Perlu dijalankan dengan baik dan didukung peraturan
17	Smart Governance	Bappeda	Pembangunan sistem (e-Planning)	Sistem sedang dibangun, perangkat sudah ada	Kebijakan belum ada, sosialisasi belum dilakukan, tenaga belum dilatih	Perlu adanya regulasi/perda untuk mengatur pelaksanaan e-Planning
18	Smart Governance	Bappeda	Sistem Pelayanan 1 Atap	Kantor dan sistem ada	Tidak berjalan karena belum diserahkan ke kantor perijinan	Perlu adanya regulasi terkait OPD (Perda)

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
19	Smart Governance	BPKAD	Bidang Anggaran	Anggaran diberikan ke tiap SKPD	Anggaran ke SKPD telah ada pagu sehingga kadang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat di lapangan karena anggaran SKPD yang terbatas	Anggaran ke SKPD disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat setempat dan bila memungkinkan ada akses langsung ke masyarakat untuk melihat kebutuhan prioritas tersebut
20	Smart Governance	BPKAD	Bidang Aset Daerah	Analisis kebutuhan dari SKPD khususnya kendaraan dinas	Distribusi kendaraan dinas ke SKPD tidak sesuai analisis kebutuhan karena ditentukan oleh kebijakan pimpinan	Perlu ada sistem tentang analisis kebutuhan dengan distribusi kendaraan tersebut agar tidak ada yang mempunyai kendaraan dinas lebih dari satu sedang yang lain kekurangan
21	Smart Governance	BPKAD	Bidang Pelaporan dan Pembukuan	Pelaporan penggunaan dana tetap dari SKPD bersangkutan sesuai dana yang diberikan	Pelaporan tidak tepat waktu dan bukti-bukti pendukung masih kurang sehingga pencairan dana Triwulan selanjutnya terlambat	Sebaiknya bukti-bukti pendukung dimasukkan terlebih dahulu, kemudian dibayarkan sesuai jumlah bukti tersebut atau pelaporan bendahara secara online sehingga pelaporan mudah terkontrol

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
22	Smart Governance	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelaksanaan Operasi Yustisi (Sweeping KTP)	Belum berjalan	Koordinasi antar Tim dan Dinas terkait masih kurang	Ada kesadaran dari masing-masing anggota tim untuk mau melaksanakan tugas ini dengan baik
23	Smart Governance	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelatihan SIAK	Tenaga operator ada tapi sangat kurang	Pelaksanaan pencetakan KTP, KK dan akte lahir di Distrik pedalaman belum berjalan	Mengadakan Pelatihan SIAK
24	Smart Governance	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Sudah berjalan	Pelayanan di luar kota (distrik-distrik terpencil) karena alat masih terbatas dan jaringan internet tidak ada	Pengadaan alat dan jaringan internet di distrik-distrik pedalaman
25	Smart Governance	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Alat Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK)	Sudah berjalan hanya alat terbatas	Kurangnya anggaran untuk penambahan alat aplikasi SIAK	Butuh penambahan alat Aplikasi SIAK
26	Smart Governance	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sosialisasi Perundang-Undangan tentang Kependudukan	Sudah berjalan di beberapa distrik	Sosialisasi di semua Distrik tentang pentingnya penertiban data kependudukan	Sosialisasi dilakukan di kantor dan media sosial

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
27	Smart Governance	Distrik	Bidang umum dan Kepegawaian	Pengelolaan surat masuk dan surat keluar berjalan dengan baik	Penataan dan pengurusan administrasi pegawai kurang berjalan dengan baik	Memberikan pelatihan khusus bagi bidang kepegawaian
28	Smart Governance	Distrik	Pemerintahan	Pengurusan surat tanah sudah berjalan dengan baik	Waktu penyelesaian lambat karena pimpinan tidak ada di tempat	Tingkatkan kehadiran
29	Smart Governance	Distrik	Pengelolaan Keuangan	Berjalan dengan baik	Koordinasinya kurang	Tingkatkan kerjasama
30	Smart Governance	Distrik	Pengendalian Program		Tidak berjalan dengan baik	Tingkat koordinasi antara pimpinan dan bawahan ditingkatkan
31	Smart Governance	Kantor Perijinan	Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Peralatan seperti komputer secara online sudah siap bahkan SDM-nya, sudah siap untuk melayani	Selama ini pengurusan perijinan belum dilimpahkan ke kantor perijinan terpadu dan penanaman modal. Kantor sudah berdiri ± 4 tahun, tetapi belum satupun yang dapat ditangani oleh kantor, karena belum ada pelimpahan kewenangan.	Adanya pelimpahan kewenangan / kebijakan untuk melimpahkan ke kantor perijinan dan penanaman modal terpadu.
32	Smart Governance		Data Pegawai	Data sudah diinput	Terkendala Jaringan	Penyediaan Jaringan

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
33	Smart Governance		HO (Izin Gangguan)	Proses perizinan sudah berjalan dengan baik	* Proses verifikasi berkas usaha- usaha * Keterlambatan mengeluarkan izin usaha	Membutuhkan aplikasi untuk menyimpan data base setiap usaha yang mengurus izin gangguan
34	Smart Governance		Kegiatan Pengadaan Tanah	Bekerjasama dengan Dinas terkait yang hendak merencanakan pembangunan untuk kepentingan umum	Kurangnya perencanaan awal SKPD yang hendak merencanakan pembangunan untuk kepentingan Umum dan komitmen pemilik tanah didalam membuat kesepakatan dengan pemerintah. Serta sistem sistem kearsipan data data yang belum baik	Perlunya informasi yang baik kepada SKPD perencana penyediaan tanah untuk pembangunan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan hasil dan memiliki sistem kearsipan aset tanah milik Pemerintah Daerah yang baik dan memadai.
35	Smart Governance		Kegiatan Sistem Informasi Hukum (SISKUM)	Bekerja sama dengan Kemendagri RI, dan sudah terdata Produk Hukum dari Tahun 1945 - 2014, dan produk Hukum Daerah Kab. Mimika.	* Kurangnya SDM pada Operator SISKUM * Kurang koneksi Internet pada Bag. Hukum	* Perbaikan koneksi Internet pada Bag. Hukum * Perbaikan server komputer * Pelatihan SDM Operator Komputer.
36	Smart Governance		Monitoring / Pendataan Mahasiswa/i di 14 kota study	Sudah berjalan dengan baik	Adanya mahasiswa/i yang sudah tidak aktif sebagai mahasiswa/i tapi masih terdaftar di masing-masing kota study	Mengkoordinasi langsung dengan pihak universitas di setiap kota study

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
37	Smart Governance		Pembangunan Asrama Mahasiswa di 5 kota study	Sudah berjalan dengan baik	Sebagian dari mahasiswa/i masih banyak yang tinggal di kontrakan	Mengkoordinasi dengan Kordinator wilayah di 5 kota study
38	Smart Governance		Pemindahan PKL dari Pasar Lama	Pengawasan setiap hari sudah dilakukan agar PKL tidak kembali beraktivitas/berjualan di Pasar Lama, dan berjualan di sepanjang bahu jalan	Tidak tersedianya tempat/lapak untuk berjualan di tempat yang baru	
39	Smart Governance		Penyaluran Bantuan Beasiswa untuk 14 kota study	Sudah berjalan dengan baik	Terdapat kesalahan di rekening setiap mahasiswa di setiap kota study	Mengoreksi setiap rekening mahasiswa
40	Smart Governance		Perbaikan pelayanan kepada masyarakat di distrik Mimika Barat			
41	Smart Governance		Program Pemanfaatan Potensi sumber daya hutan	Pelatihan pemanfaatan buah mangrove	Belum ada pihak atau wadah untuk pengembangan, menampung produk serta pasarnya.	

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
42	Smart Governance		SIL (Sistem Informasi Lingkungan)	Sudah berjalan pembuatan peta - peta yang berhubungan dengan lingkungan	Fasilitas yang menunjang (pembuatan website untuk mempublikasikan data-data yang berkaitan dengan lingkungan kepada masyarakat umum)	Sarana domain website sub kabupaten yang belum berjalan.
43	Smart Governance		Tapal Batas Wilayah		Kurangnya koordinasi dan dana tidak dianggarkan	Perlunya anggaran dana supaya program bisa berjalan, karena ada beberapa kabupaten pemekaran baru yang telah mengambil batas wilayah Kab. Mimika
44	Smart Branding		Penataan kawasan pariwisata	Pendataan objek wisata, hotel, restoran dan travel agent	Pembuatan toilet/ruang ganti, pembuatan pergola/tempat santai, pembuatan jalan setapak	Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pariwisata (melalui seminar)
45	Smart Branding		Promosi wisata		Promosi wisata belum berjalan dengan baik	Membuat website untuk pariwisata Kab. Mimika
46	Smart Economy		Ekonomi Kreatif (Ukiran, anyaman noken)		Belum berjalan dengan baik	Belum ada wadah (tempat untuk menampung hasil usaha UKM)
47	Smart Economy		Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Sejahetra	Pembagian paket berupa alat tangkap kepada masyarakat nelayan	Pengambilan data nelayan untuk dicetak kartu nelayan	Perbaikan SDM

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
			(GERBANG EMAS)			
48	Smart Economy		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembagian paket berupa alat tangkap dan alat transportasi			
49	Smart Economy		Monitoring rutin pelaku usaha industri kecil maupun menengah	Baik (data yang ada sudah 350 UKM yang terdaftar)		
50	Smart Economy		Pelatihan noken dari kulit kayu ganemo dan rumput tema	Berjalan baik dengan jumlah peserta 30 orang		Kegiatannya harus diteruskan tiap tahun dan hasilnya dapat dipromosikan lewat media online
51	Smart Economy		Pelayanan kesehatan hewan (PUSKESWAN)	Pengobatan pelayanan kesehatan hewan	Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang adanya klinik kesehatan hewan pada dinas peternakan	Menginformasikan melalui media cetak maupun elektronik

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
52	Smart Economy		Pembangunan pasar mama-mama Papua	Kurang bagus		Inisiatif perbaikan, menata cara pelaksanaan penjualan dan menambah pembangunan gedung pasar mama-mama Papua
53	Smart Economy		Pemberian pelatihan kepada pelaku usaha dan pelaku utama			Memberikan kemudahan kepada masyarakat nelayan untuk mendistribusikan hasil tangkapannya untuk dipasarkan
54	Smart Economy		Pengembangan ternak	Ayam petelur, ayam pedaging, ternak babi	Harga penjualan yang bervariasi. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan ternak	Kurangnya kontrol dari instansi terkait untuk menentukan harga penjualan yang sesuai harga pasar
55	Smart Economy		Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pendampingan dan penyuluhan bagi petani	Sudah berjalan tapi belum maksimal karena SDM yang masih rendah	Perlu adanya pelatihan, magang dan bimtek bagi petani dan petugas
56	Smart Economy		Peningkatan ketahanan pangan	Perluasan areal tanam dan peningkatan komoditi	Iklim yang sangat mempengaruhi dari pola tanam	
57	Smart Economy		Peningkatan klaster industri menengah	Belum berjalan dengan baik		

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
58	Smart Economy		Peningkatan produksi, produktivitas pertanian/ perkebunan	Sudah berjalan dengan baik dimulai dari tanam sampai panen	Pemasaran yang perlu perhatian karena transportasi yang belum maksimal di daerah pesisir dan daerah pegunungan	Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini dinas koperasi dan ekonomi kratif untuk membantu menampung hasil panen.
59	Smart Economy		Program pengembangan ekonomi pedesaan	1.Program administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana operator sampai triwulan kedua. 2. Pengembangan cadangan pangan daerah. 3. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa		Perkembangan perekonomian Kab. Mimika ke depannya lebih baik dan lebih maju, pemerintah maupun swasta berperan aktif menanggulangi masyarakat yang kurang mampu
60	Smart Economy		Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan)			
61	Smart Economy		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Belum berjalan baik		

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
62	Smart Living	Dinas Kesehatan	* Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita & Bumil * Sarana & Prasarana Kesehatan	*Penyuluhan * Pemulihan (Gizi Kurang & Gizi Buruk) * Sistem rujukan pasien	* Alat Peraga * Follow Up Pasien * Sistem Informasi Komunikasi	
63	Smart Living	Dishub Darat / ASDP	* Info dan pemesanan tiket keberangkatan dengan menggunakan kapal penyeberangan KMP Kokonao	* Masyarakat sudah bisa menikmati layanan dari kapal KMP Kokonao ke daerah pedalaman	* Informasi tentang jadwal keberangkatan masih dari mulut ke mulut, belum secara online	* Ada wadah informasi yang bisa jadi rujukan bagi calon penumpang tentang kepastian waktu keberangkatan kapal
64	Smart Living	Dishub Udara	* Pengadaan penerbangan perintis ke daerah terpencil	* Dengan adanya penerbangan perintis, masyarakat di pedalaman bisa menggunakan transportasi udara	* Masih terkendala masyarakat untuk memperoleh layanan penerbangan seperti sulitnya mendapat tiket karena pihak airlines menyerahkan proses penjualan tiket ke pihak ketiga	* Sebaiknya penjualan tiket langsung oleh airlines

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
65	Smart Living	Distrik Amar	* Penataan Kampung * Peningkatan sarana transportasi & komunikasi * Peningkatan pelayanan kesehatan	* Tata ruang wilayah * Pembangunan jembatan distrik * Tersedianya pustu	* Tapal batas wilayah * Alat komunikasi & Transportasi * Prasarana kesehatan	*Pembuatan tapal batas wilayah *Perbanyak sarana & prasarana transportasi * Pembangunan pemancar / satelit komunikasi * Perbaikan sarana & prasarana yang ada di pustu * Penambahan tenaga medis * Pengalihan dari pustu ke puskesmas agar tenaga ahli (dokter) lebih maksimal
66	Smart Living	Distrik Iwaka	* Pelayanan perizinan terpadu * Penanggulangan Banjir *Pembangunan rumah sehat bagi masyarakat * Peningkatan pembangunan fisik	* Normalisasi sungai * Bantuan perumahan dari pusat * Jalan penghubung antar kampung	* Pembangunan saluran pengairan secara baik * Bantuan perumahan dari APBD * Renovasi / perbaikan badan jalan	* Diharapkan dapat berjalan dengan baik * Meningkatkan upaya mengantisipasi banjir secara berkelanjutan * Diberikan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat tidak mampu * Meningkatkan pembangunan jalan & jembatan

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
67	Smart Living	Distrik Tembagapura	* Harmonisasi tata ruang wilayah * Mewujudkan prasarana kesehatan * Menjamin ketersediaan sarana transportasi	* Sudah berjalan dengan baik tapi tidak sampai 100% karena geografis sulit dijangkau * Sudah berjalan dengan baik namun petugas kesehatan tidak di tempat tugas, karena transportasinya sulit dijangkau * Sudah berjalan dengan baik tapi tidak tersedia transportasi umum	* Belum berjalan baik	
68	Smart Living	RSUD	* Sarana & Prasarana yang menunjang informasi makanan sehat * Pertolongan pertama pada pasien kecelakaan (Pra Hospital)	* Penyuluhan - penyuluhan di RS * Petugas / Masyarakat mengantar ke RS	* Klinik gizi (Aplikasi) *Koordinasi ke UGD / Sarana Prasarana terdekat untuk life saving pasien	* Koordinasi dengan Dinkes, PKM, & Klinik - klinik swasta *Buat aplikasi penghubung & informasi penting dalam P3K

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
69	Smart Society	Badan Pemberdayaan Masyarakat	* Pengelolaan dana desa & alokasi dana desa * Lomba kebersihan kampung tingkat distrik * Lomba sayembara teknologi tepat guna tingkat distrik * Kegiatan kelompok tani & nelayan	* Dana disalurkan ke kampung / desa dengan baik 133 kampung, 18 distrik * Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan di 133 kampung, 18 distrik * Pemberian bantuan mesin kelapa parut & mesin pengolahan sagu * Pembuatan abon ikan & ikan asin untuk kelompok nelayan dan menjadi sumber penghasilan masyarakat	* Aparat kampung belum menguasai sistem aplikasi keuangan desa, pelaporan terhambat * Setiap rumah tangga belum memiliki MCK masih lebih suka semak - semak * Penggunaan alat teknologi yang belum dikuasai masyarakat * Penguasaan mesin pengolahan sagu belum dikuasai oleh kelompok tani sehingga masih menggunakan cara tradisional	* Aparat kampung diharapkan menguasai sistem aplikasi keuangan desa *Pelatihan operator secara berkelanjutan *Perlunya membuat MCK di setiap RT *Berikan sosialisasi secara berkelanjutan *Perlu adanya pelatihan pengguna alat pengolahan sagu dan parut kelapa *Perlunya pelatihan kelompok tani

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
70	Smart Society	Dinas Pendidikan Dasar	Data Guru : * NUPTK (Nomor Unik Pendidik & Tenaga Kependidikan) * Data guru honor tidak update * Program PGRI & Data dari Dinas perlu disinkronkan * Kurikulum K13 perlu disosialisasikan dan diimplementasikan * Sistem Dapodik (Data Pokok Pendidik) sudah berjalan dengan baik, sering terkendala dalam hal jaringan dan SDM / User			

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
71	Smart Society	Dinas Pendidikan Menengah	Data Siswa : * Sistem penilaian 3M * Sistem Dapodik (Data Pokok Pendidik) untuk siswa sudah berjalan dengan baik, sering terkendala dalam hal jaringan dan SDM / User			
72	Smart Society	Dinas Pendidikan Menengah	Sekolah : * Fasilitas Pembelajaran (Ruang Belajar, Sarana dan Prasarana yang belum memadai) * Referensi Belajar untuk siswa (Perpustakaan, Visual Room, Lab Internet, dll)			
73	Smart Society		Pengembangan budaya	Belum maksimal	Tidak tersedianya fasilitas pendukung dan sanggar seni dan budaya	Alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas serta menghidupkan kembali sanggar-sanggar seni budaya berbasis kearifan lokal

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
74	Smart Society		Pengembangan SDM	Sosialisasi	Kurangnya pendampingan untuk pengembangan SDM	Penambahan tenaga teknis pada bidang kesehatan hewan
75	Smart Society		Pengembangan sosial	Belum maksimal	Anak-anak kurang mampu/aibon	Alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas rumah penampungan(Rumah singgah)
76	Smart Environment	Dinas ESDM	* Solar Cell * Program pembuatan sumur bor	* Program bantuan kepada masyarakat pesisir / pedalaman tiap tahun berjalan dengan baik	* Program pemeliharaan perbaikan yang kurang berjalan karena tidak tersedia tenaga teknis, anggaran, dan lokasi susah dijangkau	* Perlu penambahan anggaran * Perekrutan tenaga teknis di setiap distrik / kampung
77	Smart Environment	Dinas Tata Kota	* Pembangunan RTH * Pembangunan PJU & Lampu taman * Pengembangan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga * Pengembangan teknologi persampahan	* Menjadikan median jalan menjadi RTH * Terpasangnya PJU di sebagian ruas jalan * Pemilahan sampah di TPA * Sanitary Landfill	* Belum adanya sarana ruang terbuka publik & ruang terbuka ramah anak * Masih banyaknya ruas jalan yang belum terpasang PJU * Belum adanya pemilahan sampah di masing - masing RT * Belum adanya teknologi pengolahan sampah zero waste	*Membangun lebih banyak RTH & RPTRA * Pengadaan PJU *Memberikan bimbingan teknis manajemen sampah ke masyarakat *Memberikan reward (bank sampah) * Melakukan 5 R & Pengadaan incinerator
78	Smart Environment		Penatausahaan hasil hutan			

No	Dimensi	OPD	Program Kerja	What Works! (Yang Sudah Berjalan Dengan Baik)	What Doesn't Work! (Yang Belum Berjalan Dengan Baik)	What Should Be Improved! (Inisiatif Perbaikan)
79	Smart Environment		Pengelolaaan dan pemanfaatan hasil hutan			
80	Smart Environment		Rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi)			

3.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal. SWOT terdiri dari *Strenght* atau kekuatan, *Weakness* atau kelemahan, *Oppurtunity* atau kesempatan, dan *Threat* atau ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan suatu program kerja (Buchari Alma, 2008). Ferrel dan Harline (2005) menyatakan, fungsi SWOT untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal dan pokok persoalan eksternal. SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan analisis dalam upaya penetapan strategi.

Analisis SWOT digunakan untuk melihat secara lebih tajam dan teliti akan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada Kabupaten Mimika. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai atau ingin terjadi yang dapat dilihat sebagai hasil dari analisis masa depan, dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan daerah.

Dalam perencanaan strategis pengembangan *Smart City* diperlukan metodologi untuk menentukan langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil agar tujuan pengembangan *Smart City* dapat tercapai. Salah satu metodologi yang cukup umum digunakan untuk berbagai jenis perencanaan strategis adalah Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi 4 (empat) aspek yaitu:

- Kekuatan (*strengths*),
- kelemahan (*weaknesses*),
- peluang (*opportunities*), dan
- ancaman (*threats*) dalam suatu program kerja atau proyek.

Keempat aspek diatas yang membentuk akronim SWOT (*strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*). Proses ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung maupun yang tidak dalam mencapai tujuan program kerja atau proyek dimaksud. Berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing aspek pada Analisa SWOT.

Tabel 3.2 Matriks SWOT

Analisis SWOT		
Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** Kekuatan adalah kondisi internal yang menjadi pendorong keberhasilan meraih sukses dalam program kerja atau proyek *Smart City*. Menentukan kekuatan harus dilakukan secara obyektif agar dapat benar benar menghasilkan strategi yang realistis dan tepat. Kekuatan dapat berupa kepemilikan atau akses terhadap sumber daya yang diperlukan termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, teknologi dan lain lain. Kekuatan juga dapat berupa pengalaman, kebijakan yang sudah dirumuskan dan secara konsisten diterapkan dan hal hal lain. Perlu diingatkan sekali lagi bahwa kekuatan umumnya adalah sesuatu yang bersifat internal, dalam hal ini pada pemerintah daerah.	**Kelemahan** Kelemahan adalah kondisi internal yang berpotensi menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pengembangan *Smart City* atau bagian dari pengembangan *Smart City.* Hal yang tidak menjadi kekuatan sejatinya adalah kelemahan. Demikian juga strategi yang baik adalah melakukan upaya yang tepat sehingga kelemahan dapat dikurangi agar pada satu saat menjadi kekuatan. Kelemahan dapat berupa tidak tersedianya hal hal yang diperlukan seperti kebijakan, kompetensi SDM, sumber pendanaan, infrastruktur dasar. Hal hal lain seperti resistensi terhadap inovasi dan perubahan, rendahnya disiplin dan ketertiban umum dan rendahnya literasi masyarakat dapat juga menjadi kelemahan yang bila tidak ditanggulangi dapat menghambat tercapainya sasaran pengembangan *Smart City*.
Peluang Peluang secara umum dapat dikenali sebagai kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan mengembangkan atau mewujudkan *Smart City*. Peluang ini dapat berbentuk minat investasi, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan, pergantian generasi, dukungan pemerintah pusat, peran serta masyarakat, potensi kontribusi dari sektor usaha.	**Strategi Peluang dan Kekuatan** Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang	**Strategi Kelemahan dan Peluang** Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang

Analisis SWOT		
Mempertemukan kekuatan dengan peluang yang dimiliki berpotensi menjadi langkah strategis yang penting.		
Ancaman Ancaman adalah kondisi eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengembangan *Smart City*. Kondisi ini umumnya sulit untuk diatasi atau dikendalikan sepenuhnya. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi dampak dari kondisi ini melalui mitigasi dan menghindari strategi yang memerlukan kondisi yang justru menjadi ancaman. Yang berpotensi menjadi ancaman bisa berupa hal hal seperti perubahan iklim, bencana alam, gejolak sosial di masyarakat, konflik antar masyarakat, gangguan ketertiban umum dan lain lain. Selain itu dalam penerapan teknologi sebagai bagian dari inovasi dalam pengembangan *Smart City* juga dapat ditemukan ancaman seperti ketergantung berlebihan pada pelaku usaha dan teknologi tertentu, ketertinggalan teknologi yang berkembang/berubah cepat, meningkatnya biaya lisensi dan biaya perawatan teknologi tertentu. Pemahaman akan ancaman dapat sangat berguna dalam menentukan langkah langkah strategis apa yang	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghidari ancaman

Analisis SWOT		
akan diambil dalam pengembangan *Smart City* dengan risiko yang minimal yang mampu dikelola dengan baik.		

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2022

Berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing dimensi smart city di Kabupaten Mimika melalui masing-masing aspek pada Analisa SWOT.

3.2.1 Analisis SWOT *Smart Economy* Kabupaten Mimika

Tabel di bawah ini adalah analisis SWOT dan strateginya untuk dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT *Smart Economy* Kabupaten Mimika

Analisis SWOT		
Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan**	**Kelemahan**
	1. Memiliki wilayah pesisir yang sangat luas serta hasil tangkapan yang sangat banyak 2. Potensi kawasan mangrove yang masih luas 3. Banyak masyarakat yang ingin beternak 4. Motivasi pimpinan yang tinggi dalam pengembangan UKM noken 5. Tersedianya tenaga ahli 6. Objek wisata bahari 7. Objek wisata puncak Cartens 8. Objek wisata tambang 9. Kaya akan atraksi budaya 10. Dukungan dari Pemda dalam memberikan bantuan masyarakat 11. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri karena luasnya area yang dapat diperuntukan bagi pertanian 12. Adanya kebijakan daerah terkait pengembangan produk local 13. Sudah ada sistem pajak/retribusi daerah secara online dan terintegrasi dengan kas daerah. Wajib pajak dapat menyampaikan laporan pendapatan setiap hari.	1. Minimnya dukungan dana dari pemerintah daerah 2. Koordinasi instansi terkait belum terjalin baik 3. Belum adanya fasilatas yang memadai sehingga nelayan tidak dapat memasarkan hasil tangkapan 4. Minimnya pengawasan (kurangnya tenaga polisi kehutanan) 5. Kurangnya pengembangan kompetensi dalam meningkatkan pengembangan ternak 6. Kurangya partisipasi dari para IKM noken yang ada 7. Belum optimalnya pengelolaan pusat toko oleh-oleh khas mimika 8. Kurangnya support dari para pimpinan 9. SDM masih kurang 10. Masyarakat masih belum sadar tentang pariwisata 11. Alat transportasi belum memadai (laut) 12. Promosi wisata yang belum memadai 13. Keterbatasan anggaran dan jangka waktu yang terbatas 14. Ketergantungan PDRB pada sektor pertambangan

Analisis SWOT		
	Pemda setiap hari dapat memantau transaksi	15. Minimnya daya tarik investasi 16. Minimnya intervensi pengembangan dan pembangunan ekonomi di daerah pesisir
Peluang 1. Sumber daya alam tersedia 2. Memiliki venue-venue PON 3. Tersedianya pasar 4. Banyaknya pelaku usaha yang mau bekerja sama di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan 5. Daya saing memperindah kota 6. Tercipta peluang usaha 7. Meningkatnya perekonomian masyarakat 8. Terciptanya peluang usaha pengelolaan mangrove 9. Bisa memenuhi kebutuhan konsumen dalam maupun di luar 10. Dukungan dari pemda dan pemerintah pusat yang melalui dana bantuan UMKM 11. Meningkatnya IT 12. Meningkatnya animo masyarakat untuk pariwisata 13. Jumlah penduduk semakin meningkat 14. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 15. Memberikan peluang bisnis kepada masyarakat 16. Merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DOB (Daerah Otonom Baru) Papua Tengah	**Strategi Peluang dan Kekuatan** 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasaran serta kelembagaan untuk mendukung ketahanan pangan dan sistem agribisnis 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan pengembangan manusia (petani dan petugas) 3. Mengoptimalkan paket teknologi untuk peningkatan produksi dan mutu komoditas pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan dapat merespon peluang pasar 4. Memiliki badan hukum yang kurang baik, serta susahnya perijinan 5. Pelatihan untuk masyarakat 6. Mengadakan pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan produk untuk dijadikan peluang bisnis 7. Diberi modal usaha tiap-tiap UMKM yang ada 8. Alamnya yang masih asri 9. Hasil bumi yang melimpah 10. Melakukan promosi wisata lewat internet 11. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembentukan Koperasi 12. Memanfaatkan ketersediaan infrastruktur untuk promosi untuk Provinsi DOB (Daerah Otonom Baru) Papua Tengah	**Strategi Kelemahan dan Peluang** 1. Sosialisasi otonomi derah kepada petugas dan petani 2. Menyusun program dan kegiatan skala proritas dan berkualitas 3. Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait secara berkala 4. Hasil tayang yang buruk serta kurangnya siaran edukasi unuk masyarakat 5. Peningkatan SDM (polisi kehutanan) 6. Adanya pelatihan kepada SDM 7. Melakukan sosialisasi dan pendampingan 8. Sebelum diadakan suatu pelatihan, disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pengusaha IKM 9. Menyiapkan SDM 10. Meningkatkan sarana dan prasaran 11. Melakukan promosi wisata lewat internet 12. SDM yang masih kurang sehingga berdampak pada peningkatan perkembangan usahanya

Analisis SWOT		
dengan infrastruktur cukup lengkap (hotel, venue olahraga, dll)		
Ancaman 1. Perdagangan global 2. Serangan organisme penggangu tanaman (OTP) serta kondisi iklim yang kurang mendukung 3. Keadaan iklim yang tidak menentu 4. Kurangnya pengawasan lalulintas produk pertaniaan dari luar daerah 5. Wilayah pemasaran masih lokal 6. Selalu terjadi ilegal fishing 7. Istilasi keindahan kota 8. Terjadinya ilegal loging 9. Terjadinya lahan kritis 10. Penyakit hewan dan iklim daerah yang tidak menentu 11. Karena kurangnya kreatifitas sehingga nilai usahanya berkurang 12. Masyarakat yang belum sadar tentang pariwisata 13. Objek wisata daerah lain lebih terkenal dan menarik 14. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan usanya	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** 1. Melakukan pembinaan sistem agrbisnis secara utuh dan terpadu kepada petani dalam mengjhadapi perdagangan global 2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi penggunaan teknologi pertanian tepat guna 3. Melakukan penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OTP) dan bencana alam 4. Meningkatnya pengawasan penanaman kembali (reboisasi) 5. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan ternak dan cara menanggulanginya 6. Dengan adanya persaingan usaha noken yang menjamur membuat para pengusaha semakin kreatif 7. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat 8. Dukungan pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** 1. Melakukan pembinaan dan pembinaan mutu produk pertaniaan dan perkebunan 2. Meningkatkan disiplin dan etos kerja aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian skala proritas 3. Mengembangkan jaringan-jaringan data informasi teknologi pertanian 4. Menganggu keindahan kota 5. Meningkatkan kepedulian kepada lingkungan 6. Menyediakan obat-obatan dan tenaga pendamping teknis 7. Pertisipan harus diundang dan produk yang dilatih harus inovatif dan penuh kreativitas 8. Melakukan penataan destinasi wisata 9. Pemerintah daerah harus menyediakan dana yang cukup untuk dapat mengatasi kegiatan yang berhubungan dengan kualitas SDM

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.2.2 Analisis SWOT *Smart Governance* Kabupaten Mimika

Tabel di bawah ini adalah analisis SWOT dan strateginya untuk dimensi *Smart Governance* di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.4 Matriks Analisis SWOT *Smart Governance* Kabupaten Mimika

Analisis SWOT		
Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
	1. Komitmen Kepala Daerah terhadap pengembangan *Smart City* ditandai dengan adanya perbup terkait masterplan smart city 2. Memiliki Mimika Command Center dan Ruang Server terintegrasi 3. Sudah tersedia infrastruktur jaringan terintegrasi pada setiap OPD. 4. Terdapat sentralisasi pemusatan data pada 40 OPD 5. Tersedianya inovasi layanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online 6. Internet publik tersebar di 6 lokasi 7. Memiliki penyimpanan arsip secara digital (cloud) 8. Layanan secure acces di 3 OPD (Disdukcapil, Disdik, dan Dinsos)	1. Jaringan internet yang belum stabil di daerah terpencil 2. SDM pengelolaan TIK belum memadai 3. Belum tersedianya perangkat TIK yang memadai 4. Belum tersedia anggaran TIK sesuai kebutuhan 5. Kurangnya sosialisasi pemanfaatan layanan TIK 6. Pemahaman masyarakat terhadap layanan berbasis TIK yang masih minim 7. Masih adanya infrastruktur *hardware* dinas yang masih belum aman dari segi informasi 8. Layanan informasi yang masih belum baik 9. Belum teredukasinya setiap OPD terhadap pentingnya efektifitas dan efisiensi pemanfaatan website/aplikasi 10. Pembiayaan program Smart City yang bersumber dari APBD masih sangat minim. 11. Keterlibatan seluruh Perangkat Daerah masih minim dan pemahaman terhadap misi daerah dan proses proses yang harus dijalani untuk mengembangkan daerah masih minim.

Analisis SWOT		
		12. Keterlibatan seluruh masyarakat masih minim. 13. Tidak transparan mengenai anggaran untuk smartcity 14. Infrastruktur TIK belum merata. 15. Kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Mimika masih terbatas. 16. Kolaborasi dan kerjasama antara perangkat daerah masih terbatas.
Peluang 1. Adanya komitmen Kepala OPD dalam menerapkan dan mengembangkan Smart Governance 2. Adanya portal informasi Kabupaten Mimika berbasis web 3. Ada dukungan dan kerjasama dengan vendor TIK/ISP 4. Adanya bantuan kerjasama dari pihak akademisi yaitu ITB	**Strategi Peluang dan Kekuatan** 1. Melakukan pengembangan penerapan digitalisasi layanan publik dan kepemerintahan pada setiap OPD 2. Mengadakan sosialisasi pemanfaatan layanan TIK 3. Antar OPD sudah saling terintegrasi dalam satu jaringan dan server 4. Tersedianya CSR TIK dari Vendor berupa Free Hotspot dan Pelatihan TIK 5. Pengembangan sarana dengan melibatkan masyarakat dalam partisipasi melalui hotline, radio dan media sosial (wa,facebook, Instagram, dll) 6. Tersedianya aplikasi penerbitan rekomendasi perizinan dan kependudukan tahap kecamatan	**Strategi Kelemahan dan Peluang** 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala penerapan digitalisasi pada tiap OPD yang dipimpin Kepala Daerah 2. Mengadakan lomba inovasi TIK dan memberikan apresiasi dalam bentuk dukungan anggaran TIK pada OPD terkait 3. Mengintegrasikan sistem informasi/aplikasi berbagi pakai semua OPD dalam satu portal 4. Penguatan SDM TIK dengan melakukan pelatihan pemanfaatan TIK pada ASN 5. Mengintegrasikan aplikasi penerbitan rekomendasi perizinan dan kependudukan tingkat Kecamatan dengan database Disdukcapil
Ancaman 1. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik dan kepemerintahan berbasis TIK oleh masyarakat 2. Meningkatnya harga perangkat dan maintenance TIK 3. APBD masih terbatas untuk belanja TIK	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** 1. Peningkatan layanan publik dan kepemerintahan berbasis elektronik 2. Membuat pemetaan/roadmap anggaran perangkat TIK sesuai kebutuhan 3. Penetapan prioritas pengadaan teknologi secara berkala sesuai APBD	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** 1. Penetapan peta jalan pengembangan layanan publik yang berbasis TIK 2. Penetapan kebijakan terkait pemanfaatan TIK 3. Melakukan kajian terkait pemanfaatan TIK sesuai kebutuhan OPD 4. Perlu meningkatkan kemitraan dengan pihak lain untuk

Analisis SWOT		
		menambah sumber pembiayaan non-APBD guna membiayai implementasi smart city. 5. Perlu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Smart City. 6. Perlu meningkatkan pembiayaan untuk peningkatan skill sumber daya manusia. 7. Perlu mengembangkan inovasi di setiap dimensi Smart City (6 dimensi Smart City). 8. Perlu melaksanakan Forum Smart City secara berkala untuk menyamakan persepsi dan komitmen implementasi smart city. 9. Meningkatkan upaya-upaya integrasi dan interoperabilitas (aplikasi, data, program anggaran), termasuk memperbanyak inovasi cross-cutting lintas Perangkat Daerah (program keroyokan) untuk mendapatkan dampak yang lebih besar secara lebih efisien. 10. Perlu menambah kuantitas dan kualitas infrastruktur sebagai pendukung smart city. 11. Perlu meningkatkan literasi digital dan literasi Smart City kepada masyarakat (sosialisasi, pelatihan dan pendampingan) terkait smart city dan inovasi inovasi yang diberikan pemda. dengan demikian warga dapat secara optimal menggunakan layanan baru dan bisa juga meningkatkan produktivitas

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.2.3 Analisis SWOT *Smart Branding* Kabupaten Mimika

Tabel di bawah ini adalah analisis SWOT dan strateginya untuk dimensi *Smart Branding* di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.5 Matriks Analisis SWOT *Smart Branding* Kabupaten Mimika

Analisis SWOT		
Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** 1. Memiliki objek wisata potensial 2. Memiliki potensi alam 3. Kemudahan berinvestasi 4. Memiliki banyak UMKM 5. Memiliki banyak seniman dan pengrajin 6. Memiliki bandara Mozes Kilangin	**Kelemahan** 1. Keterbatasan Homstay , hotel atau penginapan 2. Aksesbilitas menuju objek wisata cukup jauh 3. Kebersihan fasilitas wisata 4. Transportasi 5. Belum adanya identitas khas daerah (Landmark)
Peluang 1. Menarik investor 2. Daya tarik wisatawan 3. Dukungan pemerintah pusat 4. Pengembangan infrastruktur 5. Kemudahan mendapatkan informasi melalui media sosial (IG, youtube, facebook) 6. Merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DOB (Daerah Otonom Baru) Papua Tengah dengan infrastruktur cukup lengkap (hotel, venue olahraga, dll)	**Strategi Peluang dan Kekuatan** 1. Membangun, memperbaiki dan memelihara SAPRAS wisata 2. Mengembangkan atraksi wisata 3. Membangun akses yang baik 4. Update dan promosi wisata lewat media sosial 5. Melibatkan peran media sebagai penulis/pembuat berita mengenai potensi wisata di Kabupaten Mimika 6. Memanfaatkan ketersediaan infrastruktur untuk promosi untuk Provinsi DOB (Daerah Otonom Baru) Papua Tengah	**Strategi Kelemahan dan Peluang** 1. Sosialisasi pentingnya sadar wisata kepada masyarakat 2. Koordinasi pihak swasta untuk mengelola objek wisata 3. Bekerja sama dengan pihak hotel untuk menyediakan kendaraan shuttle untuk mengantar wisatawan ke tempat wisata 4. Membangun landmark
Ancaman 1. Limbah tambang 2. sampah	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** 1. Kebijakan kepala derah	**Strategi Kelemahan dan Ancaman**

Analisis SWOT		
	2. Mengoptimalisasi keunikan objek masing-masing objek wisata 3. Melakukan kontrol tegas terhadap pelaku wisata yang merusak objek wisata	1. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap fasilitas objek wisata 2. Peningkatan SDM dalam pengelolaan dan pemeliharaan wisata

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.2.1 Analisis SWOT *Smart Living* Kabupaten Mimika

Tabel di bawah ini adalah analisis SWOT dan strateginya untuk dimensi *Smart Living* di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.6 Matriks Analisis SWOT *Smart Living* Kabupaten Mimika

Analisis SWOT		
Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** 1. Ruas jalan nasional semakin panjang 2. Sudah memiliki Sistem perizinan Tata Ruang 3. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu telah tersebar di seluruh kecamatan 4. Terdapat Pelabuhan Penyeberangan dan Dermaga	**Kelemahan** 1. Jumlah dokter belum memadai 2. Peralatan dan sarana di Puskesmas belum semuanya sesuai standar 3. Infrastruktur air minum layak dan sanitasi di beberapa tempat belum memadai 4. kualitas sarpras kesehatan yang masih rendah 5. Kurangnya fasilitas kesehatan utama di daerah-daerah 6. Minim sarana dan prasarana pendungkung kesehatan masyarakat 7. harapan lama sekolah yang rendah berpengaruh terhadap IPM 8. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat 9. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat 10. aksesibilitas menuju fasilitas sekolah masih sulit

Analisis SWOT		
Peluang 1. APBN yang masuk di Pemkab Mimika Cukup besar 2. Area yang diperuntukkan bagi pertanian masih sangat luas 3. Anggaran infrastruktur dalam APBD cukup besar	**Strategi Peluang dan Kekuatan** 1. Peningkatan Panjang jalan kabupaten lewat APBD/APBN 2. Penataan ruang wilayah menuju Kawasan ekonomi strategis	**Strategi Kelemahan dan Peluang** 1. Percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar dan perhubungan yang mengutamakan pemerataan 2. Perbaikan akses menuju ibu kota kabupaten
Ancaman 1. Akses air minum layak dan sanitasi di permukiman yang masih rendah dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat 2. Pertumbuhan penduduk relatif kecil	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** 1. Peningkatan kualitas jalan nasional karena akses ke Timika 2. Puskesmas harus menjadi pusat informasi/penyuluhan kesehatan bagi masyarakat 3. Pelaksanaan program transmigrasi untuk percepatan pembangunan terutama pertanian tanaman pangan dan hortikultura.	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** 1. Peningkatan jumlah dokter tetap 2. Perbaikan sarana dan peralatan Puskesmas 3. Peningkatan cakupan air minum layak dan sanitasi di permukiman 4. Platform transportasi umum (misalnya dengan aplikasi)

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.2.1 Analisis SWOT *Smart Society* Kabupaten Mimika

Tabel di bawah ini adalah analisis SWOT dan strateginya untuk dimensi *Smart Society* di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.7 Matriks Analisis SWOT *Smart Society* Kabupaten Mimika

Analisis SWOT		
Faktor Internal	**Kekuatan** 1. Setiap distrik sudah memiliki sekolah dari jenjang PAUD sampai SMA/MA/SMK/sederajat 2. Telah tersedianya Fasilitas Kesehatan di tingkat distrik. 3. Adanya fasilitas olahraga yang digunakan PON	**Kelemahan** 1. Belum adanya perpustakaan digital 2. Suasana ruang baca yang belum memadai 3. Akses menuju Sekolah yang luas

Analisis SWOT		
Faktor Eksternal		4. Kualifikasi dan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan yang menguasai IT marih rendah masih sebatas sebagai pemakai; 5. Masih Kurangnya SDM Dokter Spesialis. 6. Masih kurangnya Alkes yang ada di faskes yang ada. 7. Belum optimalnya digitalisasi pada dinas kesehatan dan faskes-faskesnya
Peluang 1. Telah tersedianya jaringan internet 2. Telah tersedianya Elearning dan pengolahan data base satuan pendidikan yang telah terinegrasi 3. Adanya semangat Pembangunan Kesehatan untuk peningkatan IPM Mimika	**Strategi Peluang dan Kekuatan** 1. Peningkatan minat baca melalui Pemberdayaan komunitas seperti rumah baca, kursus keterampilan dan lain-lain, 2. Menata dan pemanaatan sarana dan prasarana yang ada dengan optimal 3. Membangun aplikasi E-Perpustakaan sebagai cara penelusuran katalog online, layanan pendaftaran, serta booking buku. 4. Membuka Akses pendidikan yang mudah dijangkau; 5. Mengembangkan e-learning dengan optimal 6. Mengembangkan sistem Pelayanan Kesehatan secara digital. 7. Mengadakan event-event perlombaan turnamen olahrga antar masyarakat 8. Memanfaatkan venue-venue PON untuk ruang berkumpul komunitas	**Strategi Kelemahan dan Peluang** 1. Mendorong tersedianya purpustakaan digital 2. Menata ruang yang baik sehingga menambah betah pembaca 3. Pemenuhan peralatan IT 4. Melakukan Pelatihan dan bimbingan untuk menciptakan SDM yang dapat menggunakan dan menguasai IT 5. Pemenuhan dokter spesialis dan konsul dokter secara online 6. Pemenuhan fasilitas askes 7. Penggunaan digitalisasi pada Dinas kesehatan dan paskes-pakesnya.
Ancaman 1. Pimpinan pengambil kebijakan pindah tugas 2. Aturan alokasi dana yang dibatasi 3. Bandwidth yang rendah	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** 1. Mesti adanya masterplan 2. Meyiapkan proposal ke stekholder yang terkait untuk ikut membantu dalam pengembangannya 3. Memadukan Online dan Offline	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** 1. Pemenuhan pengambil kebijakan yang memiliki kompetensi 2. Pengalokasian data APBD untuk pengembangannya

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.2.1 Analisis SWOT *Smart Environment* Kabupaten Mimika

Tabel di bawah ini adalah analisis SWOT dan strateginya untuk dimensi *Smart Environment* di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.8 Matriks Analisis SWOT *Smart Environment* Kabupaten Mimika

Analisis SWOT		
Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** 1. Memiliki alat untuk pencacah sampah 2. Energi baru dari sampah plastik yang dapat diubah menjadi bahan bakar.	**Kelemahan** 1. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 2. Sarana prasarana Pemerintah yang kurang inovasi dan inovative dalam mendaur ulang sampah agar bermanfaat untuk masyarakat.
Peluang 1. Kabupaten Mimika melalui LH mempromosikan bank sampah dimana memacu kesadaran masyakarat untuk membuang sampah pada tempatnya dan dapat ditukar dengan hadiah yang telah disediakan (sampah berbayar) 2. Memenuhi target SDG's yang menjadi standar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika	**Strategi Peluang dan Kekuatan** 1. Meningkatkan tata kota yang akan meningkatkan perekonomian. 2. Memenuhi target-target pembangunan sesuai dengan RPJMD.	**Strategi Kelemahan dan Peluang** 1. Kurangnya peran serta pihak swasta dalam promosi dan sosialisasi tentang persampahan. 2. Melakukan Tindakan tegas berupa kebijakan bila masih terdapat masyarakat yang membuah sampah sembarangan
Ancaman 1. Perusakan lingkungan pada lahan bekas tambang 2. Ancaman banjir akibat masih banyaknya penumpukan sampah di beberapa titik	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** 1. Sosialisasi pengelolaan sampah agar tidak nenumpuk di wilayah pemukiman penduduk. 2. Sosialisasi pengelolaan pasca tambang	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** 1. Peningkatan pengelolaan sampah yang tidak hanya di Ibu kota tapi sampai juga ke distrik dan kelurahan. 2. Meningkatkan media informasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah mandiri di masyarakat.

Sumber: Hasil Analisa, 2023

BAB 4
Analisis Visi Pembangunan Smart City

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi, misi, dan sasaran *smart city* daerah sebagai landasan perumusan rumusan sasaran target capaian pembangunan *smart city* di di Kabupaten Mimika. Adapun visi, misi, dan sasaran *smart city* Kabupaten Mimika dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Visi, Misi, Smart City

Visi *Smart City* Kabupaten Mimika yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut.

"TERWUJUDNYA MIMIKA CERDAS, INOVATIF, AMAN DAN SEJAHTERA"

Visi *smart city* yang telah dirumuskan perlu diuraikan setiap pokok-pokok visi untuk memberikan arah pembangunan yang terukur. Berikut merupakan penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Mimika tersebut:

- **Cerdas**

  Terwujudnya Kabupaten Mimika yang cerdas dari segi sumber daya manusia, pelayanan, ekonomi, wajah kota, lingkungan, sosial, dan kehidupan yang nyaman

- **Inovatif**

  Terwujudnya pembangunan Kabupaten Mimika di seluruh sektor dengan mengedepankan inovasi-inovasi baik di sektor pembangunan maupun dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dalam rangka menjamin pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

- **Aman**

  Memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang didukung oleh penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM)
- **Sejahtera**

  Kesejahteraan merupakan hilir dari setiap holistikisasi perencanaan pembangunan daerah. Cita-cita setiap penyelenggaraan *smart city* bermuara untuk kesejahteraan rakyatnya.

Hal yang perlu ditekankan dalam pembangunan *smart city* Kabupaten Mimika 5 tahun kedepan dari nilai filosofis visi yang dirumuskan adalah bagaimana proses pencapaian kesejahteraan masyarakat Mimika adalah dimulai dari kata cerdas dalam visi tersebut yang artinya kemampuan Sumberdaya Manusia yang ada. Selanjutnya kondisi sosial masyarakat meliputi aman-damai yang mengindikasikan kondusif nya lingkungan dalam membangun kota yang cerdas.

MISI *SMART CITY* KABUPATEN MIMIKA

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan dalam pembangunan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka dirumuskan misi daerah adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efesien dan komunikatif;
- Meningkatkan daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
- Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat;

- Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efesien;
- Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, dinamis, dan cerdas; dan
- Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance)* yang melayani, bersih, inovatif dan sinergis merupakan pintu masuk penyelenggaraan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Mimika . Sasaran pembangunan yang disepakati hanya akan terwujud jika diiringi dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Kabupaten Mimika akan berkomitmen untuk terus membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang professional, terukur dan berkeadilan.

Upaya transformasi digitalisasi penyelenggaraan birokrasi merupakan prioritas untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan prioritas sektor yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika kedepan untuk menjamin keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan, menjamin suasana kerja yang kondusif dan refresentatif dan akhirnya akan mampu mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

4.2 Sasaran Smart City Daerah

Setelah pernyataan visi *Smart City* daerah tersusun, tahapan selanjutnya adalah menerjemahkan visi *Smart City* tersebut ke dalam ukuran capaian keberhasilan yang disusun di dalam sasaran *Smart City* daerah. Sasaran *Smart City* daerah merupakan rangkaian indikator keberhasilan yang menjadi alat ukur dalam evaluasi pelaksanaan *Smart City*.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini Sasaran *Smart City* Kabupaten Mimika yaitu berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi *Smart City* Kabupaten Mimika. Kota cerdas yang dibangun pada prinsipnya berbasis pada potensi lokal sebagai keunggulan dan identitas daerah yang akan menjadi sumber energi baru untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta mampu menjadikan Kabupaten Mimika sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah sekitarnya. Selain itu, kebijakan kota cerdas juga harus dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan inovasi di seluruh elemen kehidupan masyarakat.

Berikut merupakan dasar pemikirian pemilihan sasaran *Smart City* di Kabupaten Mimika berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yang telah dirumuskan, yaitu:

1. *Smart Governance*

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. *Smart Governance* harus dapat dimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

2. *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembankan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Sasaran dari smart branding adalah meliputi Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*), Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*), dan Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)

3. *Smart Economy*

Sasaran dari dimensi *smart economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembankan tiga elemen dalam *smart economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

4. *Smart Living*

Sasaran dari *smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Sasaran-sasaran tersebut meliputi Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*), Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*), dan Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*).

5. *Smart Society*

Sasaran dari *smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

6. *Smart Environment*

Sasaran *smart envir*onment meliputi Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*), Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*), dan Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab *(Energy)*

Dari penejelasan dasar pemikiran mengenai sasaran *smart city*, maka dapat dikelompokkan sasaran-sasaran *smart city* Kabupaten Mimika sebagai berikut.

Tabel 4.1 Sasaran *Smart City* Kabupaten Mimika

No	Misi/Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi	Sasaran Kabupaten Mimika	Dasar Pemikiran
1	***Smart Governance*** Terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efesien dan komunikatif	G1 Layanan Publik G2 Birokrasi G3 Kebijakan Publik	G1.1 • Meningkatkan kualitas layanan publik; G2.1 • Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi; G3.1 • Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan.	• Kemudahan Akses Layanan Publik dan Efisiensi Waktu, Mengurangi interaksi fisik untuk permohonan layanan • Perlunya penguatan birokrasi yang memi kemampuan menangkap, merespon dan memahami kebutuhan masyarakat dan era saat ini
2	***Smart Branding*** Meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional	B1 Pariwisata B2 Bisinis B3 Wajah Kota	B1.1 • Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*Tourism branding*); B2.1 • Membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*Business branding*); B3.1 • Membangun dan memasarkan wajah kota (*City apprearance branding*).	• Perlu adanya optimalisasi memasarkan pariwisata yang sudah ada • Memperinci target pasar wisatawan untuk pariwisata (warga lokal/pegawai freeport) • Belum adanya landmark atau ciri khas daerah Kabupaten Mimika • Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mimika dengan berbagai kemudahan akses perijinan. • Saat ini platform sosial media mengenai pengenalan Kabupaten Mimika belum maksimal

No	Misi/Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi	Sasaran Kabupaten Mimika	Dasar Pemikiran
				• Desain perkotaan di Kabupaten Mimika yang masih belum tertata dengan baik.
3	***Smart Economy*** Terwujudnya ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat	Ec1 Industri Ec2 Kesejahteraan Masyarakat Ec3 Transaksi Keuangan	Ec1.1 • Membangun ekosistem industri yang berdaya saing; Ec2.1 • Mewujudkan kesejahteraan rakyat; Ec3.1 • Membangun ekosistem transaksi keuangan.	• Sebagian pasar yang ada di Mimika masih belum difungsikan dengan baik oleh masyarakat. • Pemasaran dan distribusi hasil produksi masyarakat khususnya UMKM masih terbatas • Hasil bumi masih dipasarkan dalam bentuk mentah atau olahan sederhana sehingga belum memberikan nilai tambah yang besar • Sebagian besar masyarakat belum mengenal literasi keuangan. • Era saat ini yang mendukung penggunaan cashless atau e-money (qris, dll)
4	***Smart Living*** Terwujudnya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efesien	Lv1 Tata Ruang Wilayah Lv2 Kesehatan Lv3 Transportasi	Lv1.1 • Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah; Lv2.1 • Meyediakan prasarana kesehatan yang berkualitas; Lv3.1 • Menyediakan transportasi publik yang nyaman.	• Masih banyak masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni • Jumlah tenaga kesehatan belum memadai • Peralatan dan sarana di Puskesmas belum semuanya sesuai standar • Masih kurangnya Alkes yang ada di faskes yang ada. • Belum optimalnya digitalisasi pada dinas kesehatan dan faskes-faskesnya

No	Misi/Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi	Sasaran Kabupaten Mimika	Dasar Pemikiran
				• Infrastruktur air minum layak dan sanitasi di beberapa tempat belum memadai • Tidak adanya sarana prasarana transportasi publik di Mimika
5	***Smart Society*** Terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis	S1 Interaksi Masyarakat S2 Ekosistem Belajar S3 Keamanan Masyarakat	S1.1 • Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*); S2.1 • Membangun ekosistem belajar yang efisien (*education*); S3.1 • Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*).	• Belum maksimalnya penggunaan ruang-ruang atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas (venue PON) • Suasana ruang baca yang belum memadai • Kualifikasi dan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan yang menguasai IT marih rendah masih sebatas sebagai pemakai; • Keberadaan CCTV belum maksimal dimanfaatkan oleh setiap sektor
6	***Smart Environment*** Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan	En1 Proteksi Lingkungan En2 Tata Kelola Sampah	En1.1 • Melindungi ekosistem penting dan mengembalikan kawasan lahan kritis; En2.1 • Mengelola limbah dan sampah.	• Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. • Sarana prasarana Pemerintah yang kurang inovasi dan inovatif dalam mendaur ulang sampah agar bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi nilai rupiah.

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Sasaran-sasaran dari dibentuknya *smart city* di Kabupaten Mimika merupakan hasil dari dasar pemikiran dari masing-masing opd maupun masyarkat Mimika dilihat dari potensi dan permasalahan yang ada, kemudian dituangkan menjadi sasaran yang dikelompokkan kedalam 6 dimensi *smart city meliputi smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society,* dan *smart environment* yang ada di Kabupaten Mimika.

Dari misi *smart city* melalui dimensi *smart governance* yaitu Terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efesien dan komunikatif, terdapat 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan. Dari misi dimensi *smart branding* yaitu meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional, terdapat 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata, membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis daerah, membangun dan memasarkan wajah kota. Dari misi *smart economy* yaitu terwujudnya ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat , terdapat 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu membangun ekosistem industri yang berdaya saing, mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun ekosistem transaksi keuangan.

Sasaran yang ingin dicapai dari misi dimensi *smart living* yaitu mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah, meyediakan prasarana kesehatan yang berkualitas, dan menyediakan transportasi publik yang nyaman. Dari misi *smart city* melalui dimensi *smart society* yaitu Terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis terdapat 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*), membangun ekosistem belajar yang efisien (*education*), mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*). Terakhir dari dimensi smart environment dengan misi Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, terdapat 2 sasaran yang ingin dicapai yaitu melindungi ekosistem penting dan mengembalikan kawasan lahan kritis dan mengelola limbah dan sampah.

Daftar Pustaka

Kabupaten Mimika (2020) RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024.

Kabupaten Mimika (2021) RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2022

Kabupaten Mimika (2020) RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024

Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021, February 23). Kesesuaian NSPK Program/Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City - Gerakan Menuju Smart City.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2019). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.

Electrical Technology. (2019, November 15). Internet of things (IOT) and its applications. https://www.electricaltechnology.org/2016/07/internet-of-things-iot-and-its-applications-in-electrical-power-industry.html

diskominfo
KABUPATEN MIMIKA

©2023